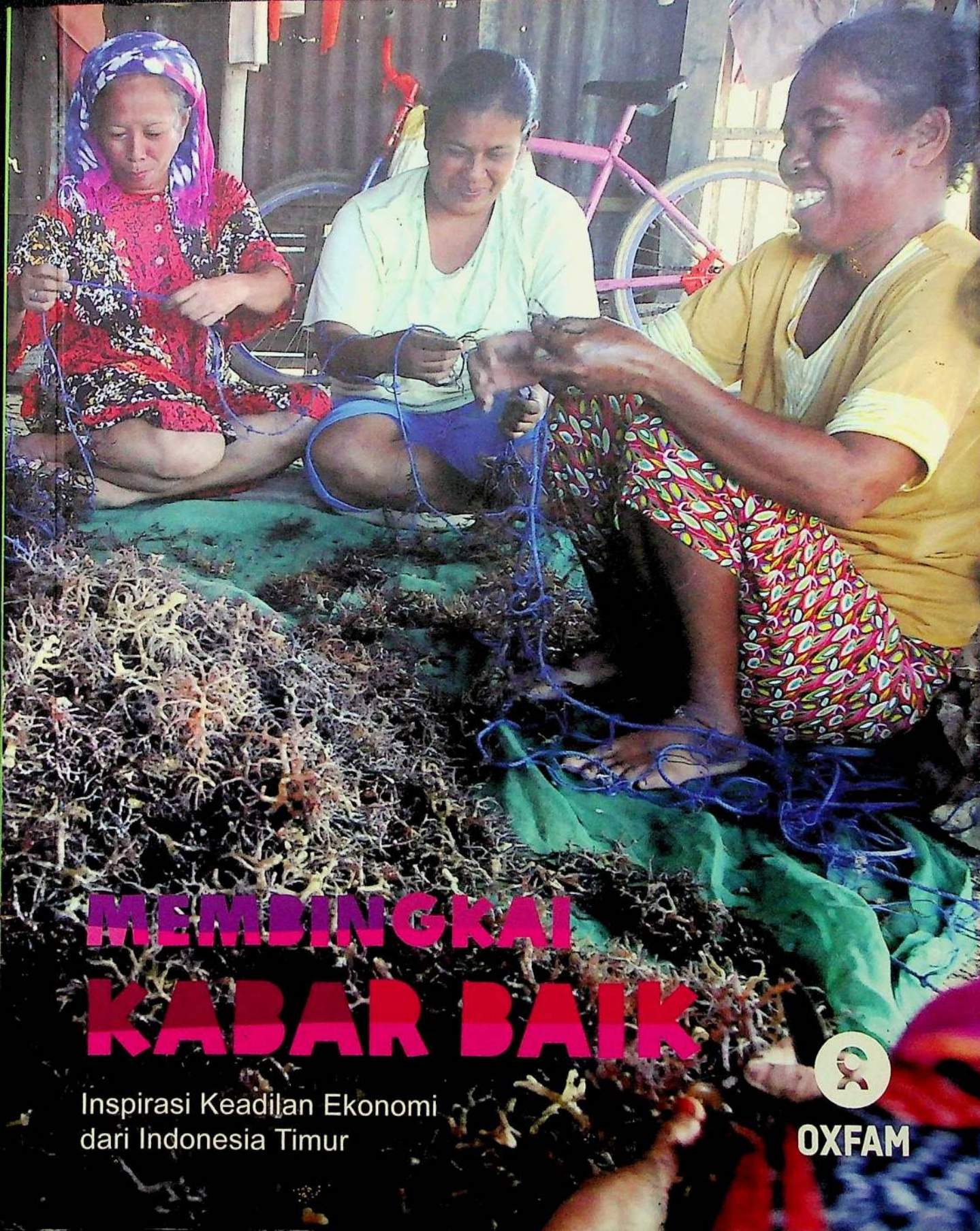


MEMBINGKAI KABAR BAIK

Inspirasi Keadilan Ekonomi
dari Indonesia Timur

OXFAM

ISBN 978-602-19630-3-6



MEMBINGKAI KABAR BAIK
Inspirasi Keadilan Ekonomi dari Indonesia Timur

© 2015
ISBN: 978-602-19630-3-6

Diterbitkan oleh: **Oxfam di Indonesia**
Jl. Taman Margasatwa No. 26A Ragunan, Jakarta 12550
T. +62 21 7811-827 F. +62 21 7813-321

www.oxfam.org.uk/indonesia
oxfamblogs.org/indonesia
FB: Oxfam Indonesia
Twitter: @OxfamIndonesia

Oxfam adalah konfederasi internasional dari 17 organisasi yang berjaringan bersama di 94 negara, sebagai bagian dari gerakan global untuk perubahan, membangun masa depan yang bebas dari ketidakadilan dan kemiskinan.

Oxfam:
Dini Widiastuti
Darmawan Triwibowo
Taufiqul Mujib
Virna Emily Tobing

Penulis: Diella Dachlan
Fotografer: Ng Swan Ti
Perancang Grafis: Arief Darmawan

Cyclus dibuat secara khusus dari 100% serat daur ulang.



Geliat Kedaulatan Pangan
di Tanah Sumba

Membentang Harapan
di Pesisir Barat Pangkajene





Lika-Liku Mengembangkan "Santapan Para Dewa"
di Jayapura

OXFAM



SEKAPUR SIRIH

Belajar dan terus belajar, berusaha menjadi lebih baik dan memberikan dampak yang lebih besar itulah sebenarnya tujuan dari penerbitan buku ini.

Buku ini berisi secuplik pengalaman dan pembelajaran Program Keadilan Ekonomi Oxfam bersama mitra-mitranya di tiga wilayah: Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Cerita-cerita dari lapangan yang kami tampilkan menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat, terutama bagi kaum perempuan desa serta tantangan baik yang sudah maupun belum berhasil ditanggulangi.

Kami mengajak para pembaca dan pemerhati mengikuti perjalanan dan kisah sukses perempuan dan laki-laki di Desa Mbatakapidu dalam memperjuangkan ketahanan pangan di wilayah tandus dalam cerita Geliat Ketahanan Pangan di Tanah Sumba. Kemudian, cerita di Pangkajene Kepulauan, sebuah wilayah pesisir di Sulawesi Selatan, di mana Oxfam membangun dan mengembangkan kelompok-kelompok petani organik dan kelompok rumput laut. Terakhir kami bawa Anda ke Kabupaten Jayapura untuk mengikuti perjalanan para petani kakao yang melakukan restorasi kakao di tengah desakan pembangunan dan semangat untuk mempertahankan budaya setempat.

Semoga cerita-cerita dalam buku ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk refleksi sekaligus memberikan harapan. Bagi kami, cerita-cerita ini memberikan sinyal bahwa kerja-kerja kami masih jauh dari usai.

Pembangunan adalah sebuah proses jangka panjang yang harus direncanakan, dipantau dan dievaluasi, serta disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat dan dilakukan secara partisipatif. Pemerintah dan kelompok atau organisasi masyarakat sipil dapat menjadi motor pembangunan. Tapi tanpa keterlibatan aktif anggota masyarakat, perempuan dan laki-laki, maka niscaya kemajuan yang dicapai tidak akan berkelanjutan.

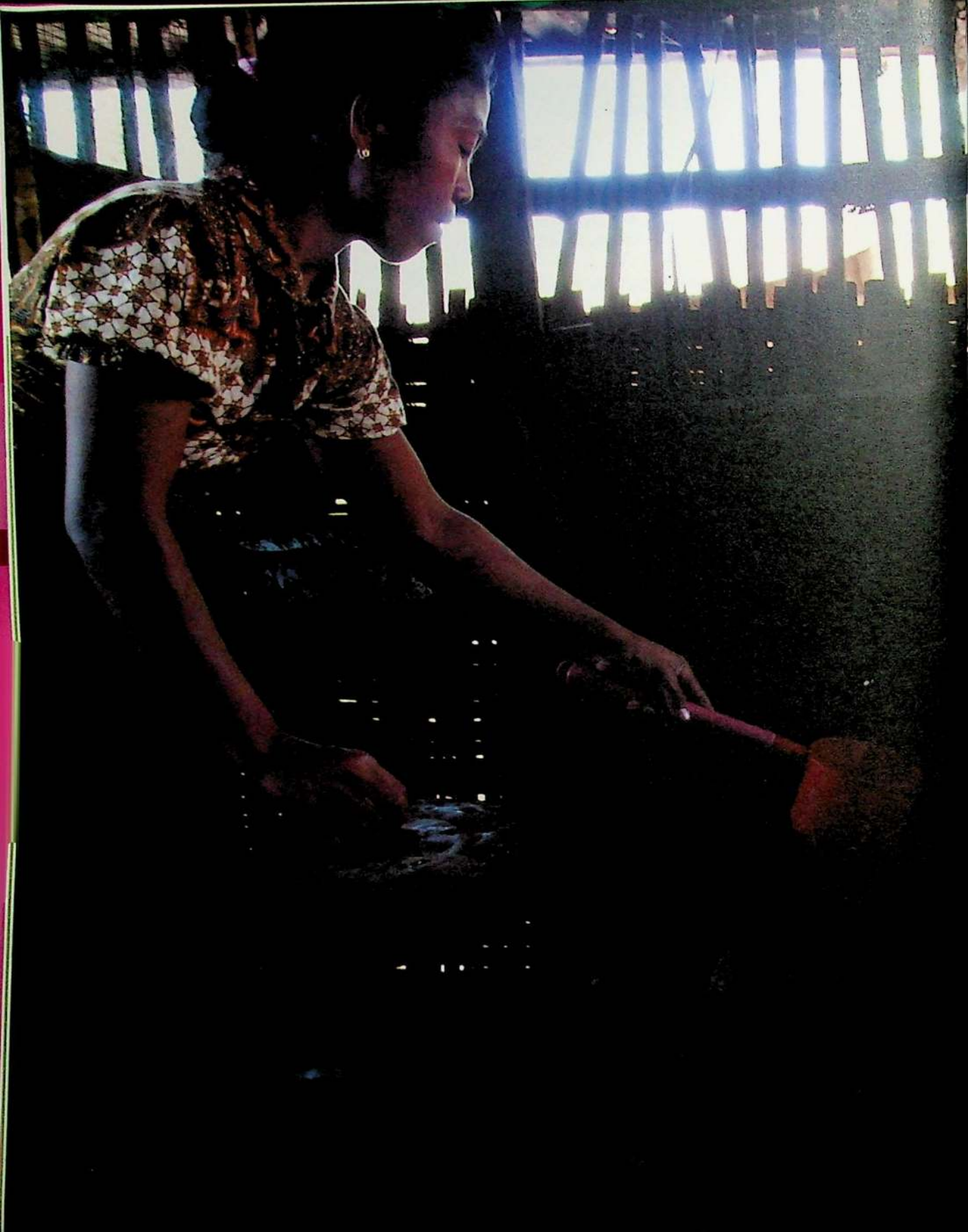
Jakarta, 20 April 2015

Dini Widiastuti
Program Direktur Program Keadilan Ekonomi

DAFTAR ISTILAH

ADS	Aliansi Desa Sejahtera
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKP	Badan Ketahanan Pangan
BP3KP	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (tingkat Kecamatan)
BP4K	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan
BP4KP	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (tingkat Kabupaten)
BRI	Bank Rakyat Indonesia
CIDA	*Canadian International Development Agency*
DFATD	*Department of Foreign Affairs, Trade and Development*
DMPDS	Desa Mandiri Pangan Menuju Sejahtera
FPTO	Forum Pelaku Tani Organik
GWTK	Gerakan Wajib Tanam Kakao
IDT	Inpres Desa Tertinggal
KIPRa	Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat
KRKP	Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan
KWT	Kelompok Wanita Tani
LKD	Lembaga Keuangan Desa
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MAP	*Mangrove Action Project*
MIPA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MOL	Mikroorganisme Lokal
Musrembang	Musyawarah Pembangunan
PBK	Penggerek Buah Kakao
PEDP	*Papua Enterprise Development Programme*
PKK	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
PPL	Petugas Penyuluh Lapangan
RCL	*Restoring Coastal Livelihood*
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SBSI	Sekretariat Bersama Indonesia Bersatu
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
TPD	Tim Pangan Desa
UNICEF	*The United Nations Children's Fund*
UPH	Unit Pengelolaan Hasil
VSD	*Vuscular Streak Dieback*
YKL	Yayasan Konservasi Laut
YPM	Yayasan Pahadang Manjaro







MEMBINGKAI KABAR BAIK



GELIAT KEDAULATAN PANGAN DI TANAH SUMBA

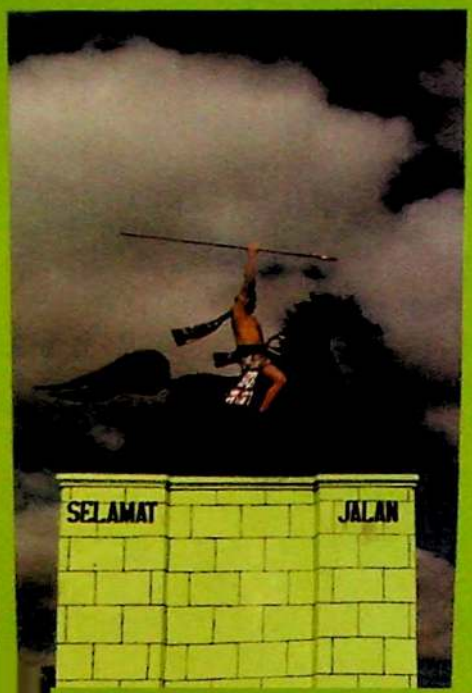


GELIAT KEDAULATAN PANGAN DI TANAH SUMBA

DAFTAR ISI

Gambaran Ringkas Sumba Timur	4
Bicara Pangan di Tanah Kering	6
Langkah Ketahanan Pangan Ala Desa Mbatakapidu	16
Srikandi Tapawallabadi	24
Visioner Pangan Mbatakapidu	32
Bagaimana Perubahan Terjadi?	36
Gabungan Kekuatan untuk Desa Sejahtera	44

Gambaran Ringkas Sumba Timur



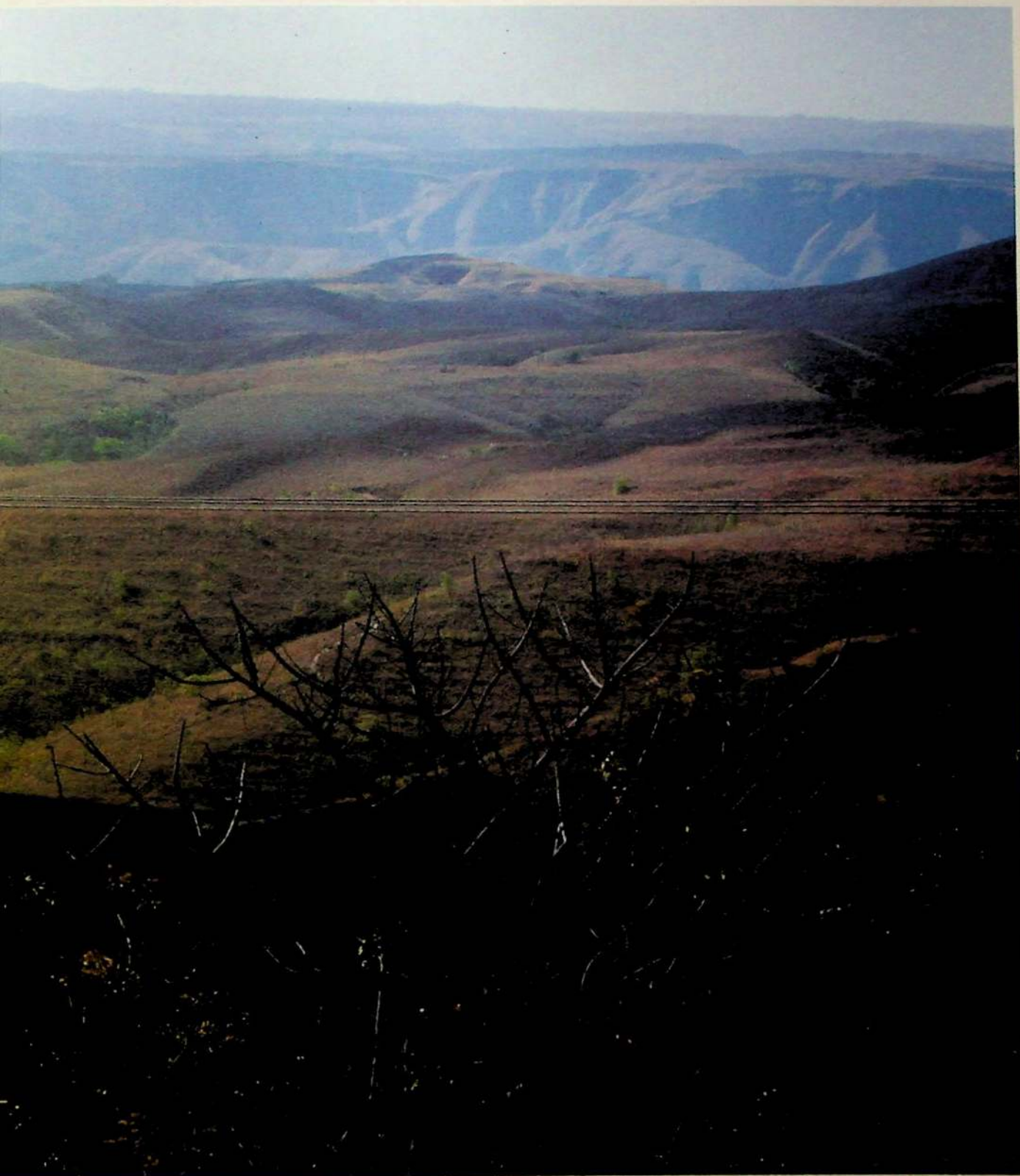
Kabupaten Sumba Timur adalah salah satu dari empat kabupaten yang ada di Pulau Sumba. Secara geografis, Kabupaten Sumba Timur memiliki wilayah seluas 7.000,5 Km² sedangkan wilayah lau seluas 8.373,53 Km² dengan panjang garis pantai 433,6 Km. Kabupaten Sumba Timur memiliki 80 buah pulau, yang tidak semuanya berpenghuni.

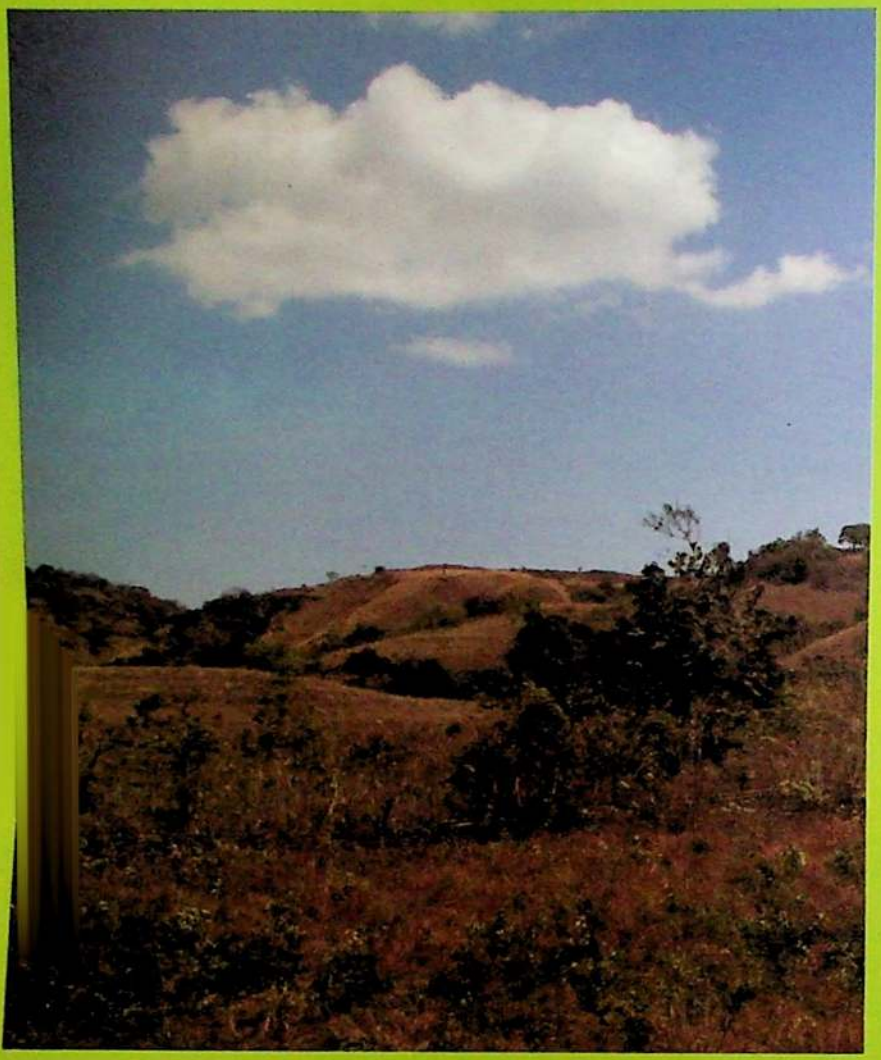
Secara administratif, Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 kecamatan dan 156 desa/kelurahan. Dari data penduduk tahun 2009, Kabupaten Sumba Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 225.906 Jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata sebanyak 32 jiwa/Km². Kabupaten Sumba Timur pada umumnya beriklim semi arid dengan curah hujan rata-rata per tahun berlangsung 3-4 bulan dengan suhu rata-rata 28,8-31,4°C. Jenis vegetasi yang menonjol adalah padang rumput seluas 223.568 hektar atau 31,91 persen dari luas wilayah Kabupaten Sumba Timur. Luas lahan sawah di Kabupaten Sumba Timur tahun 2008 adalah seluas 23.258 hektar, tetapi baru 14.219 hektar atau 61,14 persen luas lahan yang diusahakan, sedangkan luas lahan yang belum diusahakan dan belum ditanami padi seluas 7.409 hektar atau 31,86 persen. *(Sumber: RPJM Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011-2015)*

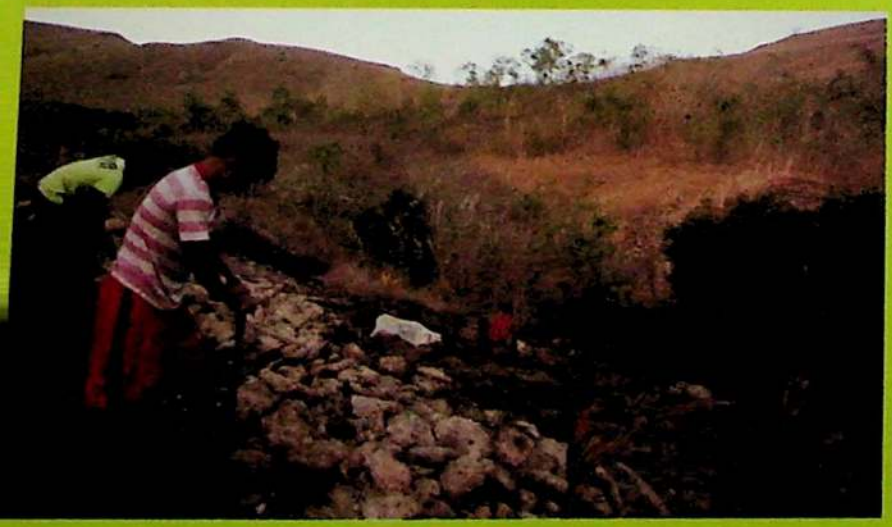




Yuliana Takajaji, salah satu anggota muda Tapawallabadi (22/8/14)







Bicara Pangan di Tanah Kering

Di musim kering seperti periode Juni hingga Oktober, warna cokelat mendominasi lanskap sebagian besar wilayah Sumba Timur, kabupaten seluas 7.000,5 kilometer persegi ini.

Hujan yang jarang turun, matahari terik dan minimnya jejak air di sebagian besar wilayah ini membuat kesan gersang bagi mata yang tidak terbiasa.

Heinrich Dengi, warga Kampung Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera lahir dan besar di Sumba Timur. Ia mengira tanah ini adalah "tanah kutukan" pemberian Tuhan. Sejak kecil, ia dan teman-temannya percaya bahwa tanah gersang, tandus, kering dan sukar ditanami adalah kebalikan dari "tanah harapan", yang subur, hijau dan berlimpah air.

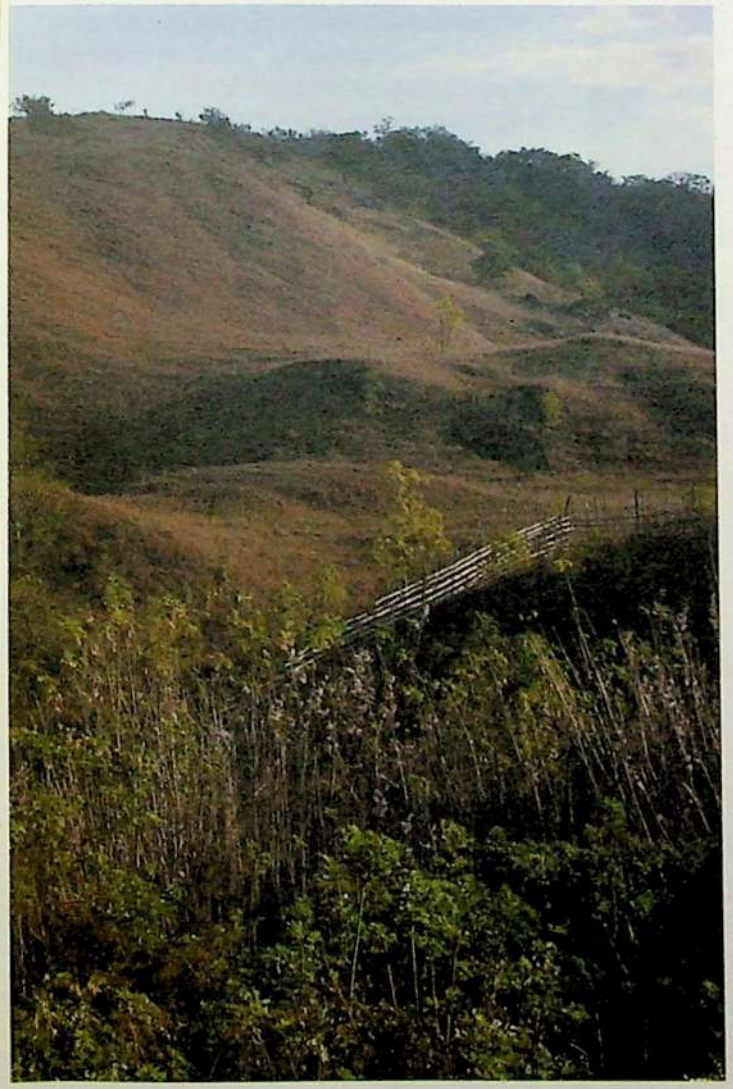
"Hampir seluruh bahan pangan dibawa dari luar. Sayuran datang dari Ende, beras dari Manggarai (Flores) dan banyak barang dari Jawa. Di musim kering ekstrem, malah banyak warga yang tidak bisa makan nasi karena tidak ada beras. Mereka harus ambil iwi (sejenis ubi-ubian) di hutan. Padahal kalau salah mengolah, iwi malah jadi racun," kata Heinrich (24/8/14) ketika ditemui di kediamannya di Kampung Kalu.

Pemandangan umum di Sumba Timur (atas). Pemuda Desa Mbatakapidu mengolah lahan.





Beras menjadi pangan utama masyarakat Sumba Timur (kiri atas). Padahal dulu masyarakat mengkonsumsi jagung dan ubi yang lebih cocok untuk iklim Sumba dan bergizi tinggi



Ladang sorgum di Desa Mbatakapidu (22/8/14).







"Bencana Kelaparan" Masuk Berita

Kondisi menyurutkan semangat ini semakin bertambah dengan berbagai pemberitaan media tentang "bencana kelaparan" yang terjadi di sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama pada tahun 2011.

Data-data berbagai hasil penelitian menyebutkan bahwa Provinsi NTT adalah salah satu provinsi yang masuk dalam katagori "rawan pangan". Kabupaten Sumba Timur termasuk salah satu "daerah merah" rawan pangan tersebut. Artinya, ancaman kelaparan bisa terjadi sewaktu-waktu.

Bicara ketahanan pangan, apalagi kedaulatan pangan, di kondisi alam yang menantang seperti Sumba Timur, atau di sebagian besar wilayah Provinsi NTT, membuat kita ikut masuk ke dalam pusaran kerumitan.

Ada berbagai hal di dalamnya. Kondisi kering dan minim air kerap kali dituding menjadi salah satu akar permasalahan utama yang berkaitan dengan minimnya produksi pangan di daerah ini.

Lalu kemudian ada persoalan budaya. Ada anggapan yang menyebutkan bahwa mayoritas penduduk, khususnya di Sumba Timur, adalah peternak yang belum terbiasa mengolah lahan dan bercocok tanam. Belum lagi data-data menyebutkan rendahnya sumber daya manusia yang

Pemuda bekerja mempersiapkan lahan tanam (atas). Kondisi umum di Desa Mbatakapidu (22/8/14)

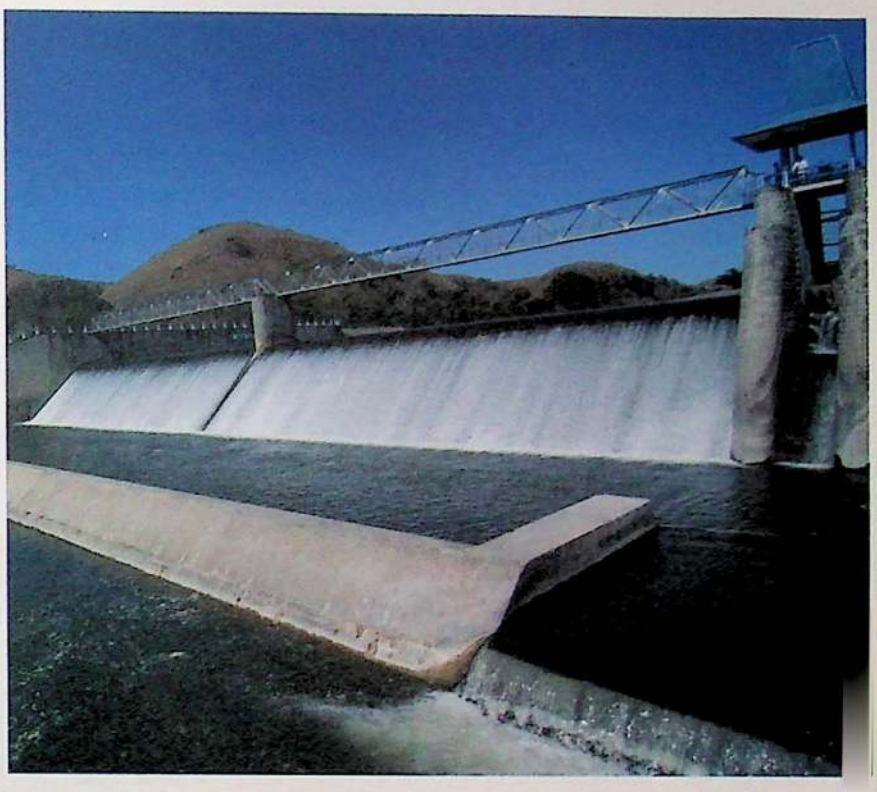
ditandai dengan rendahnya tingkat pendidikan, buruknya gizi dan jeratan kemiskinan, menambah suramnya gambaran daerah ini.

Di tataran pemerintah juga tak kalah kompleks tantangannya. Pembangunan infrastruktur, program pembangunan, anggaran dan penganggaran dinilai menggunakan pendekatan dan kacamata "penyeragaman". Padahal Indonesia yang kaya ragam tidak bisa diseragamkan.

Sejak pertengahan 1980-an hingga saat ini, sudah banyak berbagai bantuan masuk ke Provinsi NTT, termasuk ke Pulau Sumba. Bantuan ini datang melalui program pemerintah pusat dan daerah, program bantuan negara donor serta berbagai program lembaga bantuan internasional dan nasional. Fokus program diarahkan pada pertanian, pangan, kesehatan, pendidikan, usaha kecil, yang disertai dengan pembangunan infrastruktur.

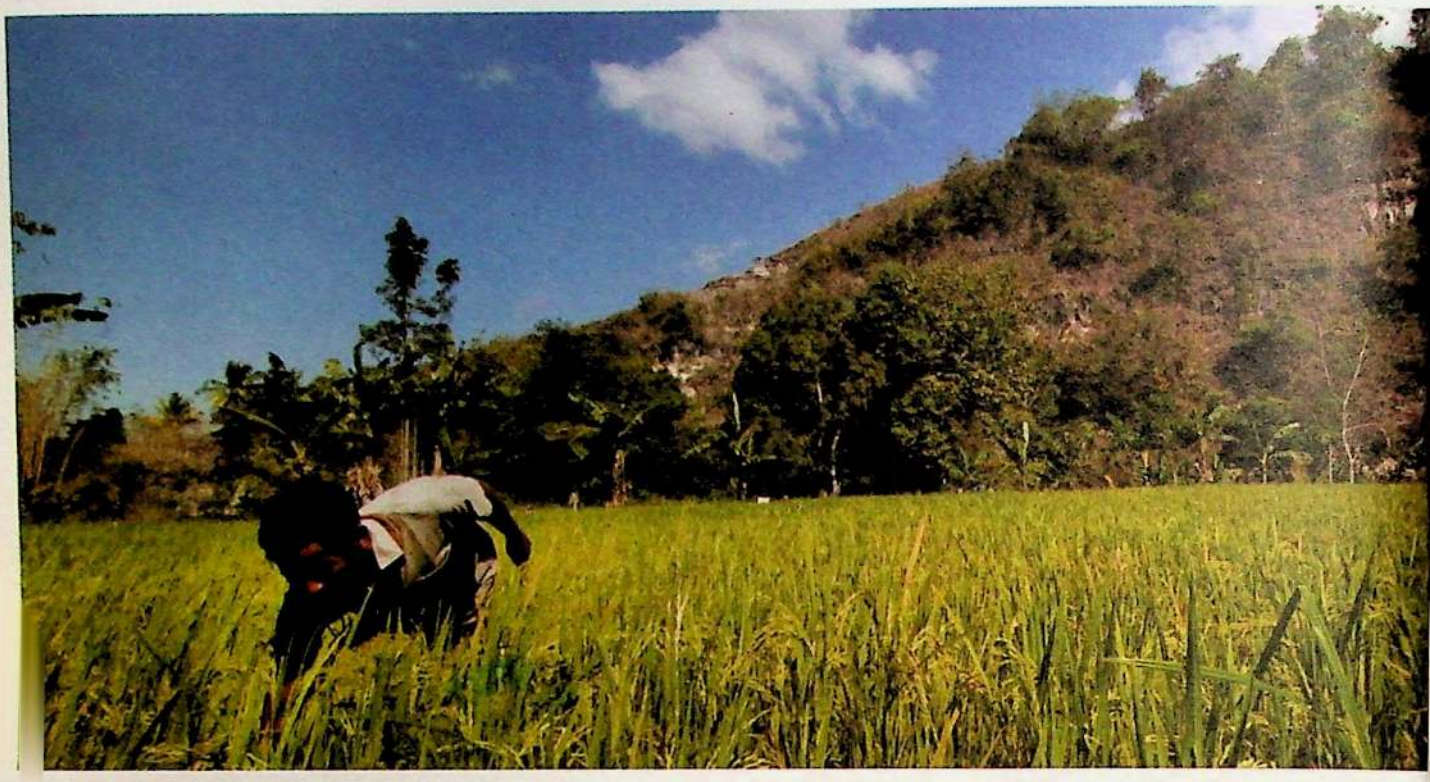
Berbagai program dan bantuan ini langsung disalurkan melalui program atau kebijakan pemerintah dari propinsi hingga desa, melalui mitra lembaga swadaya masyarakat lokal atau langsung melaksanakan program bersama masyarakat.

Perubahan memang tidak terjadi dalam satu malam. Satu dasawarsa pun terkadang belum cukup untuk membuat sebuah perubahan menuju landasan baru yang lebih kokoh. Ada banyak dinamika di dalamnya.



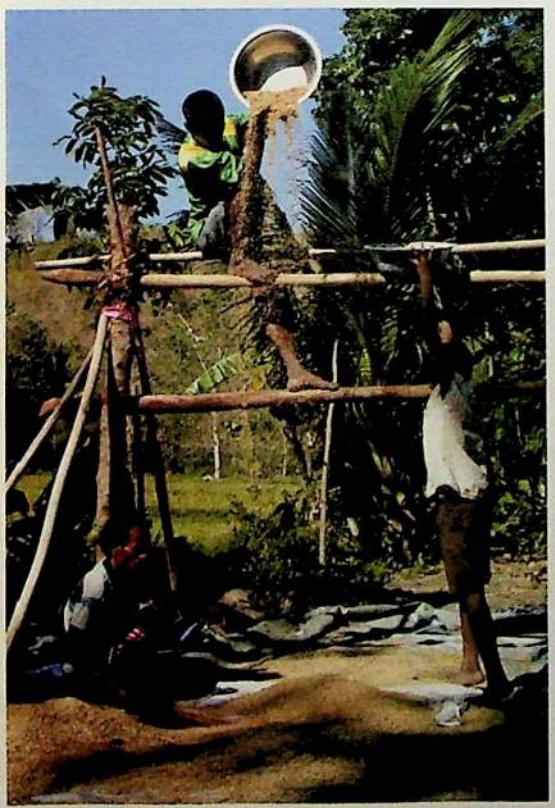


Bendungan Kambaniru, Kelurahan Malumbi, merupakan bendungan terbesar di Sumba Timur. Dibangun pada tahun 1992, bendungan ini mengairi sekitar 1.400 hektar sawah dan palawija.









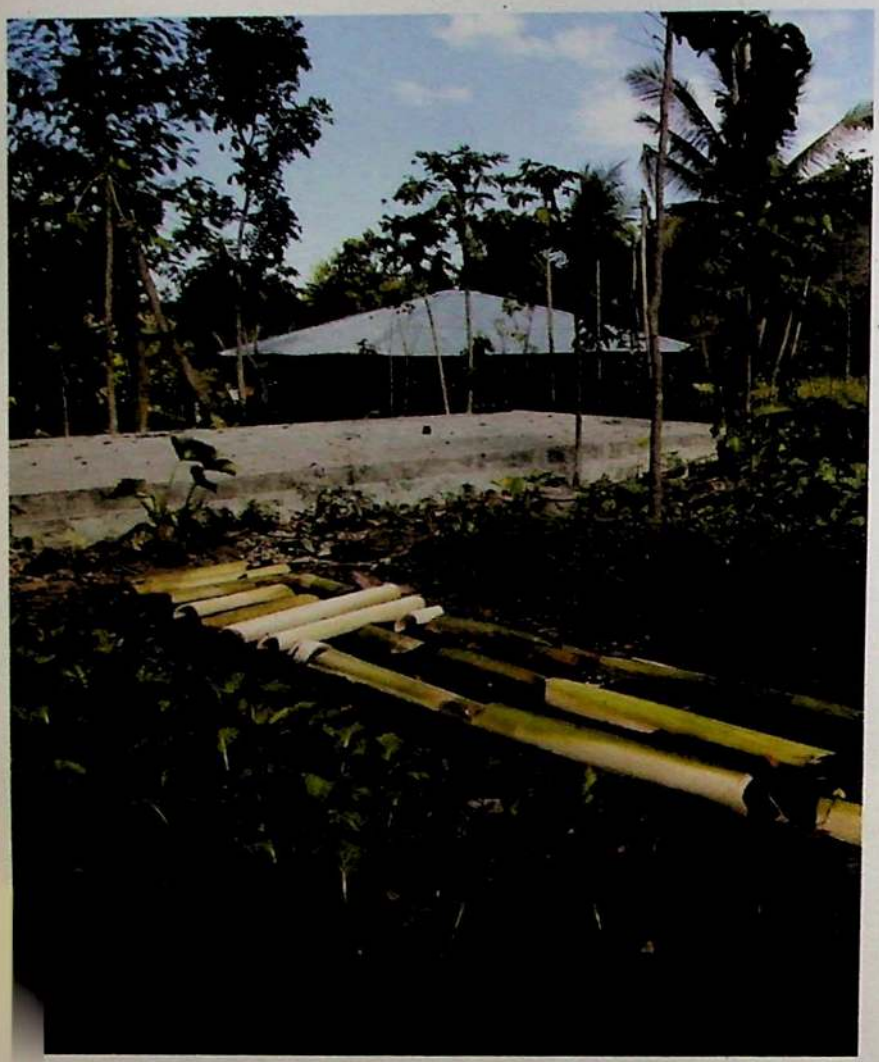
Namun, perubahan memang terjadi.

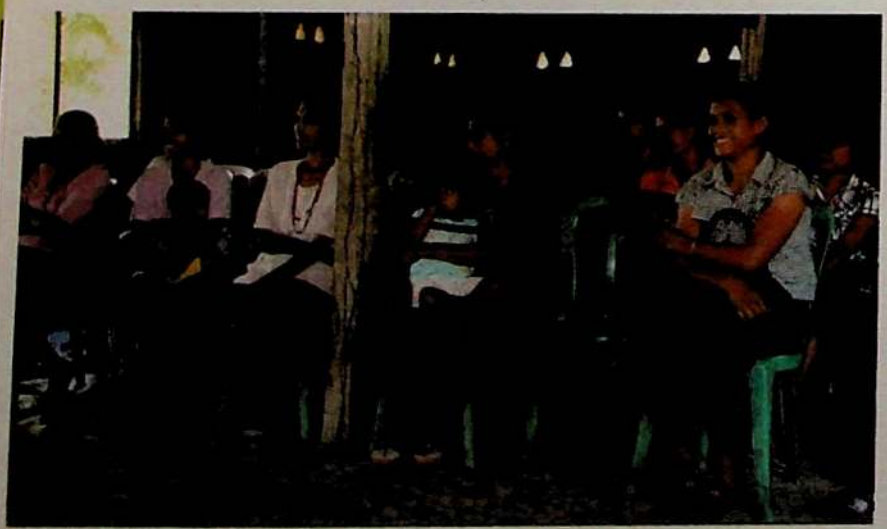
Ada gerakan-gerakan baru dari kelompok masyarakat yang berupaya memperbaiki taraf hidupnya. Tanah gersang tidak lagi dianggap sebagai lahan kutukan, namun potensi baru yang menunggu untuk digarap dan dikembangkan.

Ada model pendekatan baru yang merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi NTT, kabupaten, kecamatan hingga desa dengan berbagai lembaga internasional, nasional dan lokal dalam menjawab tantangan pangan melalui pendekatan pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga dan desa. Kolaborasi melalui Desa Mandiri Pangan Menuju Sejahtera (DMPDS) dari awal membuat perencanaan dan pedoman bersama, berbagi peran lalu memobilisasi sumber daya masing-masing sesuai dengan perannya di dalam mencapai tujuan.

Kontras sawah dan lahan kering (atas).
Menuai hasil panen di Desa Mbatakapidu (22/8/14).

Nukulanja Mara, petani di Desa Mbatakapidu (kiri atas)
dan kelompok Tapawallabadi (kiri bawah).





Jacob Tanda, kepala desa Mbatakapidu yang menolak daerahnya masuk dalam kategori "bencana kelaparan", sebagaimana pemberitaan media.

"Warga di sini memang suka cari iwi ke hutan, apalagi kalau tidak ada beras atau panen gagal. Ini karena memang warga belum terbiasa bertani serius. Mereka cenderung mengandalkan musim dan jenis tanamannya kurang bervariasi, misalnya hanya tanam jagung saja," kata Jacob (22/8/14) di kantornya.

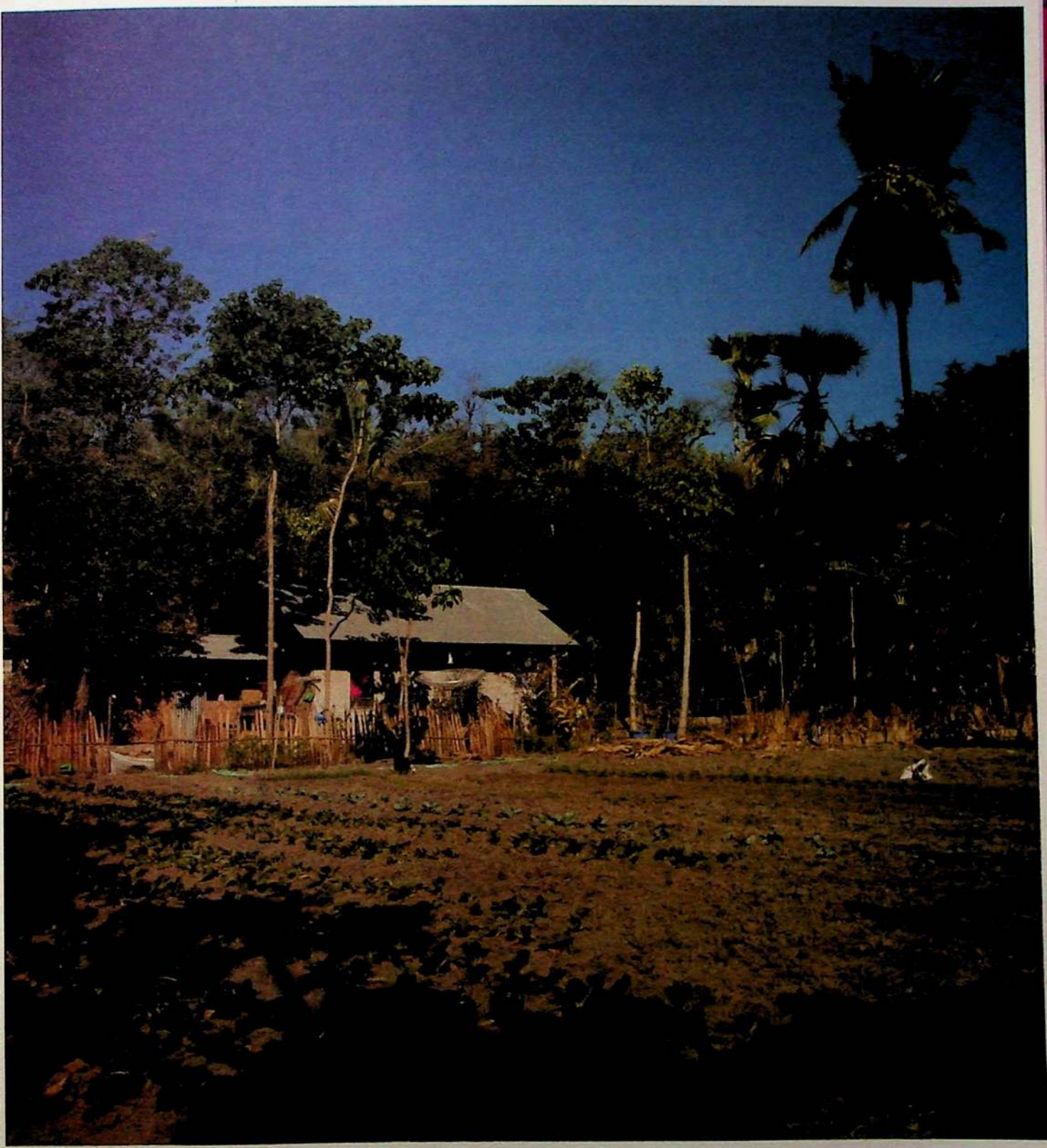
Jacob mengatakan di tahun 60-70, warga di desanya tidak masalah tidak makan beras, karena mengkonsumsi ubi, jagung, sorgum sebagai pangan lokal yang dihasilkan dari kebun sendiri.

Di masa kepemimpinannya sejak tahun 2009, Jacob membuat perubahan besar dari hal sederhana di desanya. Ia mencontohkan cara bercocok tanam dan mengharuskan warganya menanam setidaknya 10 jenis tanaman pangan di tanahnya (Lihat: **Visioner Dari Mbatakapidu**)

Kini rumput kering menghampar dan mendominasi wajah Desa Mbatakapidu mulai tergantikan oleh pepohonan dan tanaman pangan. Ada kelompok-kelompok perempuan yang gigih mengolah tanah tandus dan menopang ekonomi keluarga melalui tenun dan menjamin pendidikan anak dengan sistem tabungan pendidikan.

Aneka tanaman di lahan pertanian warga (atas). Pertemuan kelompok PKK Desa Mbatakapidu (23/8/14).

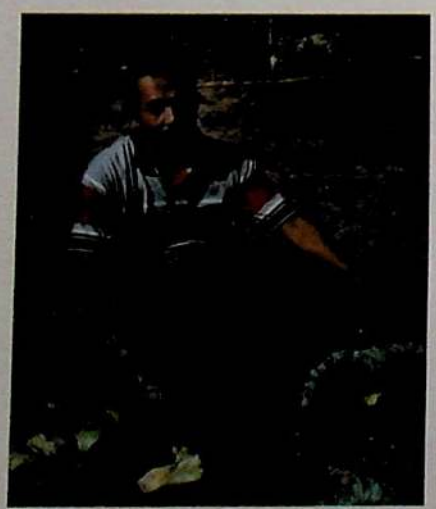
Ladang di Desa Kalu, Kelurahan Prailiu, Waingapu (kanan).











Siaran "Ayo Bertani Organik"

Kelompok tani di Desa Kalu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, kaget bercampur senang ketika kol pertama berhasil dipanen di desa ini. Hal ini tak lepas dari hasil eksperimen bersama yang dilakukan warga dengan penggiat pertanian, Rahmat Adiguna, asal Bandung.

"Saya datang ke Sumba Timur karena penasaran dengan berita "bencana kelaparan" yang ramai di media," kata Rahmat yang datang pada tahun 2012 dan tinggal di Waingapu hingga saat ini mendampingi kelompok tani. "Bagi saya, tidak ada lahan yang terlalu kering untuk ditanami. Lahan luas seperti di Sumba Timur ini justru merupakan potensi pertanian yang besar."

Anggapan kol hanya bisa tumbuh dan berkembang di dataran tinggi nan subur, terpatahkan sudah dengan pendekatan pertanian yang tepat. Hal ini dimulai dari penggunaan jenis benih yang sesuai dengan kondisi alam setempat dan tehnik budidayanya.

Jebakan lalat untuk mengendalikan hama dengan cara organik (atas).

Kol dan tanaman di Desa Kalu, Kelurahan Prailiu, Waingapu (25/8/14)

Heinrich Dengi bersiap siaran (kiri). Rahmat Adiguna (24/8/14).



"Saya jadi percaya kalau tanah kering ini justru menjadi potensi lahan untuk menanam aneka sayuran yang tadinya saya pikir tidak bisa tumbuh di Sumba Timur ini," kata Heinrich penuh semangat.

Heinrich Dengi, yang berprofesi sebagai penyiar radio Max FM, kini memiliki siaran "Ayo Bertani Organik" bersama Rahmat setiap hari minggu selama dua jam. Siarannya menjadi sarana bertukar informasi bagi para petani di pelosok Sumba Timur.

Ia pun ikut bertani dan dengan bangga menyebutkan kata "organik" untuk berbagai jenis tanaman di kebun pekarangannya, menandakan bahwa tanamannya tidak tersentuh bahan kimia. Anggapan lahan kutukan bagi Heinrich mulai sirna.

Tulisan ini berusaha merekam jejak-jejak perubahan terkait upaya ketahanan pangan. Mengikuti simpul dan titik-titik perubahan yang sedang terjadi dan masih akan terus terjadi di tingkat individu, kelompok hingga desa dan akhirnya Kabupaten Sumba Timur.





Dang Alila, anggota Tapawallabadi menyiram tanaman (atas).

Kol di Desa Kalu, Kelurahan Prailiu, Waingapu (25/8/14).

Suasana di rumah dan stasiun radio Max FM di Desa Kalu, Kelurahan Prailiu, Waingapu (bawah).

Langkah Ketahanan Pangan Ala Desa Mbatakapidu

Jika kita mengunjungi Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka kesan pertama yang tertangkap adalah tandus dan gersang. Hamparan perbukitan yang pada musim kemarau panjang, berwarna cokelat keemasan, mendominasi sebagian besar wilayahnya.

Desa Mbatakapidu, desa seluas 3,2 kilometer ini, secara administratif memiliki lima dusun yaitu Kambara Waingapu, Kambara Maunjara, Kambara Laiborak, Kambara Tanalingu dan Kambara Wundut. Pada sensus 2013 lalu, tercatat penduduk desa ini yaitu 1.773 jiwa.

Di balik sepintas kesan tersebut, ternyata desa ini memiliki potensi air yang cukup melimpah. Tercatat setidaknya ada 19 mata air di desa ini dengan debit yang cukup besar untuk beberapa mata airnya, sehingga PDAM membuat pipa untuk menyalurkan air bersih ke Waingapu. Ada pula perusahaan air kemasan, PT Aquamore mendirikan pabriknya di desa ini sejak tahun 2003.

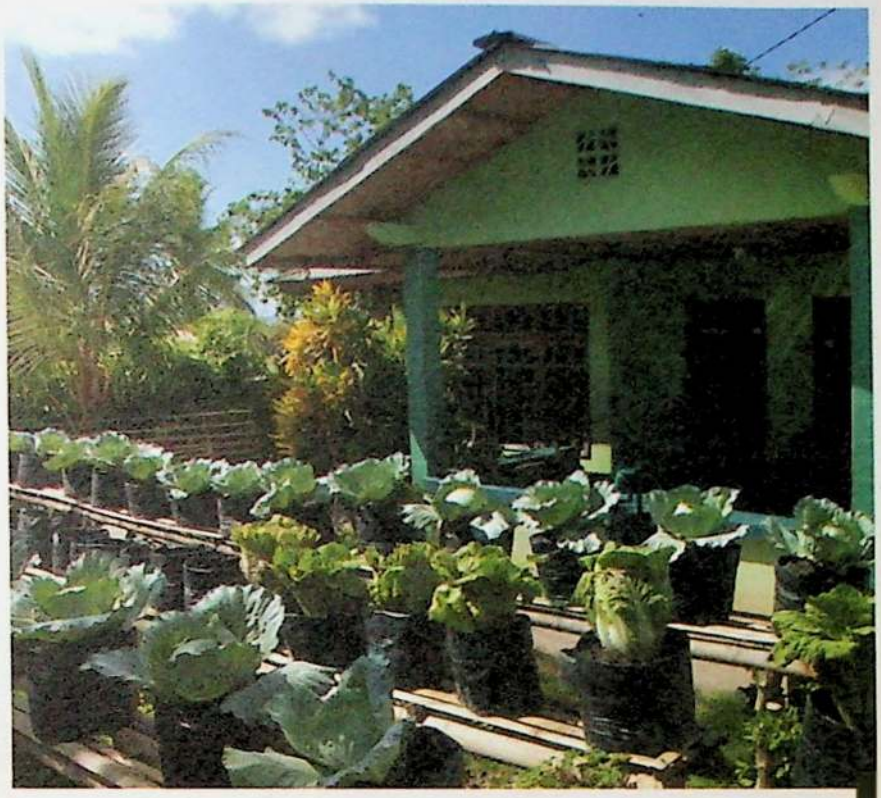




Tantangan mengolah lahan kering di Desa Mbatakapidu (22/8/14)

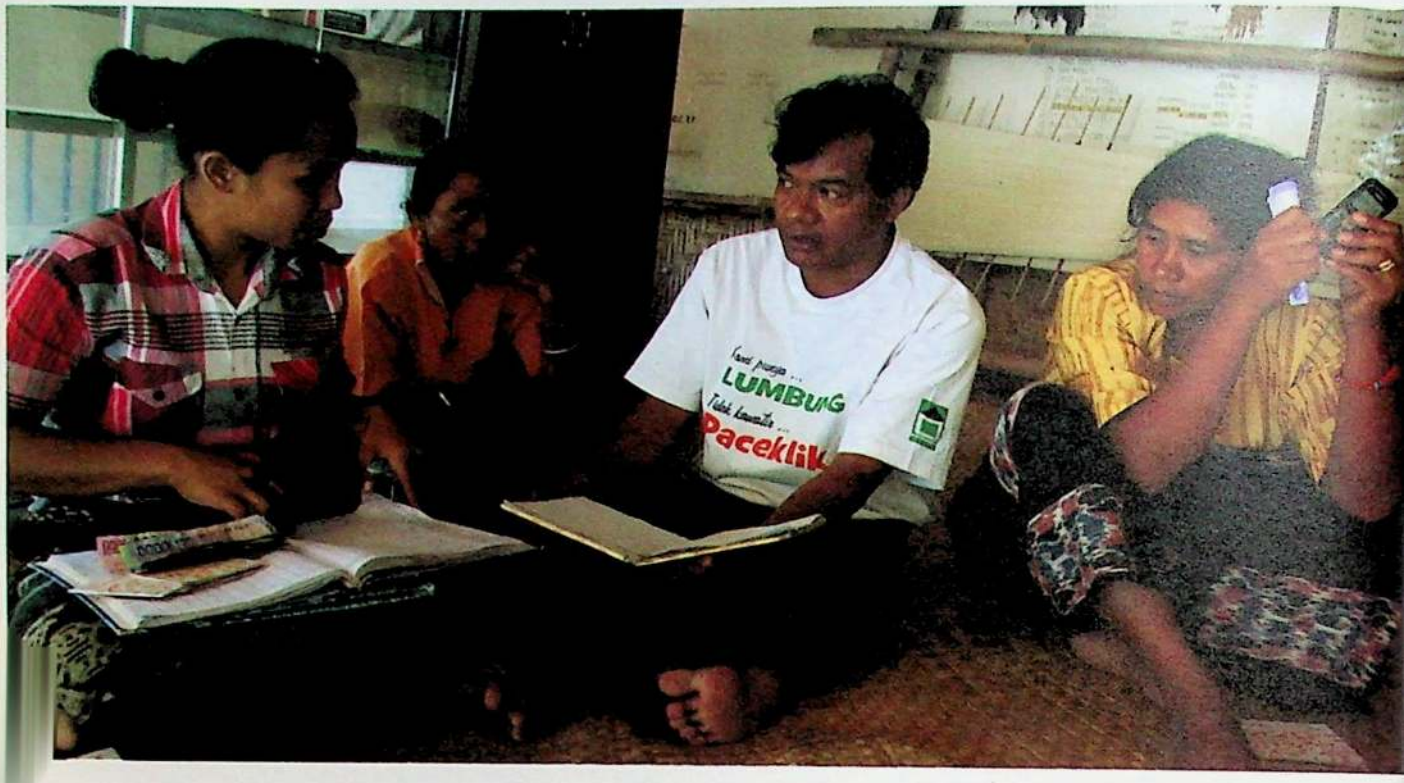
Om Jon menunjukkan salah satu sungai dan (bawah) saluran irigasi di Desa Mbatakapidu (22/8/14)





Pekarangan rumah milik Carolina Konda Ngguna di Desa Mbatakapidu (22/8/14).

Sejak menjadi model desa percontohan untuk Desa Mandiri Pangan Menuju Sejahtera (DMPDS) pada tahun 2009, Desa Mbatakapidu, semakin banyak dikunjungi. Jika dikaitkan dengan isu ketahanan pangan, maka para pegiat pangan dan pertanian di Sumba Timur menyebutkan Desa Mbatakapidu sebagai salah satu contoh model yang dianggap berhasil.



DAFTAR ANGGOTA
KELOMPOK KWT TAPA WALLA BADI
DESA MBATAKAPIDU
KECAMATAN KOTA WAINGAPU
WKPP MBATAKAPIDU

NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PENDIDIKAN
GUNA NGGUNA	WAIRINDING. 14-02-1971	KM.7	SLTP
EA NOTI	MBATAKAPIDU. 14-11-1980	KM.7	SMA
	TABUNDUNG. 16-11-1981	WAILIGANG	SLTP
RAMBU MEHA		WAILIGANG	SLTP
T KAHI TIMBA	KAMANGGIH. 31-09-1942	MATAWAI KARAHA	SD
U NJOLA		PALALEWA	SD
GI NALU		PALALEWA	SD



Vetronela Karirimurni , Om Jon dan Dang Alila di pertemuan kelompok Tapawallabadi. (22/8/14) dan daftar anggota kelompok (kiri).

Berbagai tanaman pangan di pekarangan (atas).

"Ada 3 kelompok perempuan dari 27 kelompok tani yang ada di Desa Mbatakapidu," kata Yohanes Pati Ndamung, pendamping masyarakat dari Yayasan Pahadang Manjoru. Sejak tahun 2010, Yohanes yang biasa dipanggil "Om Jon" ini aktif mendampingi kelompok tani di Desa Mbatakapidu.

Yayasan Pahadang Manjoru didirikan di Waingapu pada tahun 2001, sedangkan Om Jon bergabung pada tahun 2006. Sejak didirikan, yayasan ini bermitra dengan lembaga internasional seperti Veco, Unicef, lembaga nasional seperti KRKP dan aktif dalam program pemerintah kabupaten seperti program SMART di tingkat desa.

Minimal Tanam 10 Tanaman

Kegiatan kelompok ini beranekaragam. Yang utama adalah bertani dan menanam aneka tanaman pangan di pekarangan dan di ladang. Ada warga yang menanam padi, ada juga juga kelompok perempuan yang menanami pekarangannya dengan berbagai jenis tanaman pangan seperti cabe, kol, daun bawang, ubi, kangkung, tomat, pisang, kacang panjang, terong, talas dan lain sebagainya. Warga juga menanam aneka jenis kayu seperti mahoni, cendana, gaharu, injuwatu dan sengon.

"Dulunya kami tidak seperti ini. Desa ini sempat mengalami kelaparan sampai warganya pergi ke hutan untuk cari tanaman yang bisa dimakan seperti iwi," cerita Marlina Rambu Meha di pertemuan KWT Tapawallabadi di Desa Mbatakapidu (22/8/14). Kejadian itu menurutnya terjadi sekitar tahun 1997.

Kondisi ini berbeda sekarang. Warga mulai aktif menanam terutama sejak jaman kepala desa baru pada tahun 2009. "Ada surat edaran dari kepala desa agar kami menanam minimal 10 jenis tanaman pangan di rumah, tujuannya biar ada terus tanaman yang bisa dipanen," kata Marlina.

Dalam peraturan desa itu menyebutkan bahwa dalam lahan milik warga, setidaknya 25 are harus ditanami 10 jenis tanaman pangan. Warga desa mulai mengikuti anjuran itu dan menanami lahan miliknya dengan aneka tanaman pangan. Menurut Marlina, sebagian hasil panen ada yang dikonsumsi sendiri, dijual dan ada juga yang disimpan sebagai cadangan pangan.







Gerakan pangan yang terus didorong oleh kepala desa ini sejalan dengan gerakan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang dikenal dengan nama Hililuanya. Istilah itu adalah singkatan dari Hili (keladi atau talas), Luan (ubi/ singkong), Litang (Ubi gadung) dan Ganyu (Ganyong, tanaman lokal sejenis umbi).

Desa Mbatakapidu juga mengaktifkan kembali sistem lumbung pangan untuk membangun cadangan pangan di tingkat desa. Lumbung pangan ini ada di tingkat rumah tangga dan desa. Masyarakat Mbatakapidu mengenal sistem lumbung pohon, dengan mengikatkan sebagian jagung melingkar mengikuti batang pohon sebagai cadangan panen. Ketika persediaan jagung habis, baru jagung dari lumbung pohon ini pelan-pelan dimakan.

Mengikatkan jagung ke pohon adalah upaya tradisional untuk mencegah jagung dari kebusukan. Selain diikat di pohon, jagung, sorgum dan padi juga diikat di kayu di langit-langit rumah atau balai-balai tempat berkumpul.

Sorgum dan jagung yang diikatkan di tiang kayu bagian atap bangunan rumah (22/8/14).

Kerajinan kelompok PKK Desa Mbatakapidu (23/8/14) dan aneka olahan pangan (kanan).





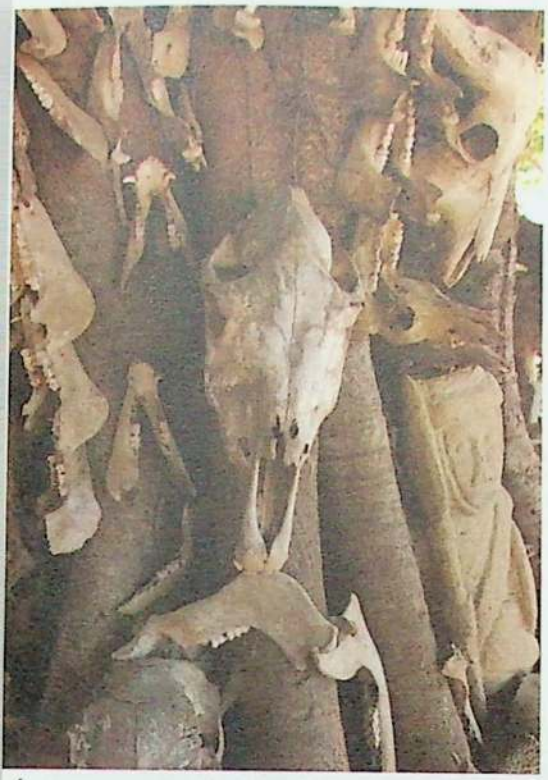
lengolah Aneka Pangan Lokal

Di beberapa kelompok perempuan, seperti Kelompok PKK Desa Mbatakapidu dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tapawallabadi, kelompok sudah mengolah tanaman pangan lokal menjadi aneka penganan seperti keripik, kue dan bolu. Kelompok perempuan juga rata-rata menggeluti usaha pembuatan tenun ikat dengan pewarna alami dan membuat aneka kerajinan dari anyaman pandan. Belum sampai taraf dijual seperti layaknya sebuah usaha, namun kelompok mulai menerima pesanan untuk acara-acara pertemuan, baik di desa, gereja ataupun jika ada acara pemerintah.

Selain itu kelompok juga memiliki tabungan kelompok, simpan pinjam, arisan dan tabungan pendidikan. Untuk tabungan pendidikan anak, kelompok bekerjasama dengan Bank NTT di mana uang yang ditabungkan tidak boleh diambil dalam jangka waktu yang disepakati. Dari catatan kelompok tabungan pendidikan PKK Desa Mbatakapidu, sejak tahun 2012 ada 136 anak yang memiliki tabungan pendidikan dengan total saldo per Agustus 2014 senilai Rp 86 juta.

Di Desa Mbatakapidu, ada beberapa bangunan yang relatif baru seperti gedung aula sederhana, posyandu, WC, kantor kepala desa, jalan aspal dan saluran irigasi. Berbagai prasarana ini dibangun dalam jangka waktu lima tahun terakhir ini.

"Kita masih akan terus berbenah, masih banyak pekerjaan harus diselesaikan. Saat ini saya senang karena warga sudah punya tanaman pangan di rumahnya, sudah bisa olah makanan dan punya tabungan pendidikan. Tapi ke depan, saya ingin agar bisa terus berkembang hingga ke dusun-dusun di pelosok desa," kata Jacob Tanda.





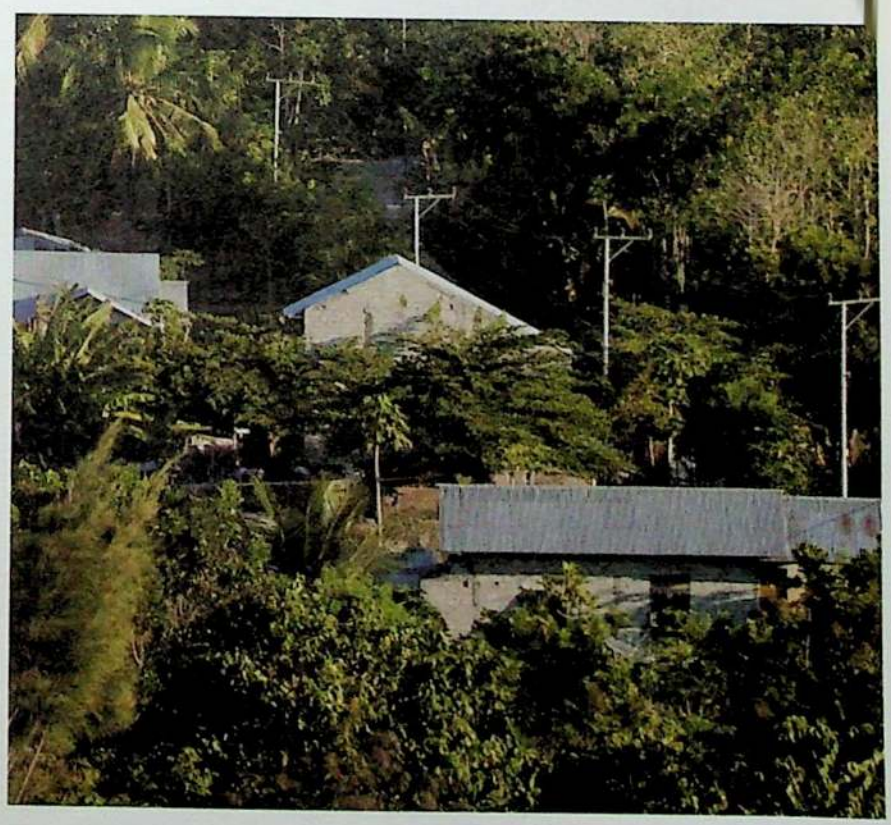
Motif tenun di Kampung Raja dan tulang hewan ternak bekas upacara penguburan adat di Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Waingapu (24/8/14).

Dang Alila, anggota Tapawallabadi menunjukkan cara menenun kain di Desa Mbatakpidu (kanan atas).

Permukiman di Desa Mbatakapidu. Kini suasana desa tampak lebih teduh daripada sebelumnya (23/8/14).

Irigasi yang dibangun Dinas PU Kabupaten Sumba Timur di Desa Mbatakapidu (bawah).





Srikandi Tapawallabadi

Umur kelompok wanita tani (KWT) Tapawallabadi sudah 14 tahun. Didirikan pada tanggal 1 Januari 2000, kelompok ini awalnya beranggotakan hanya empat orang, itu pun sulitnya bukan main.

Pada masa itu sulit bagi perempuan untuk aktif di luar rumah. Menurut Marlina Rambu Meha, urusan rumah tangga sangatlah menyita waktu. Apalagi semua pekerjaan masih dilakukan secara manual. Mengolah sorgum, salah satu tanaman lokal khas Sumba yang dulu menjadi salah satu pangan harian warga Sumba, sudah makan waktu seharian. Belum lagi jika suami tidak memberikan ijin.

Hal ini dibuktikan sendiri oleh Marlina ketika mendirikan kelompok. Ajakan demi ajakan kepada kaum perempuan tetangganya, seringkali berujung penolakan. Namun Rambu Marlina tidak cepat putus asa. Ia mengaku sangat bersyukur ketika Carolina Konda Ngguna akhirnya memutuskan bergabung.

"Beliau ini keterampilannya banyak, bisa tenun, bertani dan memasak mengolah bahan pangan. Ilmunya sangat berguna untuk kami, perempuan di kampung ini," kata Marlina (22/08/14) ketika pertemuan kelompok rutin di Mbatakapidu. Saat ini Carolina menjadi ketua kelompok Tapawallabadi.



Sebagian kelompok Tapawallabadi di Desa Mbatakapidu (22/8/14).







Sebenarnya sudah sejak tahun 1998 program dari luar masuk ke Sumba, atau khususnya Desa Mbatakapidu, Kecamatan Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Desa ini cukup 'kenyang'oleh berbagai program dan kegiatan. Namun layaknya sebuah perubahan yang kokoh, menjadi matang memerlukan waktu.

Sejalan waktu, Desa Mbatakapidu termasuk kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalamnya tersentuh program demi program. Marlina mencatat setidaknya ada beberapa nama yang masih melekat di benaknya.

Carolina Konda Ngguna menunjukkan cara membuat motif tenun ikat Sumba. Desa Mbatakapidu (kiri).

Marlina Rambu Meha.



Ada Yayasan Tananua, Access dan Yayasan Wahana Visi Indonesia, lalu ada Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerjasama dengan Yayasan Pahadang Manjaro (YPM) didukung oleh lembaga donor dari Belgia, Veco Indonesia pada tahun 2010-2013. Program yang diusung lembaga-lembaga ini bermacam-macam, dari mulai pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian dan pangan.

"Saya ini biar lulusan SD, tapi saya suka sekali belajar, jadi setiap ada kesempatan pelatihan dan peningkatan kapasitas, saya ikut," kata Marlina antusias.

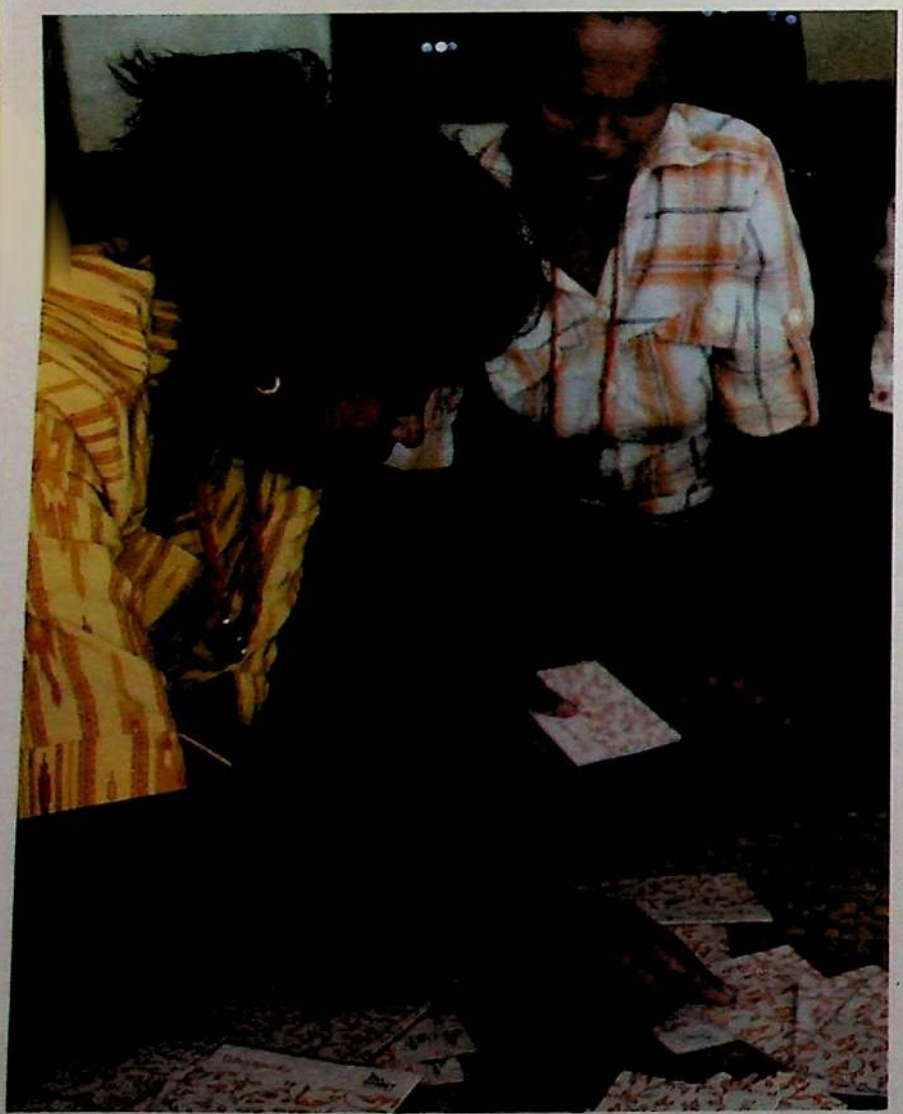
Kini anggota KWT sudah 24 orang. Yang membanggakan, kini rentang usia anggotanya bervariasi, dari usia 20 tahun hingga 65 tahun. Latar pendidikan dan pekerjaannya pun bermacam-macam. Dari lulusan SD hingga Sarjana Strata 1, dengan profesi ibu rumah tangga, petani hingga guru dan pegawai negeri.

"Anggota kelompok ini harus warga yang berdomisili di Des Mbatakapidu. Pengurusnya pun bergantian agar semua bisa belajar," kata Carolina.

Setiap bulan anggota melakukan pertemuan dua kali yaitu pada tanggal 7 dan 21. Dalam pertemuan, kegiatan yang dilakukan adalah membahas kegiatan rutin, evaluasi, hingga arisan dan setoran tabungan.

Pertemuan kelompok Tapawallabadi di Desa Mbatakapidu (22/8/14)





Arisan Sambung Tangan

Tabungan dan arisan "sambung tangan" adalah visi kelompok untuk menggagas tabungan pendidikan. Jumlahnya Rp 20,000/ orang. Namun anggota bisa juga menabung lebih. Hingga Agustus 2014, saldo KWT secara keseluruhan mencapai 60 juta.

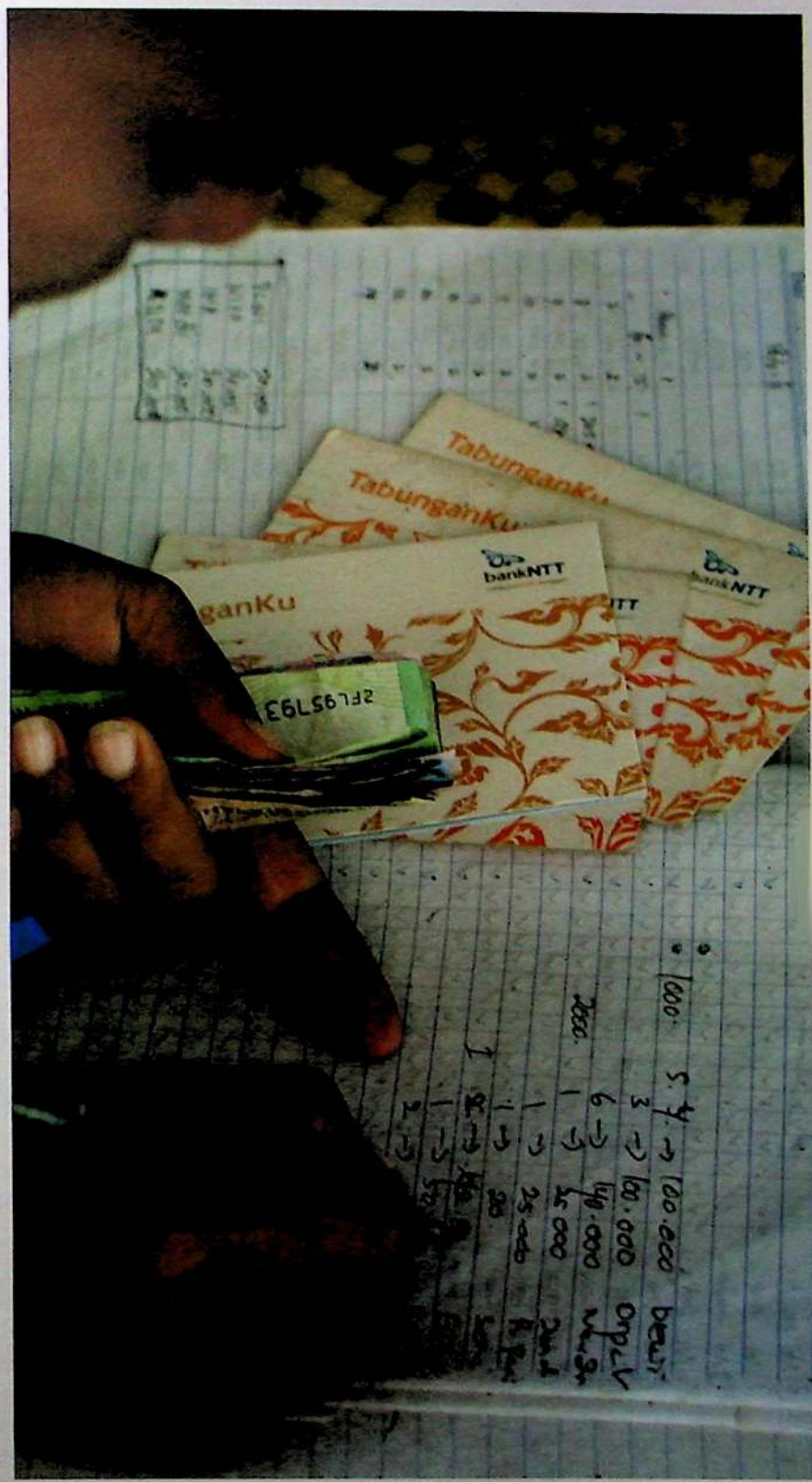
Uang disimpan di Bank NTT dan setiap anggota memiliki buku tabungan. Bank membuat perjanjian dengan anggota, bahwa untuk tabungan pendidikan, tabungan tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu.

Tidak semua menabung untuk anaknya, Mbitunjola misalnya, meski sudah berumur 60 tahun lebih, beliau menjadi anggota kelompok agar bisa menabung untuk cucunya. "Saya ingin cucu saya bisa kuliah, biar tidak seperti saya yang hanya tamat sekolah dasar," kata Mbitunjola dalam bahasa daerah yang diterjemahkan oleh Marlina. Mbitunjola terinspirasi tetangganya yang sudah bisa sekolahkan anaknya hingga lulus perguruan tinggi, karena rajin menabung.

Dang Alila dan Daembatri memeriksa buku tabungan anggota. Desa Mbatakapidu (22/8/14)

Dina Padulemba (29) berbeda. Ia mengaku masuk kelompok karena merasa terbantu ketika anaknya jatuh sakit. "Ketika anak saya sakit, saya sibuk cari pinjaman ke sana kemari, tapi tidak ada yang bisa pinjami. Akhirnya saya kontak Rambu Marlina, lalu dapat pinjaman dari kelompok," cerita Dina.

Rambu adalah panggilan kepada perempuan yang memiliki keturunan bangsawan.
Dina mendapat pinjaman dari kelompok hingga 2 juta dengan pengembalian yang cukup ringan. Tergerak oleh semangat gotong royong kelompok, akhirnya Dina bergabung pada Agustus 2014 dan mulai menjalani tugasnya sebagai bendahara kelompok.



Vetronela Karirimurni membantu mencatat tabungan anggota kelompok Tapawallabadi (atas dan kanan)



Carolina Konda Ngguna menunjukkan hasil tenun ikat buatannya. Desa Mbatakapidu (22/8/14)

enghasilan dari Ragam Kegiatan

Kegiatan KWT Tapawallabadi antara lain usaha pertanian pekarangan, peternakan, simpan pinjam dan tenun ikat.

Untuk tenun ikat, kelompok menggunakan bahan pewarna alami seperti dari tanaman Nila untuk warna biru gelap, atau Mengkudu untuk warna merah. Selain itu juga kelompok menggunakan pewarna buatan yang dibeli di pasar. Hasil tenun ikat ini dijual dengan harga mulai 350 ribu hingga 3 juta rupiah, tergantung kerumitan motif.

"Semakin menceritakan sejarah maka semakin mahal," kata Carolina sambil menunjukkan tenun ikat yang dibuatnya. Ia baru akan menjual kainnya itu jika ada pembeli yang berani membeli dengan harga Rp 3 juta. "Membuatnya sangat lama, lebih dari setahun. Lagipula kain ini menceritakan tentang sejarah dan hanya dipakai kalau ada acara adat," kata Carolina.

Untuk usaha pertanian, rata-rata anggota kelompok menanam aneka jenis tanaman sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, jagung, cabai dan lain sebagainya. Hal ini juga selaras dengan himbauan Kepala Desa Mbatakapidu yang mengharuskan setiap warga desa menanam setidaknya 10 jenis tanaman pangan di lahan miliknya.

Jika panen, sayuran ini dikonsumsi sendiri untuk keluarga, berbagi dengan tetangga dan sisanya baru dijual. Nurani (30) misalnya, memiliki 500 tanaman cabe. Dalam seminggu bisa dua kali panen. Sekali panen bervariasi antara 10-20 kilogram. Cabe dijual dengan harga Rp 25-35 ribu/ kilogram, tergantung dari harga saat itu. Sehingga Nurani bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp 250-350 ribu setiap panen.

"Pembelinya biasa datang ke rumah saya, jadi saya jarang antar sendiri ke pasar," kata Nurani yang mengaku tidak pernah menyangka dari hasil cabe di pekarangannya, ia bisa memperolah uang tambahan.

Sedangkan untuk sayur harganya bervariasi, misalnya harga sayur sawi per kilogramnya Rp 40.000 dan bayam bisa dijual dengan harga Rp 60.000/kg. Jika ada tetangga atau pedagang membeli sayur milik anggota kelompok, maka rata-rata sehari bisa mendapatkan Rp 50.000, tergantung jenis sayurnya.

Anggota kelompok juga belajar membuat aneka pangan dari bahan baku tanaman lokal yang ditanam sendiri di pekarangan atau di ladang. Carolina belajar membuat bolu gulung dari dua macam tepung, yaitu tepung ubi dan tepung jagung yang diolah dari hasil panennya.

Ketika disuguhkan pada tamu yang berkunjung, Carolina tidak menyangka saat itu juga ia menerima langsung 3 pesanan bolu. "Saya jual dengan harga Rp 75.000 untuk satu loyang bolu gulung. Mereka suka yang terbuat dari tepung ubi," kata Carolina sambil tertawa.

Keuletan KWT Tapawallabadi bergaung hingga jauh ke luar Pulau Sumba. Tahun 2013 lalu, Marlina dan Carolina mewakili kelompok pergi ke Jakarta untuk menerima penghargaan dari program "She Can" Tupperware. Selain itu mereka juga mendapatkan kesempatan untuk wawancara dengan Metro TV dalam program Kick Andy Show dan Kompas.

Marlina juga terpilih menjadi salah satu *Female Food Hero* (FFH) dalam kampanye Grow Oxfam 2013 - sebuah kampanye untuk memperbaiki sistem pangan yang tidak merata - bersama 6 perempuan pejuang pangan lainnya di Indonesia. Pemilihannya berdasarkan peran mereka dalam produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan masyarakat di tengah tantangan sosial, ekonomi, budaya dan kebijakan yang mereka hadapi (FFH, 2013).

Meskipun kelompok ini tampak kokoh dan semakin berkembang, sebagai pendiri dan kini menjalani fungsinya sebagai penasihat, Marlina tidak lepas dari kekhawatiran jika kelompok ini akan berhenti. "Tidak boleh mengandalkan kami yang tua-tua ini, nanti bagaimana mereka yang muda bisa belajar kalau yang tua terus memimpin kelompok?" tegasnya. Untuk itu Marlina mengharuskan setiap anggota kelompok menjadi pemimpin rapat bergantian di setiap pertemuan. Hari itu Dina yang menjadi giliran sebagai pemimpin pertemuan kelompok.

Keberadaan generasi muda dalam kelompok seperti Nurani, Yuliana Takaji, Nalu Ana, Dina, dan Apriyanti saat ini menggembirakan hati Marlina dan juga Carolina.

"Saya ingin lebih banyak anak muda bergabung di kelompok ini, mereka yang akan meneruskan kelompok ini dan memajukan desa ini bagi generasi setelah kami nanti," kata Marlina berharap.





Kebun sayur di Desa Mbatakapidu dan aneka penganan buatan kelompok. Foto: Diella Dachlan.

Visioner Pangan Mbatakapidu

Mendekati jalan masuk ke Kantor Kepala Desa Mbatakapidu, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, suasana terik dan gersang seketika berganti. Pohon Mahoni dan pohon kayu lainnya dengan rentang umur 5 hingga 14 tahun teduh menaungi jalan desa. Sawah menghampar lengkap dengan saluran irigasi berair jernih. Belum lagi aneka tanaman dalam pot berisi sayuran milik warga hingga bunga bougenville setinggi 3 meter di depan kantor yang kontras semarak dengan alam di sekelilingnya.

Kondisi nyaris ideal ini tidaklah tercipta dalam semalam. Namun, impian ini sudah terpatri sejak lama di benak Jacob Tanda, jauh sebelum ia pensiun dari jabatan di Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur. Ayahnya juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa Mbatakapidu. Jacob sendiri menjabat sebagai kepala desa mulai 2009.

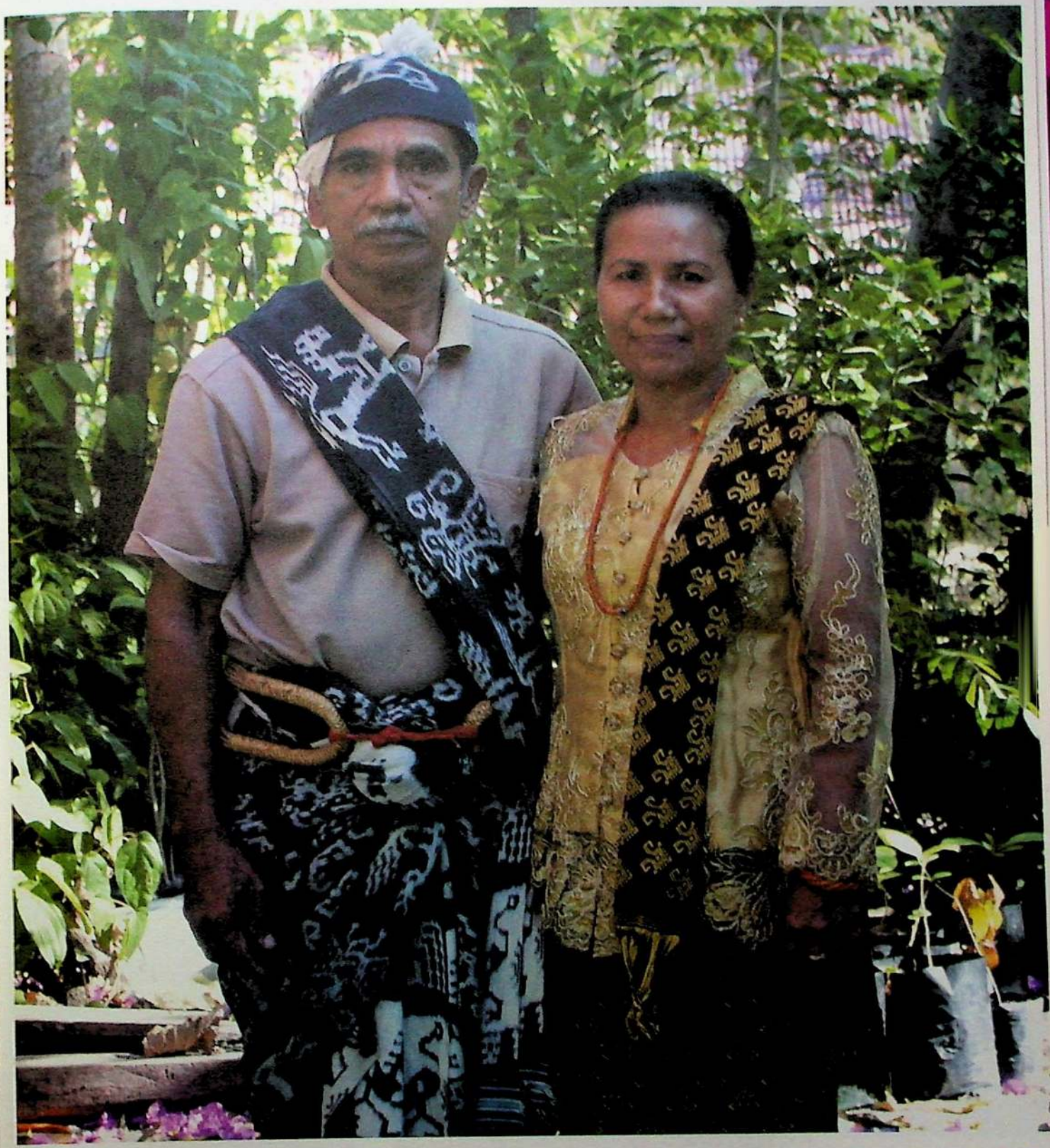
Jacob memperhatikan bahwa warganya terbiasa dengan pola santai, membiarkan ladangnya dan menggantungkan diri pada pangan seadanya. Jangankan bicara wirausaha untuk meningkatkan taraf hidup warganya, memenuhi kebutuhannya sendiri pun, warga terkesan menerima nasib apa adanya. Menyadari bahwa membangun daerahnya adalah membangun warganya dulu, Jacob memulai menapaki impiannya dengan cara sederhana: membangunkan warganya di pagi hari.

"Biasanya warga di sini jam 7 pagi pun belum bangun, jadi hari-hari awal saya, selalu berkeliling ke rumah warga, pura-pura batuk di depan rumah warga yang masih tertutup, agar mereka bangun," cerita Jacob. Menyadari kalau bicara saja tidaklah cukup untuk menggugah warganya, Jacob pun ikut bekerja di ladang di pagi hari. Bahkan ikut membantu warganya di ladang mereka.

Masalah pangan agaknya menghantui Jacob. Beliau sadar betul bahwa kekeringan dan kelaparan adalah dua hal yang menjadi tantangan desanya. Kelaparan, meskipun tidak ekstrem hingga tidak makan berhari-hari, namun Jacob prihatin karena bukannya berladang, warganya lebih sering masuk hutan dan mengambil hasil hutan, sementara ladangnya sendiri dibiarkan terbengkalai dan dimakan ternak.

Meskipun kering, Jacob menyadari bahwa daerahnya pun memiliki potensi sumber air dengan adanya 19 mata air yang sudah teridentifikasi. Kondisi ini sudah cukup ideal untuk modal bertani, dibanding daerah yang benar-benar kering.

Pasangan Jacob Tanda dan Margareth Takanjanji yang sudah menikah selama 34 tahun, tetap semangat memimpin perubahan di Desa Mbatakapidu (23/8/14)











Said Abdullah (kiri) atau Ayip bersama Jacob Tanda dan penghargaan yang pernah diterimanya (23/8/14).

Lumbung pangan Desa Mbatakapidu yang baru dibangun.

Keladi atau talas yang ditanam secara organik menjadi penganan favorit untuk sore hari.

Perencanaan Pangan ala Jacob

Hal yang dilakukan Jacob relatif sederhana. Ia mengharuskan warganya memiliki setidaknya 10 jenis tanaman pangan di lahan miliknya. Jenisnya terserah, asal bervariasi dari mulai sayuran, ubi, jagung, sorgum dan tanaman lainnya. Tujuannya bisa dipanen dalam waktu sebulan hingga tiga bulan.

Untuk memberikan hasil panen dalam jangka menengah, Jacob meminta warga untuk menanam setidaknya 50 tanaman pisang. Karena pisang dapat memberikan panen terus menerus dan nyaris tidak mengenal musim.

Untuk memberikan keuntungan investasi jangka panjang, Jacob meminta warganya untuk menanam minimal 1000 pohon kayu, yang bisa dipanen pada umur 10 hingga 15 tahun. Jenisnya macam-macam, bisa jati lokal, sengon, hingga mahoni. "Bayangkan jika satu pohon mahoni bisa dijual Rp 10 juta, dalam 15 tahun kita sudah bisa dapat 1 milyar bila memiliki 1000 pohon," kata Jacob.

Agar warga lebih semangat untuk mengerjakan ladangnya, Jacob membuat sistem gotong royong. Caranya adalah setiap hari, secara bergantian dari pagi hingga makan siang kelompok bekerja di ladang milik anggota kelompoknya. Sebagai insentif, Jacob menggunakan beras bersubsidi dari pemerintah atau raskin yang ia kumpulkan 1 kilogram untuk diberikan kepada warga yang bergotong royong.

Jacob bersama istrinya Margareth yang sudah dinikahinya sejak tahun 1980, juga menggagas pengembangan usaha kelompok. Yang dilakukan adalah membuat anyaman tikar menjadi berbagai bentuk kerajinan. Istrinya yang juga merupakan anggota PKK juga menggerakkan tabungan anggota kelompok untuk pendidikan, membudidayakan pertanian di pekarangan dan mengolah pangan lokal.

Penganan lokal yang diolah antara lain kripik dari pisang dan ubi, sate ubi sebagai camilan ringan dan membuat bolu dari bahan baku ubi.

"Sebelum 2009, belum ada tabungan pendidikan untuk anak, sekarang sudah ada 136 anak untuk tabungan di kelompok PKK saja, saldonya Rp 86,6 juta," kata Carolina Konda Ngguna, anggota kelompok Rinjung Pahamu pada pertemuan PKK di Desa Mbatakapidu. Namanya serupa dengan ketua KWT Tapawallabadi.



"Dulu kita hanya masak biasa saja, sekarang sudah ada pangan lokal, sudah bisa jadi makanan, kue dan penganan ringan seperti keripik. Memang belum jadi uang, tapi saya senang bisa buat aneka makanan pangan lokal," kata Carolina.

Upaya Jacob ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Beliau mendapatkan penghargaan dari televisi melalui MNC Award. Kisahnya diliput berbagai media, seperti Tempo dan Kompas.

Desa Mbatakapidu masih terus berbenah. Jacob tampaknya belum puas jika pencapaiannya berhenti hingga di tahap ini. Impian Jacob lainnya adalah lebih banyak warganya yang sejahtera, bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi. Untuk itu, dengan tegas, visinya dipampang pada pintu masuk kantornya "lahir miskin itu wajar, mati miskin itu tidak wajar". Hal ini untuk menunjukkan bahwa miskin bukanlah sebuah pilihan, ketika ada pilihan menjadi sejahtera.

Seorang anak membantu panen padi. Dan suasana panen di Desa Mbatakapidu (23/8/14).



Bagaimana Perubahan Terjadi?

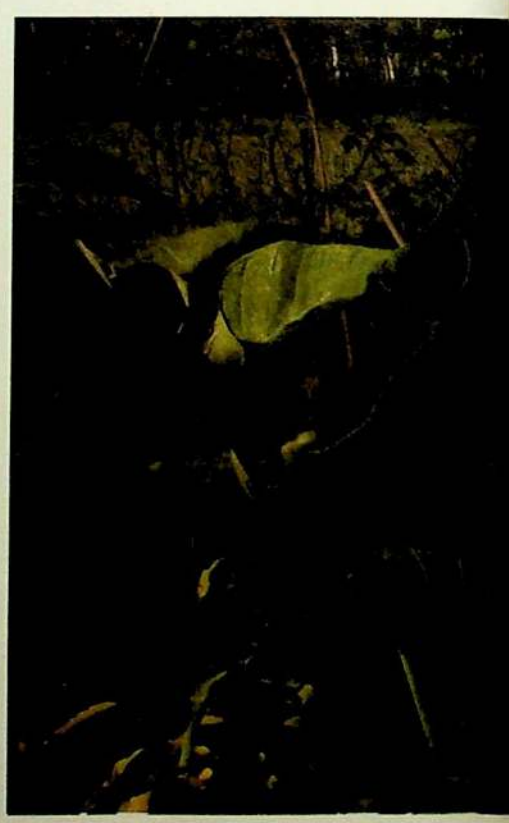
Dalam Konteks DMPDS

Desa Mbatakapidu sudah mengenal berbagai program sejak lama. Pada tahun 1998, desa ini masuk dalam daftar desa miskin sehingga masuk dalam daftar penerima bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Lalu berbagai program dari berbagai lembaga baik lokal, nasional dan internasional pernah menyentuh desa ini termasuk menjadikan desa ini sebagai desa model DMPDS - Desa Mandiri Pangan Menuju Sejahtera.

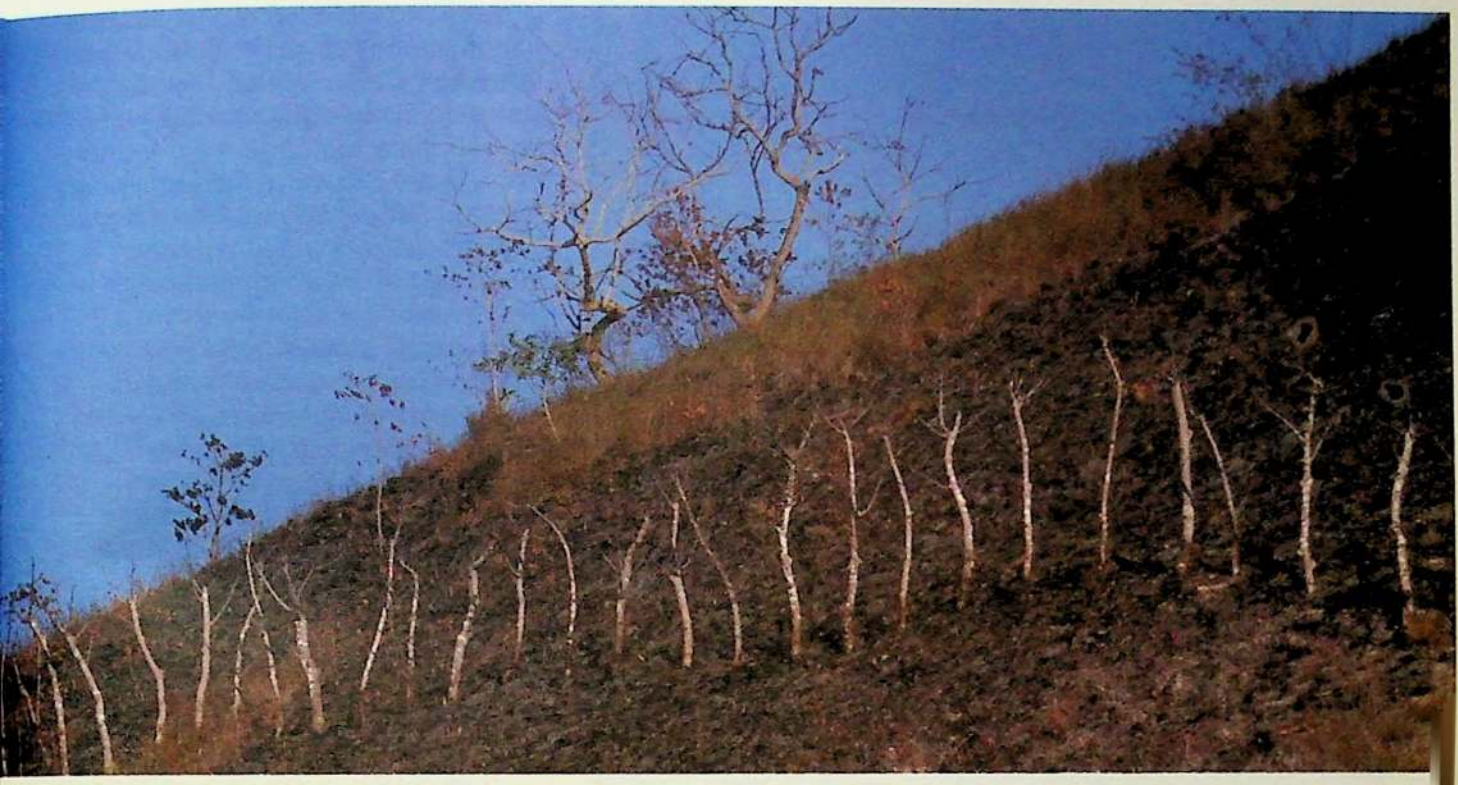
DMPDS sendiri adalah sebuah konsep dari hasil proses multi-pihak yang dirintis sejak tahun 2008. DMPDS memanfaatkan momentum Hari Pangan untuk menggagas NTT *Food Summit* 2008 yang melahirkan Deklarasi Maumere 2008 dan Rencana Aksi Bersama lalu merintis percontohan model DMPDS di tiga daerah, yaitu Desa Wureh, Kabupaten Flores Timur, Desa Femnasi, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Desa Mbatakapidu, Kabupaten Sumba Timur.

Pemilihan lokasi ini setelah melewati rangkaian panjang berdasarkan berbagai indikator dan persyaratan. Salah satu persyaratan utama adalah adanya dukungan kuat pemerintah daerah (kabupaten hingga desa) dan adanya *sharing* pembiayaan kegiatan antara pemerintah dan lembaga donor.



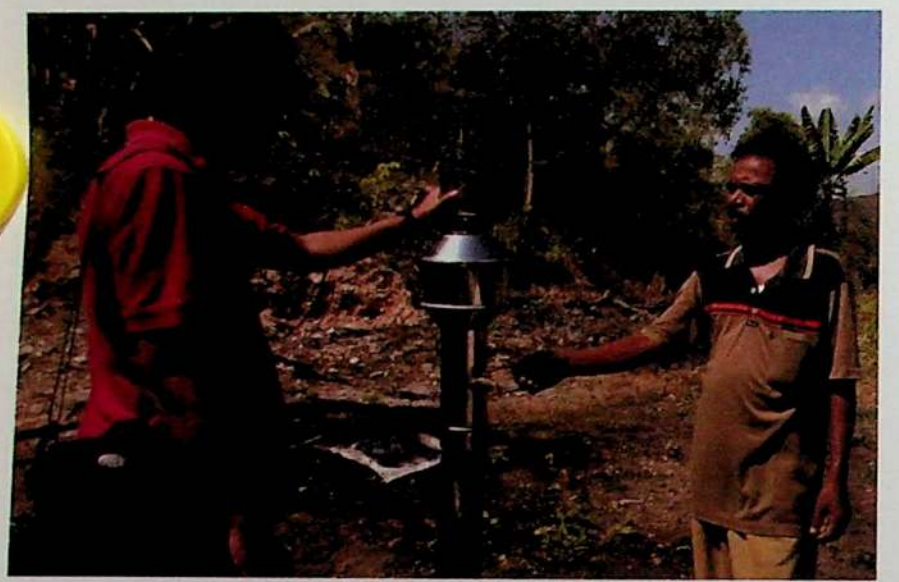


Suasana kering di Desa Mbatakapidu (atas) dan Ladang pangan (23/8/14).











Pemandangan umum di Sumba Timur, terutama pada musim kemarau.

Said Abdullah dan (kanan) dan Samuel N.Muni, Petugas Penyuluh Lapang BP3K yang menunjukkan alat pengukur hujan sederhana di kantor BP3K di Desa Mbatakapidu (23/8/14).

Cadangan panen untuk disimpan di balai-balai milik Carolina Konda Ngguna. Desa Mbatakapidu.

Di awal proses ini digagas, ada banyak lembaga yang terlibat, termasuk Oxfam melalui Aliansi Desa Sejahtera (ADS) yang terdiri dari 15 mitra lembaganya dengan Sekretariat Bersama Indonesia Bersatu (SBSI) sebagai koordinator. Keterlibatan Oxfam lebih pada dukungan advokasi melalui aliansi berproses di dalam merintis gagasan ini pada tahun 2009-2012, sebagai bagian dari kampanye *Economic Justice* atau Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia. Untuk pelaksanaan hingga ke tingkat desa, untuk Desa Mbatakapidu, programnya dilakukan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) bekerjasama dengan mitra lokal yaitu Yayasan Pahadang Manjaro (YPM) didukung oleh donor Veco Indonesia pada tahun 2011-2013.

Sebagaimana tahapan yang digagas di dalam konsep pelaksanaan desain DMPDS, ada tiga tahapan di dalam pelaksanaan model melalui tahapan persiapan, penumbuhan dan pengembangan, lalu tahap kemandirian. Keseluruhan tahapan program dilakukan dalam waktu tiga tahun. Dalam tahap persiapan pada tahun pertama kegiatan, dilakukan pembentukan dan penataan kelompok, membuat survey awal, sosialisasi program dan pembentukan kelembagaan di tingkat desa. Kelembagaan di tingkat desa ini antara lain Tim Pangan Desa (TPD) dan Lembaga Keuangan Desa (LKD). Selain itu disusun juga dokumen rencana pembangunan wilayah desa.

Untuk TPD, anggotanya terdiri dari perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, PKK dan perwakilan dari kepala keluarga miskin, sebanyak 7 orang. Tugasnya adalah membuat perencanaan hingga pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Sedangkan untuk LKD, anggotanya berasal dari perwakilan kelompok. Penetapannya dilakukan oleh Surat Keputusan Kepala Badan Bimas dan Ketahanan PanganKabupaten Sumba Timur. Anggota TPD dan LKD mendapatkan insentif sebesar Rp 100.000/bulannya dengan dana bersumber pada APBD (DMPDS, 2011).

Tahap penumbuhan dan pengembangan yang dilakukan pada tahun kedua lebih memfokuskan pada kegiatan pemberdayaan dan penguatan kelompok. Selain itu membangun sistem ketahanan pangan dan mengembangkan sarana dan prasarana.

Sedangkan pada tahap kemandirian atau tahapan akhir sebelum masa akhir program, tahapan ini fokus pada penguatan yang ada, sekaligus juga mengembangkan akses permodalan, produksi dan pemasaran.







Benih kacang hijau ditanam di polybag di pekarangan di Desa Mbatakapidu.

Menumbuhkan tanaman di lahan kering seperti di Sumba Timur adalah sebuah tantangan tersendiri

Lukas Renda Malo, Kepala BP3K Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur di kantornya di Desa Mbatakapidu (23/8/14)

Mobilisasi Sumber Daya

Model DMPDS yang dapat diamati di Desa Mbatakapidu merupakan hasil "patungan" berbagai pihak. Masing-masing pihak yang terlibat memberikan kontribusi sumber daya, sesuai dengan kesepakatan awal dan mengikuti pedoman di dalam Rencana Aksi Bersama pada tahap awal pembuatan desain program.

Ada pendanaan yang bersumber dari APBN melalui PNPM Mandiri untuk membuat prasarana kesehatan seperti posyandu dan toilet. Sumber pendanaan dari APBD diberikan melalui bantuan modal dari Pemerintah provinsi kepada kelompok dan keterlibatan berbagai SKPD Kabupaten Sumba Timur untuk program yang sesuai dengan tugas pokoknya. Keterlibatan SKPD di Desa Mbatakapidu antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan dan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan. Hal ini di luar program anggaran rutin dalam dana Anggaran Dasar Desa (ADD) yang berkisar antara Rp 50 juta hingga Rp 110 juta.

Untuk Desa Mbatakapidu, pendampingan teknis pertanian dan pendampingan masyarakat dilakukan bersama oleh staf Penyuluh Lapang dari BP3KP dan Yayasan Pahadang Manjoru. Kantor BP3KP yang berlokasi juga di Desa Mbatakapidu membuat staf PPL lebih mudah menjangkau desa ini.

Kontribusi lembaga donor dalam desain DMPDS ini diberikan langsung ke kelompok, atau melalui bentuk pendampingan yang bekerjasama dengan LSM Nasional dan lokal. Veco Indonesia misalnya, bekerjasama dengan KRKP dan YPM, programnya melibatkan tiga kelompok tani (Veco Indonesia, 2013).

Lalu ada program donor lainnya seperti UNICEF, ACCESS dan World Bank. Lembaga Nasional seperti Kehati ikut melakukan program pendampingan, terutama dalam menggunakan pewarna alami dari tumbuhan seperti Nila dan Mengkudu sebagai bahan pewarna untuk tenun ikat.

Masyarakat berkontribusi dalam bentuk simpanan untuk modal kelompok dan membantu dalam bentuk tenaga dan material dalam pembangunan fisik. Misalnya ketika membangun rumah dan kantor kepala desa, warga menyumbang kayu, hingga paku, atap seng dan uang.



Stan pameran pangan milik BP4K Kabupaten Sumba Timur di Waingapu (22/8/14)

Peran Para Agen Perubahan

Peran agen perubahan ini berada pada tingkatan yang berbeda. Di tingkat pemerintah kabupaten, ada komitmen kuat dari kepala daerah dan jajarannya untuk mengambil peran di dalam konteks DMPDS ini. Bupati Gidion Mbiliyora mengeluarkan Peraturan Bupati No 130 Tahun 2009 sebagai dukungan kebijakan terhadap diversifikasi pangan. Porsi program SKPD pun diarahkan untuk mendukung program DMPDS di Desa Mbatakapidu.

Hal ini menurut Gidion, juga karena desain DMPDS sesuai dan mendukung RPJM Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 2010-2015. Beberapa isu strategis dalam RPJM ini adalah pemenuhan pangan, kesehatan, peningkatan pertanian serta pembangunan pedesaan. Sektor pertanian memberikan kontribusi pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja, yaitu 66,37 persen atau sebanyak 102.725 penduduk usia di atas 15 tahun. (Data tahun 2008, RPJM Kabupaten Sumba Timur 2010-2015).

Peran fasilitator, baik dari LSM maupun dari BP3KP juga sangat penting di dalam desain program ini. Para fasilitator ini adalah 'garda depan' program, yang menjadi 'penerjemah' konteks program menjadi kegiatan bersama masyarakat dalam kegiatan sehari-harinya.

Yang sangat penting adalah kepemimpinan di tingkat masyarakat. Peran Kepala Desa Mbatakapidu selama lima tahun terakhir membawa perubahan yang cukup pesat di tingkat desa. Dalam konteks kepemimpinan formal dalam struktur pemerintah desa, kepala desa dapat membuat kebijakan untuk desa. Yang menarik adalah pernyataan beberapa warga Mbatakapidu ketika diwawancara, bahwa ketertarikan untuk ikut serta dalam kegiatan pertanian, karena kepala desa juga ikut bekerja bersama mereka di ladang dan memberi contoh praktik-praktik yang baik.

Di tingkat kelompok, terutama bagi kelompok perempuan, ada nama-nama seperti Marlina Rambu Meha, Carolina Tonda Ngguna yang dengan gigih mengajak perempuan untuk aktif dalam kelompok. Termasu mengajak kaum perempuan yang sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, seperti Dina Padulemba dan Apriyanti di KWT Tapawallabadi untuk aktif terlibat di kelompok dan mengambil peran sebagai pengurus. Hal ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa, mengingat dari sisi budaya, peran dan waktu perempuan Mbatakapidu dulunya lebih dominan untuk urusan rumah tangga semata.



Om Jon memeriksa bulir padi hasil panen di Desa Mbatakapidu (23/8/14). Ia sudah mendampingi di desa ini sejak tahun 2010

Berhasilkah Program DMPDS?

Untuk menjawabnya, tentu membutuhkan serangkaian evaluasi lebih rinci untuk membandingkan pelaksanaan model DMPDS di tiga lokasi yang berbeda.

Dalam desain DMPDS, keberhasilan program ditandai dengan berbagai indikator antara lain berkembangnya usaha ekonomi produktif, berfungsinya kelembagaan masyarakat desa, tersedia pangan yang cukup dan distribusi pangan yang memadai, konsumsi pangan yang beragam, bergizi dan aman, meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha pertanian dan non-pertanian serta berfungsinya peran lintas sektor.

Untuk konteks Mbatakapidu dalam pelaksanaan DMPDS, secara sepintas beberapa pemangku kepentingan yang ditemui mengatakan bahwa program ini dianggap berhasil. Meskipun untuk mendukung argumen ini membutuhkan studi dan dukungan data lebih rinci.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah memungkinkan untuk mereplikasi program ini di desa lainnya di Sumba Timur atau daerah lainnya? Tahapan apa yang diperlukan untuk memungkinkan adanya replikasi? Jika lebih ambisius lagi untuk menyebarkan perubahan positif seperti yang terjadi di Desa Mbatakapidu, pemerintah dan donor menggunakan istilah scaling-up program untuk memperbesar jumlah daerah sasaran program.

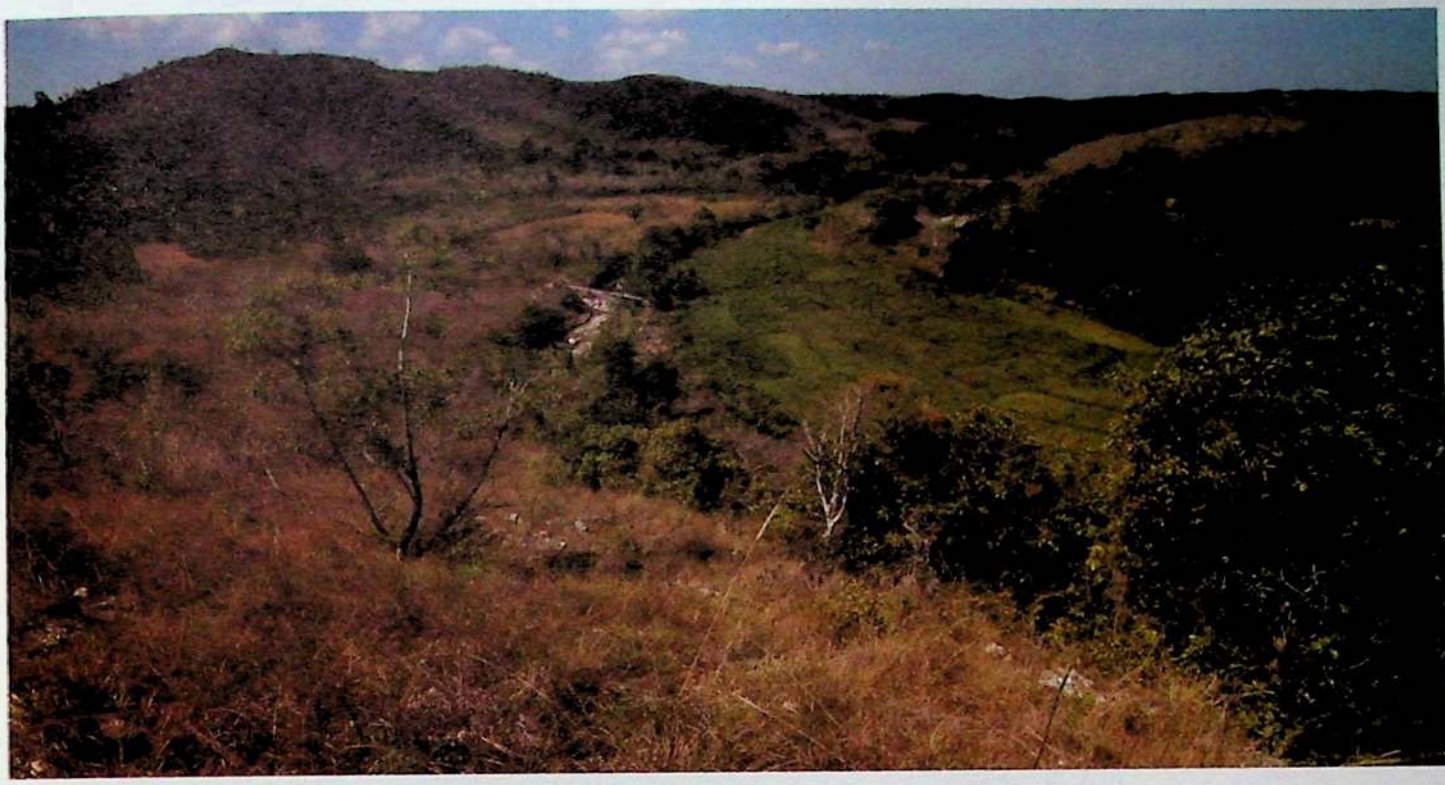
Namun, dalam konteks 'replikasi', apalagi '*scaling-up*', seringkali kita melupakan ada banyak faktor yang perlu dipikirkan, termasuk menyesuaikan program dengan daerah baru yang akan diterapkan, perencanaan bersama, komitmen dan kesepakatan serta pentahapan program dengan tujuan yang jelas.

Menurut para pemangku kepentingan dari pemerintah, LSM hingga masyarakat, kekuatan konsep DMPDS dalam penerapannya di Desa Mbatakapidu ini, jika disimpulkan secara ringkas ada pada faktor-faktor antara lain: (1) komitmen bersama (2) perencanaan, pembuatan konsep dan desain program (3) membuat panduan sebagai acuan bersama dan indikator (4) pembagian peran yang jelas dan koordinasi di setiap tingkatan (provinsi hingga desa) (5) mobilisasi sumber daya sesuai dengan kegiatan dan tujuan dalam program (6) pentahapan program, tujuan dan indikator (7) pembentukan lembaga pelaksana dan koordinasi di tingkat desa (8) tenaga pendamping dari daerah dan dari luar, dari lsm dan pemerintah. Hal ini untuk memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan pengetahuan. (8) adanya kepemimpinan kuat di berbagai tingkatan, baik dari pemerintah dan masyarakat sebagai agen perubahan.

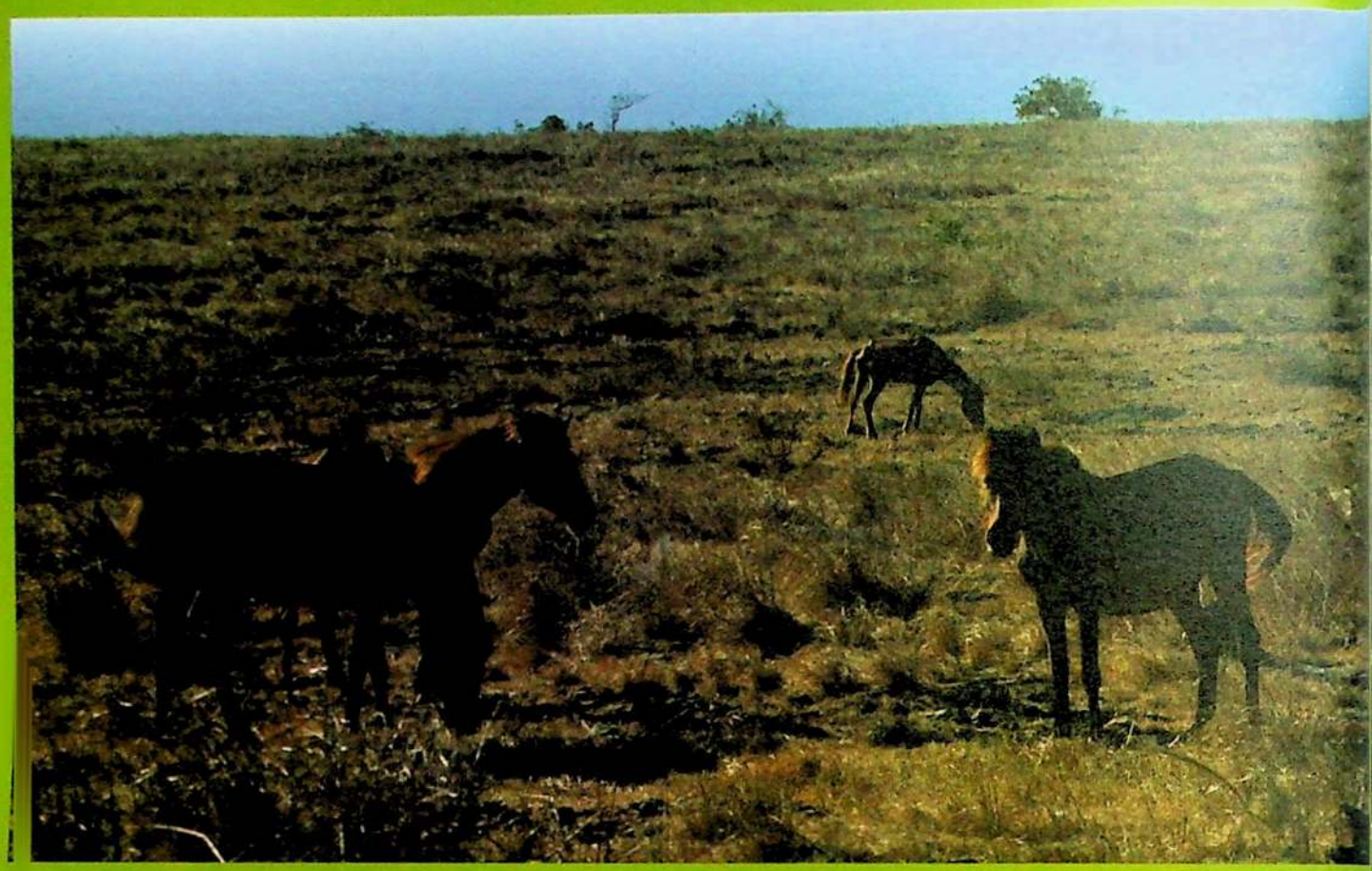


Lahan pangan milik warga Desa Mbtakapidu (kiri)

Kontras lahan kering dan sawah di Desa Mbatakapidu. Meskipun terkesan kering, desa ini memiliki 19 mata air dan menjadi suplai air utama bagi Waingapu (23/8/14)







Gabungan Kekuatan untuk Desa Sejahtera

Keterlibatan Aliansi Desa Sejahtera (ADS) adalah ikut menggagas NTT *Food Summit* hingga membuat konsep Desa Mandiri Pangan Sejahtera (DMPDS) pada periode 2009-2012.

ADS terdiri dari sekitar 15 lembaga mitra Oxfam, dibentuk untuk membantu kegiatan advokasi Keadilan Ekonomi Oxfam di Indonesia selama periode 2009-2012. Anggota aliansi menunjuk Sekretariat Bersama Indonesia Bersatu (SBIB) sebagai koordinator sekaligus sebagai sekretariat.



Kuda Sumba di savana Purukambera, Desa Ambapra, Waingapu (24/8/14).

Gabah hasil panen di Desa Mbatakapidu (22/8/14)

Isu Pangan sebagai Pemersatu Aliansi

Tejo Wahyu Jatmiko, koordinator SBIB dan ADS, menyebutkan alasan memilih NTT sebagai lokasi program advokasi adalah karena, "Dari pantauan lembaga-lembaga yang bekerja di NTT, ada semacam tren yang disebut sebagai 'arisan kelaparan' di provinsi NTT. Artinya, setiap tahun ada saja daerah di NTT yang terkena krisis pangan dan kelaparan, karenanya kami memiliki justifikasi kuat untuk melakukan advokasi di provinsi ini," kata Tejo di kantornya (8/8/14).

Isu pangan kemudian menjadi semacam isu pengikat bersama di antara anggota aliansi.
Agar lebih efektif, ADS memiliki tiga kelompok kerja. Untuk kelompok kerja isu pangan terdiri dari KRKP, Bina Desa, Kehati dan Solidaritas Perempuan. Koordinatornya adalah SBIB. Sedangkan untuk kelompok kerja isu sawit, terdiri dari Sawit Watch, Walhi, LBBI Kalimantan Barat, KPS Sumut dan Solidaritas Perempuan. Untuk isu ini koordinatornya adalah Sawit Watch. Untuk isu perikanan, terdiri dari Kiara, Bina Desa, JPKP, Jala Sumut dengan Kiara sebagai koordinatornya. Saat ini anggota ADS yang aktif ada sekitar tujuh lembaga, yaitu KRKP, Bina Desa, Kehati dan SBIB.

Setelah ADS melakukan advokasi kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Provinsi NTT yang berujung pada penyelenggaraan NTT *Food Summit* tahun 2008, Tejo mengaku terkejut sekaligus senang ketika Pemerintah Provinsi NTT melalui Badan Ketahanan Pangan menghubungi ADS ketika selesai acara.

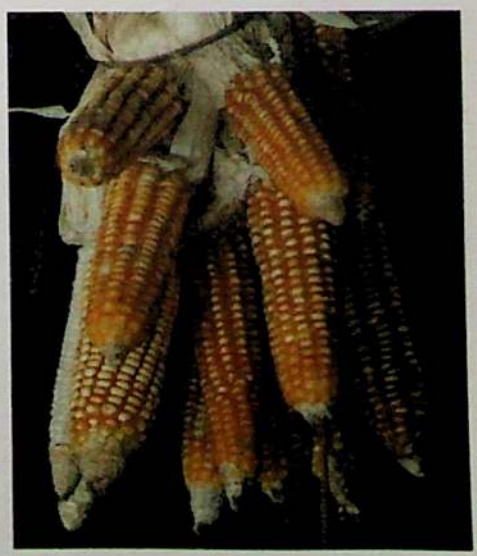
"Saat itu mereka meminta agar ada tindak lanjut dari NTT Food Summit dan deklarasi Maumere dalam bentuk yang lebih konkrit, yaitu program," cerita Tejo. Melalui berbagai pertemuan, akhirnya para pemangku kepentingan membuat konsep program DMPDS, termasuk membuat kriteria pemilihan lokasi, sumber daya, berbagi peran dan indikator keberhasilan program.

Oxfam melalui Program Keadilan Ekonomi terus mendukung kegiatan ADS ketika melakukan advokasi dan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi NTT dalam rangka mempersiapkan konsep DMPDS. Selain itu menurut Tejo, lembaga anggota ADS yang terlibat juga mengerahkan sumber daya, terutama ketika terjadi pergantian staf di Oxfam yang membuat proses administrasi berjalan lebih lambat, sedangkan kegiatan harus terus berjalan.

Irigasi yang baru dibangun di Desa Mbatakapidu. Sejak desa ini menjadi bagian dari DMPDS, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan lintas sektor ke daerah ini (23/8/14).



Hasil panen seperti jagung disimpan sebagai cadangan pangan dengan cara digantung untuk menghindari busuk.



Jejak Aliansi di Sumba Timur

Enam tahun telah berlalu sejak konsep DMPDS digagas dan digulirkan, menelusuri keterlibatan ADS pada tingkat kabupaten Sumba Timur, apalagi di tingkat desa seperti Mbatakapidu, tidaklah terlalu mudah.

Hal ini disebabkan karena antara lain ada jeda waktu sekitar enam tahun dari saat penggagasan ide hingga pembentukan konsep desain program pada tingkat propinsi. ADS yang merupakan gabungan dari 15 mitra Oxfam dan dalam konteks DMPDS, yang merupakan bagian dari advokasi Keadilan Ekonomi.

Hal lainnya adalah keterlibatan ADS berada pada level advokasi kebijakan di tingkat pemerintahan dan tingkat pemangku kepentingan yang ersama-sama menggagas program bersama, pi programnya memang tidak dirancang untuk ut terlibat dalam pelaksanaannya di tingkat desa, ebagai model percontohan DMPDS.

"Keterlibatan Oxfam melalui ADS pada NTT Food Summit 2009-2012 dalam bentuk penyelenggaraan lokakarya, seminar dan pameran. Keterlibatan ADS dan Oxfam lebih dikenal di tingkat propinsi, sedangkan di tingkat lapangan yang lebih dikenal adalah Veco Indonesia, KRKP dan YPM, karena ada di tingkat pelaksanaan program di desa," kata Said Abdullah, Manajer Jaringan dan Advokasi KRKP di Waingapu (21/8/14).

Menurut Ayip, panggilan akrab Said Abdullah, Oxfam bisa berperan lebih banyak ketika bisa ikut terlibat hingga pelaksanaannya di tingkat desa. Hal ini akan melengkapi advokasi dengan menggabungkannya dengan pelaksanaan program.

KRKP didirikan pada tahun 2000 dengan fokus program pada ketahanan dan kedaulatan pangan. KRKP merupakan bagian dari ADS. Namun, di dalam pelaksanaan model desa DMPDS di Desa Mbatakapidu, KRKP menjadi mitra Veco Indonesia dan YPM.

"Tanpa dukungan Oxfam melalui ADS, saya rasa agak sulit untuk mencapai yang kita capai sekarang dalam DMPDS," kata Tejo. Hal ini adalah karena Oxfam mendukung advokasi ADS dalam proses membuat konsep DMPDS dan serangkaian kegiatan advokasi.

Di Desa Mbatakapidu, Kepala Desa Jacob Tanda mengaku kurang mengenal Oxfam, "Tapi saya kenal Tejo dan ADS, mereka datang ke desa ini. Bulan Juni lalu malah mereka bawa orang-orang dari Buton Sulawesi ke Mbatakapidu, tinggal di desa dan buat kegiatan diskusi," kata Jacob.

Said Abdullah, Manajer Jaringan dan Advokasi KRKP, ketika bersama kelompok Tapawallabadi di Desa Mbatakpidu (22/8/14).





Pelaksanaan DMPDS di Desa Mbatakapidu

Target dari proyek DMPDS ini adalah keluarga petani baik laki-laki maupun perempuan. Penerima bantuan sebanyak 4.500 keluarga petani, di mana 450 diantaranya adalah perempuan.

Lokasi program DMPDS dilaksanakan di tiga desa, yaitu Desa Wureh, Kabupaten Flores Timur, Desa Femnasi, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Desa Mbatakapidu, Kabupaten Sumba Timur.

Kegiatan pada tahun 2011-2013 yaitu:

1. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok afinitas (sasaran), kelompok tani, KWT, lumbung, simpan pinjam, tim pangan desa;
2. Tinjauan dan penataan sistem pertanian yang adaptif perubahan iklim;
3. Pengembangan benih adaptif perubahan iklim;
4. Membangun platform advokasi dengan jaringan masyarakat sipil nasional;
5. Lobi dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten);
6. Lokakarya implementasi program DMPDS dan lokakarya program pengembangan desa;
7. Penyusunan rencana kegiatan tahunan kelompok sasaran;
8. Pengembangan kapasitas kelompok sasaran dalam pengembangan lumbung komunitas;
9. Riset aksi sistem budidaya tanaman pangan adaptif perubahan iklim; dan
10. Perayaan hari pangan sedunia.

Sumber: KRKP, 2013

KRKP dan YPM dengan dukungan Veco Indonesia mengusung program yang dinamakan Kedaulatan Pangan, Pengembangan Persediaan Pangan Masyarakat yang berkelanjutan, yang dilaksanakan pada periode 2011-2013. Program ini dirancang khusus untuk mendukung pelaksanaan program DMPDS di tingkat desa.

Di Desa Mbatakapidu, program ini melibatkan 150 penerima bantuan yang seluruhnya merupakan perempuan. Tujuannya untuk memperkuat kelembagaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat masyarakat, swasta dan pemerintah, baik desa maupun kabupaten. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah dan nasional yang mengarah kepada terciptanya lingkungan yang mendukung bagi kedaulatan pangan dan penguatan organisasi petani.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam program yaitu memfasilitasi dan melakukan penguatan serta peningkatan kapasitas untuk kelompok sasaran, mengaktifkan kembali lumbung (baik secara fisik maupun sistem lumbung pangan di tingkat rumah tangga dan desa), membangun advokasi dengan berjejaring dengan masyarakat sipil nasional serta membantu pelaksanaan hari pangan sedunia.

Menurut Ayip, tantangan dalam pelaksanaan program DMPDS ini antara lain terjadinya pergantian kepemimpinan, terutama di tingkat pemerintah daerah, sehingga membutuhkan waktu untuk memahami program DMPDS ini. Selain itu, Ayip mengkhawatirkan keberlanjutan kegiatan di tingkat pelaksanaan di desa dan kabupaten jika proyek ini berakhir.

Gabungan Kekuatan

Dari sisi pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Ir. Ida Bagus Puru Punia, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Sumba Timur di kediamanannya (23/8/14), branding dari masing-masing pemangku kepentingan dalam desain kolaborasi seperti DMPDS ini tidak lagi menjadi hal penting.

"Yang menjadikan kekuatan dan keunikan program model DMPDS ini adalah kolaborasi nyata LSM internasional dan nasional dengan pemerintah. Kita berbagi peran dan sumber daya untuk mencapai tujuan dengan menggabungkan kekuatan . Semua punya peran di dalamnya, sehingga bagi saya pribadi, nama dan bendera organisasi tidak lagi menjadi hal penting," tegas Ida Bagus. "Posisi LSM dan pemerintah ini ibarat penghela dan pendorong. Kalau hanya salah satu, kekuatan tidak lagi imbang untuk bergerak mencapai tujuan bersama."

Hal berikutnya, menurut Ida Bagus, yang harus dilakukan bersama adalah mendorong kedaulatan pangan, dan bukan lagi ketahanan pangan semata.

"Dalam kedaulatan pangan, ada pemberdayaan dan bukan hanya semata berusaha memenuhi kuota angka produksi saja atas nama untuk ketahanan pangan. Akibatnya, ketahanan pangan model ini berusaha dipenuhi oleh impor pangan dan bukannya berusaha untuk memenuhi pangan lokal dengan memberdayakan diri sendiri," kata Ida Bagus. Beliau mengakui, untuk mencapai kedaulatan pangan tentunya akan membutuhkan lebih banyak tenaga dan energi, dengan konsep yang baik dan sumber pendanaan yang cukup.





Selanjutnya Ida Bagus menekankan bahwa salah satu kekuatan LSM adalah di pendampingan masyarakat. Menurutnya kapasitas pemerintah di dalam pendampingan masyarakat belumlah memadai.

Jejaring dan jaringan adalah salah satu kekuatan model DMPDS. Hal ini dikatakan oleh Lukas Renda Malo, Kepala BP3K Kecamatan Kota Waingapu di kantornya (23/8/14).

"Tanpa model DMPDS ini, saya rasa tidak mungkin Desa Mbatakapidu bisa dikenal seperti sekarang. Dengan jaringan ini kita bisa saling tukar informasi, bekerjasama untuk tujuan yang sama," kata Lukas.

"Saya menilai positif model DMPDS ini, karena saya melihat ada penambahan luas lahan pertanian yang dikerjakan oleh masyarakat. Sebelum ini, masyarakat cenderung puas dengan apa yang ia miliki, dalam arti, kurang berusaha untuk memaksimalkan potensi lahan pertanian yang ada," Lukas menambahkan.

Lukas Renda Malodengan bangga menunjukkan pohon Buah Naga di pekarangan kantornya. Agar warga semangat, bersama stafnya Lukas memberi contoh dengan menanam lahan pekarangan kantor BP3K dengan aneka tanaman pangan.

Ir. Ida Bagus Puru Punia dari awal terlibat pembuatan konsep DMPDS tahun 2008-2009 ketika masih menjabat sebagai kepala dinas Badan Ketahanan Pangan

Dukungan Kebijakan

"Fokus kami dalam RPJM 2010-2015, antara lain Peningkatan ekonomi rumah tangga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan partisipasi masyarakat," kata Bupati Kabupaten Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, MSi, di rumah dinasnya di Waingapu (23/8/14).

Untuk memperkuat dukungan kebijakan pangan lokal, beliau mengeluarkan Peraturan Bupati No. 130 tahun 2009 yang mengatur tentang diversifikasi pangan lokal. Satu orang minimal memiliki 25 are yang ditanami aneka tanaman pangan lokal. Program Bupati lainnya adalah SMART yang merupakan singkatan dari Sejahtera, Mandiri, Adil, Relijius dan Terdepan, mengucurkan anggaran ke desa hingga Rp 250 juta.

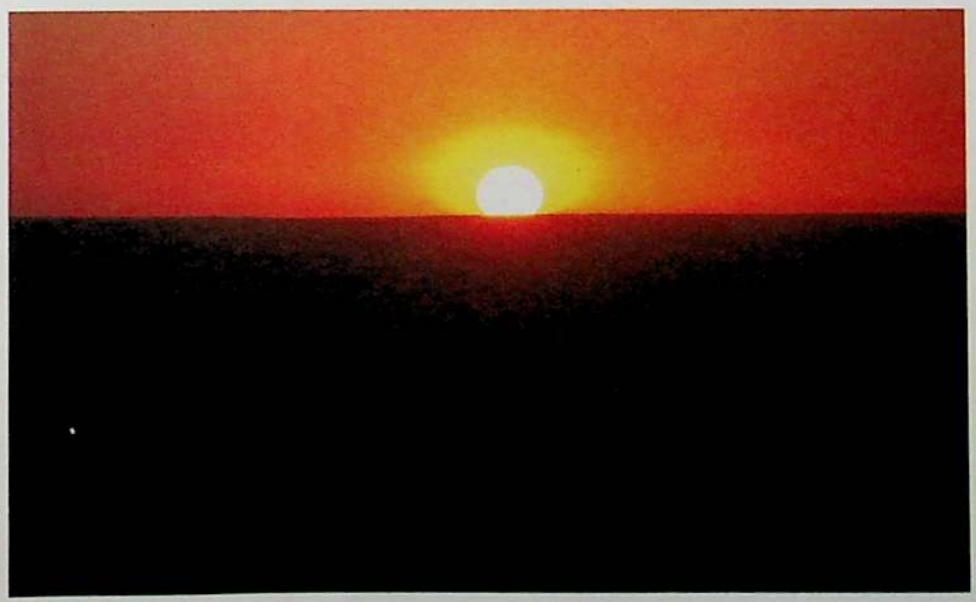
"Namun pelaksanaannya memang akan tergantung dari camat dan kepala desanya, sehingga hasilnya belum tentu sama di tiap daerah. Yang kami harapkan bahwa ada pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga dan desa. Bukan hanya padi, tapi juga jagung, umbi dan kacang-kacangan," kata Gidion menambahkan.



Sebagai bagian dari komitmennya mendukung pertanian dan pangan lokal, bupati menjadikan BP4KP di tingkat kabupaten dijadikan SKPD sendiri agar dapat memiliki anggaran untuk melaksanakan programnya. Di level kecamatan, turunannya adalah BP3K.

"Saya melihat peran penyuluh ini penting sekali dalam mengembangkan pertanian, sehingga perlu lebih intensif lagi dalam mendampingi petani untuk mengelola lahannya," kata Gidion.

Terkait dengan peran LSM di dalam pembangunan daerah, Gidion mengatakan "Kita selalu libatkan LSM dalam Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Jadi saya berharap acuan program LSM ini bisa mengacu dan diarahkan sesuai dengan Musrembang. Kekuatan LSM itu adalah di pemberdayaan dan pendampingan masyarakat, hal ini menjadi kontribusi positif bagi program pembangunan daerah," kata Gidion menegaskan kembali.



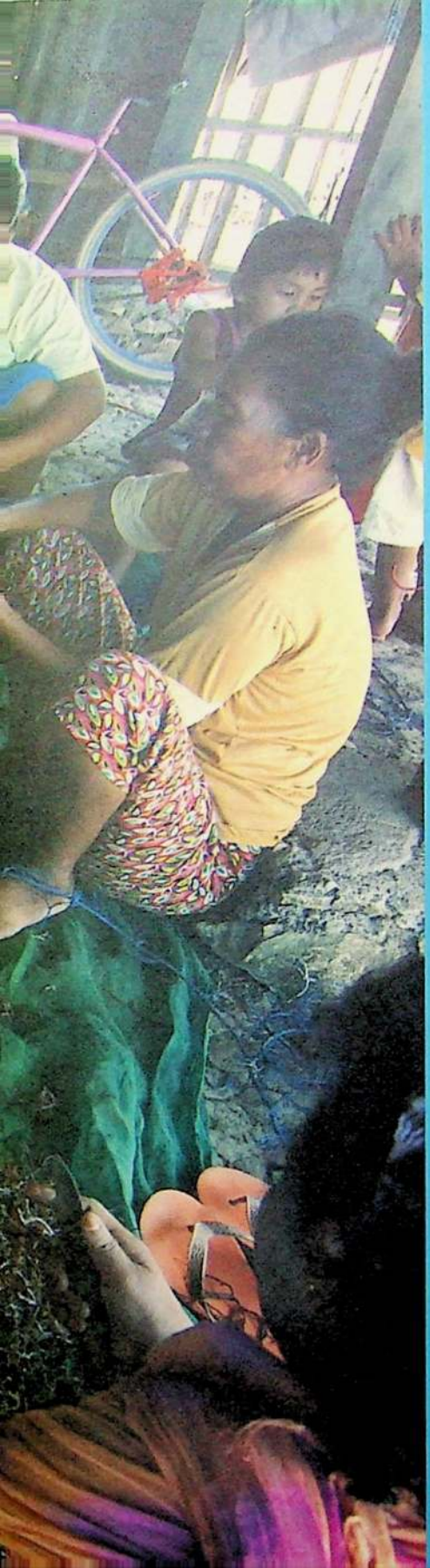
Bupati Kabupaten Sumba Timur, Drs. Gidion Mbiliyora, MSi, (23/8/14).

Senja di Pulau Sumba dari Desa Ambaprai (24/8/14)











MEMBENTANG HARAPAN
DI PESISIR BARAT PANGKAJENE KEPULAUAN

MEMBENTANG HARAPAN
DI PESISIR BARAT PANGKAJENE KEPULAUAN

DAFTAR ISI

Tentang Harapan di Pesisir	56
Sekilas Tentang Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Kabupaten Seratus Pulau	58
Tentang Program RCL	60
“Selamat Datang di Kebun Organik Kami”	62
Aksi Kelompok Pita Aksi	66
Sukri: “Organik Membuat Kreatif”	76
Membentang Harapan dari Rumput Laut dan Jaring	80
Jika Oxfam Selesai di Kampung Kami	86
Potensi Pengembangan Usaha Pesisir Pangkep	92

MEMBENTANG HARAPAN
DI PESISIR BARAT PANGKAJENE KEPULAUAN

DAFTAR ISI

Tentang Harapan di Pesisir	56
Sekilas Tentang Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Kabupaten Seratus Pulau	58
Tentang Program RCL	60
“Selamat Datang di Kebun Organik Kami”	62
Aksi Kelompok Pita Aksi	66
Sukri: “Organik Membuat Kreatif”	76
Membentang Harapan dari Rumput Laut dan Jaring	80
Jika Oxfam Selesai di Kampung Kami	86
Potensi Pengembangan Usaha Pesisir Pangkep	92

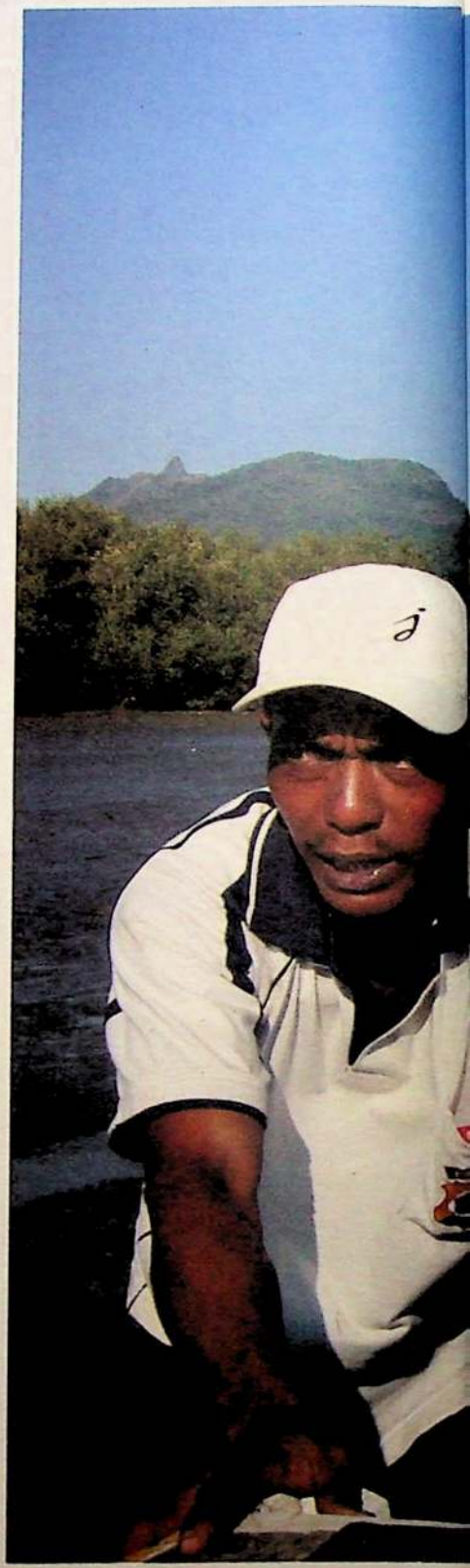
Tentang Harapan di Pesisir

Bicara tentang pesisir laut, maka kita disodorkan dua macam data: data fantastis dan data yang membuat miris.

Data fantastis mengidentifikasi potensi sumber kekayaan laut Indonesia. Jika diterjemahkan dalam angka ekonomi, hal ini akan menjadi sekian milyar atau malah trilyun rupiah. Potensi ini belumlah sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan dengan baik. Sedangkan data yang membuat miris adalah data tentang kehidupan masyarakat pesisir yang identik dengan jeratan kemiskinan dan jauh dari sejahtera. Sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan penghidupannya dari laut. Kehidupannya pun seperti layaknya pasang surut air laut. Jika musim sedang tak bersahabat, maka ikan tak kunjung didapat. Budidaya perikanan tambak pun tak luput dari berbagai jeratan masalah.

Di tengah dera kemirisan, selalu ada harapan.

Simpul-simpul pengurai perubahan telah ditunjukkan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang hidup di pesisir barat Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Lewat pekarangan, membangkitkan kembali lahan tidur selama puluhan tahun hingga menempuh gelombang untuk menanam dan membentangkan bibit rumput laut. Kegigihan memang diperlukan untuk membuat perubahan. Cerita mereka menerbitkan harapan...



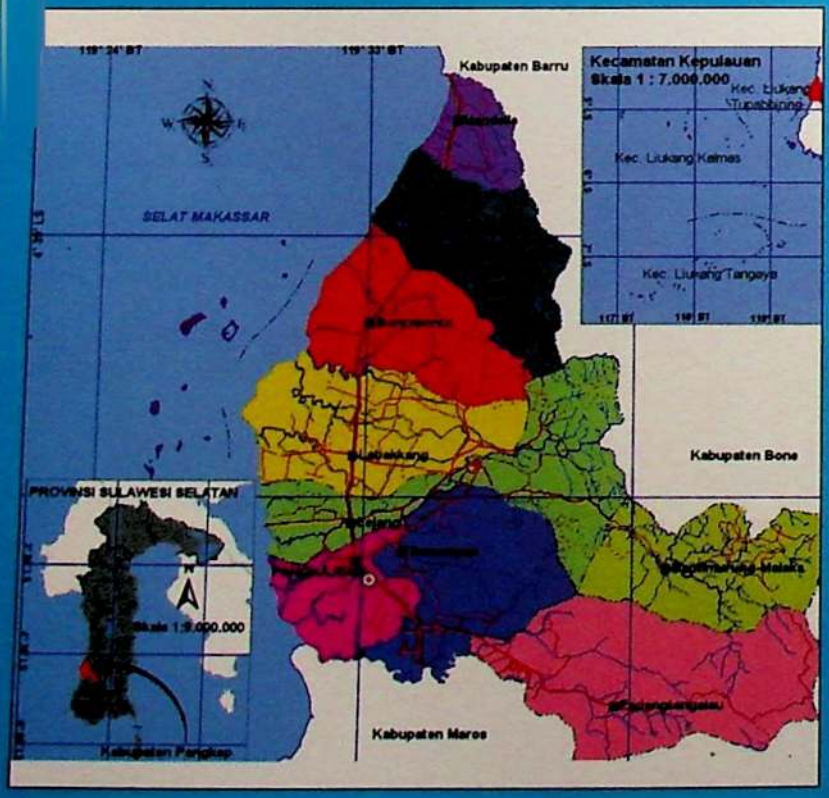


Sekilas Tentang Kabupaten Pangkajene Kepulauan: Kabupaten Seratus Pulau

Kabupaten Pangkajene Kepulauan atau yang sering disingkat menjadi Pangkep ini adalah salah satu dari 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, Kabupaten Pangkep ini unik, ibarat miniaturnya Indonesia.

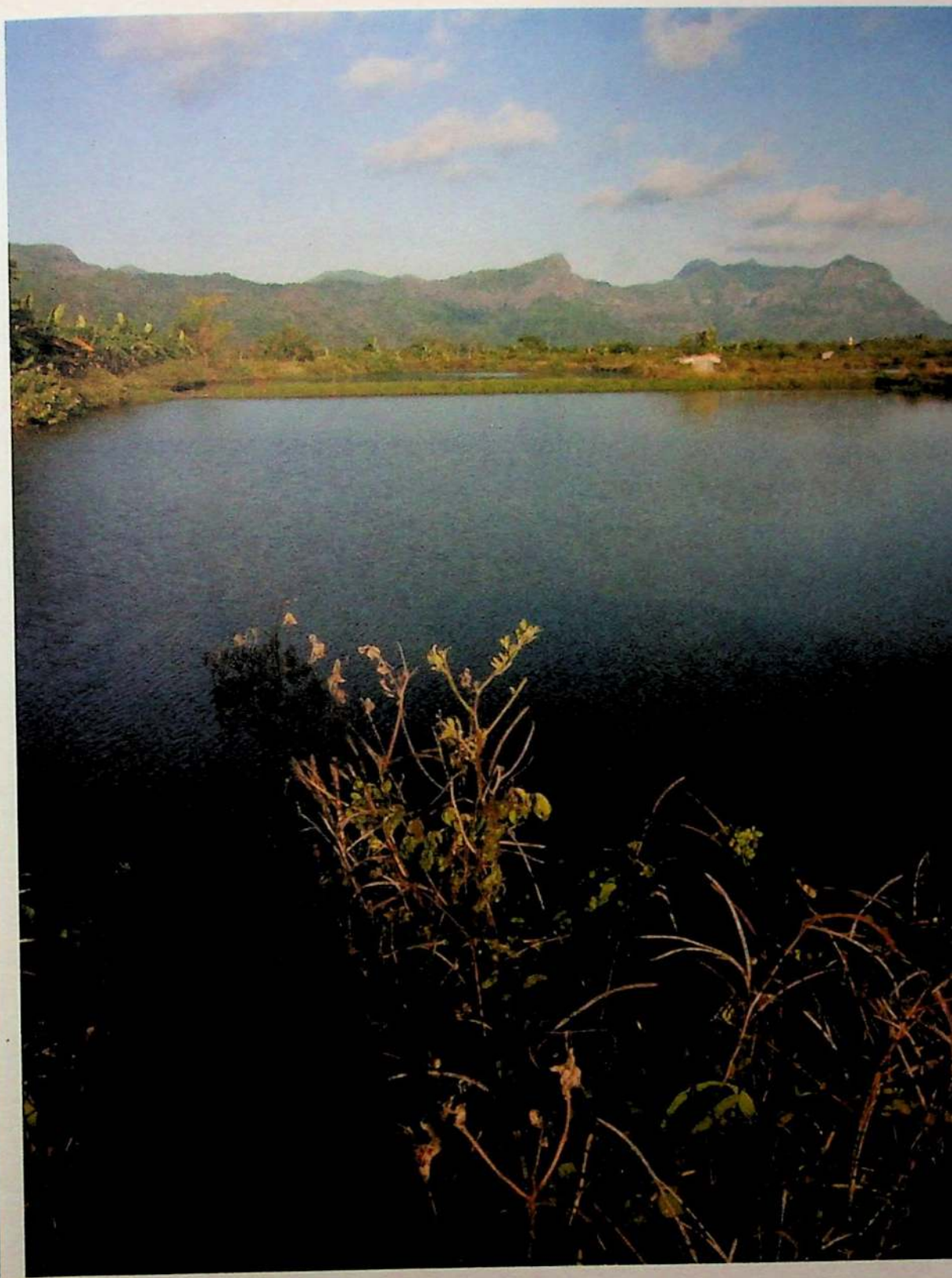


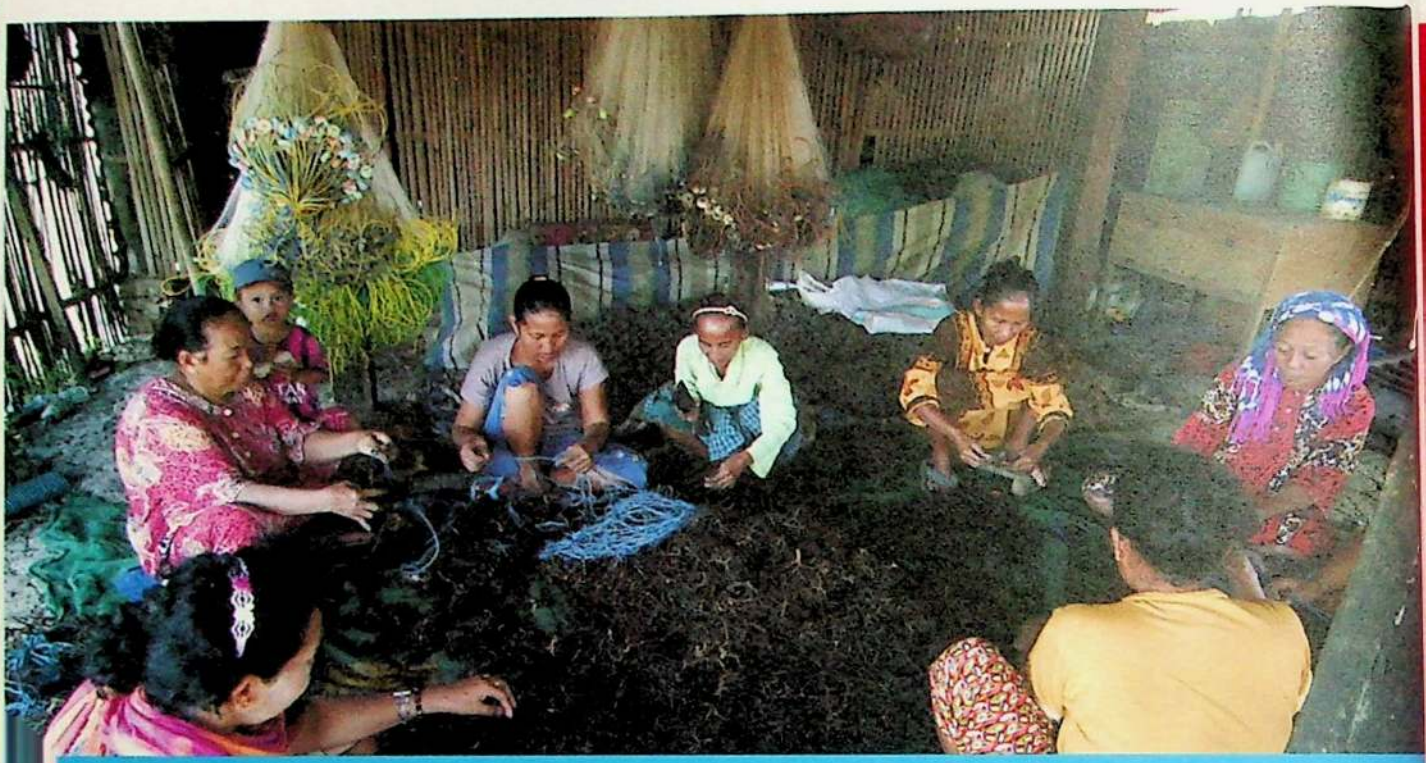
Ada total 117 pulau kecil membentuk gugusan yang termasuk wilayah administrasi Kabupaten Pangkep. Sebanyak 70 pulau sudah berpenghuni, sedangkan sisanya masih kosong. *(Sumber peta: Fakultas MIPA, Universitas Hasanudin)*



Total jumlah penduduk pada tahun 2012 yaitu 325.239 jiwa. (Bappeda, 2012)

Dari 13 kecamatan, empat kecamatannya berada di wilayah perairan kepulauan. Kecamatan daratan di kabupaten ini yaitu, Kecamatan Pangkajene, Bungoro, Labakkang, Ma'rang, Segeri, Mandalle, Minasatene, Balocci, dan Tondong Tallasa. Sedangkan kecamatan yang masuk dalam wilayah kepulauan adalah, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Liukang Tupabbiring Utara, Liukang kalmas, dan Liukang Tangaya. Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep 2011 menyebutkan bahwa luas laut Kabupaten Pangkep yaitu 11.464,44 Km dengan luas pulau kecil 35.150 ha dan garis pantai 250 Km. Sedangkan dari hasil pendataan, luas terumbu karang yaitu 36.000 hektar.





Tentang Program RCL

Sejak Februari 2010, Oxfam di Indonesia melaksanakan Program Pesisir atau *Restoring Coastal Livelihood* (RCL) di Sulawesi Selatan. Program ini dirancang oleh Oxfam Canada, diimplementasikan oleh Oxfam Great Britain bersama dua mitra lokal, yaitu Yayasan Konservasi Laut dan Mangrove Action Project.

Program yang berlangsung hingga bulan Agustus 2015 ini fokus pada upaya pengembangan daerah pesisir. Berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam program RCL ini antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi usaha yang mendorong kewirausahaan dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Selain itu program bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal yang responsif gender.

Program RCL, antara lain, melakukan restorasi atas 400 hektar kawasan mangrove, termasuk 1.600 hektar kawasan pasang surut untuk menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Selain itu program juga mengembangkan ekonomi melalui berbagai kegiatan usaha pertanian dan perikanan, melakukan penguatan proses pengambilan keputusan lokal dan melakukan program pengembangan kapasitas.

Program ini melibatkan 74 kelompok dengan 1.318 penerima bantuan langsung dari 13 kecamatan di empat kabupaten pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Maros, Barru, Takalar dan Pangkajene. Dalam pelaksanaan Program RCL, selain bekerja sama dengan mitra lokal, Oxfam juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah seperti BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

(Sumber: Restoring Coastal Livelihood, www.rcl.or.id)

Program

Restoring Coastal Livelihood (RCL)

di Sulawesi Selatan

Februari 2010 - Februari 2015

4
kabupaten

13
kecamatan

36
desa

61
dusun

74
kelompok

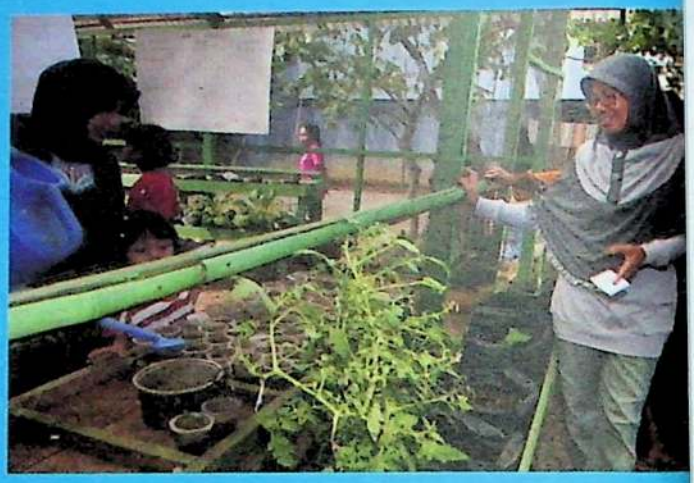
1359
penerima bantuan langsung



Lokasi Program RCL di Sulawesi Selatan

Sumber: Data RCL

Selamat Datang di Kebun Organik Kami





"Selamat datang di kebun organik kami," kata Suruga (42). Sambil tersenyum lebar, ia memimpin langkah kami memasuki areal kebun milik kelompok Talaswati. Suruga adalah anggota kelompok Talaswati, Dusun Kasuarang, Desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangep, salah satu kelompok dampingan program RCL. Hari itu (19/8/14) Suruga dan 12 anggota kelompok lainnya menunjukkan kebun kelompok yang terletak di pinggir jalan desa.

"Dulu, kalau mau makan sayur, kami harus keluarkan uang. Sekarang bisa makan sayur gratis, tinggal petik di pekarangan rumah atau ke kebun kelompok," kata Suruga. Kebun berukuran sekitar 20x50 meter ini ditanami aneka tanaman. Ada kangkung, sawi, kacang panjang, terong dan kacang. Tak ketinggalan pula pisang dan pepaya.

Semua tanaman ditanam secara organik dengan pupuk yang dibuat sendiri oleh anggota kelompok atau mengambil dari kelompok lain di desa tetangga. "Bedanya sayuran yang ditanam secara organik, adalah rasanya lebih manis dan lebih tahan lama jika disimpan, dibanding dengan yang menggunakan pupuk kimia," kata Suruga berpromosi.

Talaswati adalah salah satu kelompok dampingan Oxfam dan *Mangrove Action Project* (MAP) yang terbentuk pada tahun 2011. Nama Talaswati dipilih karena di dusun ini banyak tanaman talas. Sedangkan akhiran - wati untuk menunjukkan bahwa 23 anggota kelompok ini adalah perempuan.

"Meskipun kami sudah memiliki kebun di masing-masing rumah, tapi hampir setiap hari ada saja anggota kelompok datang ke kebun, untuk menyiram, merawat tanaman atau panen," kata Nurjaya, ketua kelompok Talaswati.
Di kebun milik kelompok kini juga sekarang sudah mengembangkan benih sendiri. Hari itu (19/8/14) tampak deretan bekas kemasan air mineral ukuran 250 ml berisi kacang hijau yang baru tumbuh. "Anggota kelompok yang perlu benih juga bisa datang dan ambil di sini," kata Nurjaya.

Kelompok Talaswati kini memiliki kolam lele di kebun kelompok. "Kami masih taraf coba-coba untuk beternak lele. Kolamnya kami buat dengan terpal dan bambu. Untuk pakan, kami berikan sayuran atau sisa makanan, jadi masih organik," kata Nurjaya.

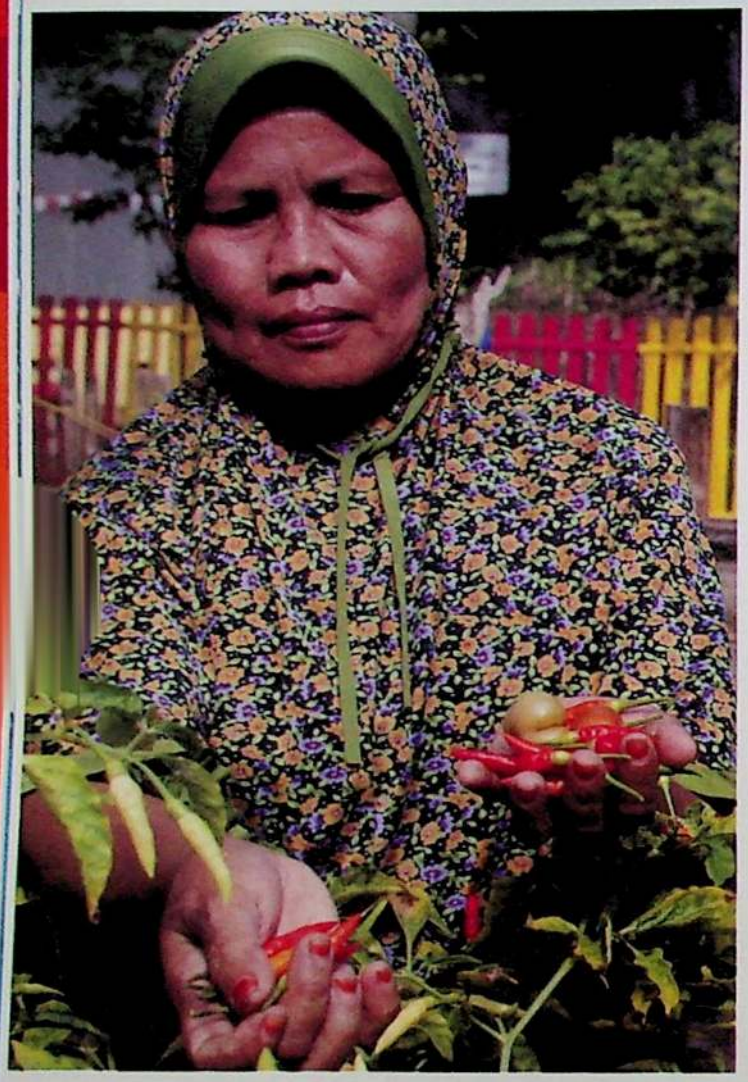
Suruga menunjukkan rumah bibit kelompok Talaswati (atas). Sebagian anggota kelompok Talaswati berfoto di kebun kelompok di Desa Tamangapa (19/8/14).



Menurut Suruga, sejak bertanam organik, dirinya tidak lagi "asal semprot" jika ada hama seperti ulat. "Hama itu ada musimnya. Untuk membasminya, saya menggunakan pestisida hayati buatan sendiri, atau dibiarkan saja sampai hamanya pergi sendiri," kata Suruga yang mempelajari membuat pestisida hayati dari sekolah lapang.



Cabe dan tomat hasil kebun kelompok(atas). Kolam lele milik kelompok Talaswati, Desa Tamangapa (19/8/14)





Produksi, Akses dan Pemasaran

Suruga mengatakan hasil panen sayur organik ini untuk dikonsumsi sendiri atau bersama kelompok dan tetangga, sebagian lagi baru dijual.

"Biasa kami jual ke Pa'gandeng atau tukang sayur keliling. Ada juga yang datang mengambil sayur untuk dijual ke pasar Bonco-Bonco, sekitar 4 kilometer dari desa," kata Suruga.

"Kalau ada tamu datang ke kelompok biasanya juga suka beli," kata Suruga sambil menawarkan sayur ke Fatma Hutagalung, staf Oxfam. Promosinya berhasil. Penawarannya bersambut dengan pembelian. Sehingga dalam 15 menit berikutnya anggota kelompok Talaswati sibuk memanen aneka sayuran. "Sebagai bonus, kami kasih pepaya organik super manis," kata Suruga sambil memasukkan dua buah pepaya ke dalam kantong plastik.

Panen sayuran di kelompok bervariasi dari jenis dan harganya. Misalnya sawi sekali panen bisa mendapat 5 kilogram dan dijual dengan harga Rp 8.000/kilogram. Sedangkan kangkung biasa dijual per ikat dangan harga Rp 1.500. Kalau dijual dengan ukuran kilogram, maka harganya sekitar Rp 5.000/kg. Untuk kacang panjang, harganya Rp 1.000 per ikat.

Kelompok Talaswati bersama kelompok lain seperti kelompok Pita Aksi di Dusun Kampung Baru, pernah memasok sayur organik ke swalayan Gelael di Kota Makassar. Akses ini didapat melalui peran Forum Pelaku Tani Organik (FPTO), forum petani dari berbagai kelompok alumni sekolah lapang RCL.

Sylvia Sjam, dosen Pertanian di Universitas Hasanudin, Makassar yang juga aktif dalam usaha sayuran organik Asyta, juga membantu kelompok dalam mendapatkan akses pemasaran.

Nawiah, anggota Kelompok Talaswati. Desa Tamangapa (18/8/14)

Rohani dan Siti Nursiah memetik cabai organik milik kelompok untuk dijual (bawah).

Soni Kusnito, fasilitator RCL, mengatakan bahwa bersama kelompok dan FPTO, ia berusaha terus membuka jalur-jalur pemasaran untuk produk kelompok seperti sayur organik dan pupuk kompos. Ada tantangan untuk menyeimbangkan antara produksi, kebutuhan dan akses transportasi. Kadang produksinya berlebih tapi tidak terserap, atau sebaliknya ada permintaan tapi produksinya yang belum memenuhi. Selain itu, lokasi dari kebun ke pasar cukup jauh sehingga biaya transportasi menjadi cukup mahal.

Penjualan sayur ke *Pa'gandeng* yang langsung datang ke kelompok, adalah salah satu alternatif pemasaran terbaik saat ini. Namun masalahnya adalah jumlah yang dibeli pun masih terbatas. Pembelian sayur di desa belumlah setinggi pembelian di pasar atau swalayan di kota. Sebaliknya, akses ke pasar dan swalayan di kota yang jauh dan mahal belumlah sebanding dengan biaya produksi. Pemasaran dan produksi adalah hal yang terus menjadi pemikiran dan dikembangkan fasilitator bersama kelompok.

Soni mengatakan bahwa untuk jalur pemasaran lainnya, mereka sedang menjajaki kerjasama dengan salah satu restoran di Kabupaten Pangkep "Pihak restoran sudah konfirmasi kalau mereka butuh sayuran seperti kangkung dan sawi, kebutuhannya sekitar 10 kilogram. Nanti kita diskusikan dengan kelompok untuk teknisnya," kata Soni sambil menunjukkan pesan singkat dari restoran di telepon genggamnya (19/8/14).

Anggota Talaswati lainnya, Nawiah (45) mengatakan dirinya senang bergabung dengan kelompok ini.

"Kalau dulu kegiatan kami di sini hanya fokus urus rumah tangga, paling sekali-kali bantu bikin jaring dan beternak bebek. Kalau kumpul pun hanya ngobrol-ngobrol dengan tetangga. Sekarang kami punya kegiatan kebun di rumah dan kebun kelompok. Setiap bisa hari makan sayur dan tidak perlu beli, malah bisa menjual," katanya senang.





Penjualan sayur organik hasil penen kelompok di Desa Tamangapa (atas).

Hasri, Pa'gandeng yang sering membeli hasil panen kelompok di Desa Pitusunggu dan Desa Tamangapa (18/8/14)

Aksi Kelompok Pita Aksi

Bercocok tanam bukanlah hal baru bagi Sitti Rahmah, warga Dusun Kampung Baru, Desa Pitusunggu.
Sitti Rahmah dan 24 anggota kelompok Pita Aksi tinggal sekitar 1 kilometer dari lokasi kelompok Talaswati di Dusun Kasuruang. Kelompok Pita Aksi yang merupakan singkatan dari "Pitu Sunggu Beraksi" ini sudah terbentuk lebih dulu, yaitu sejak akhir tahun 2010.

"Sejak ikut sekolah lapang Oxfam dan MAP, saya tidak lagi pakai bahan-bahan kimia untuk bertani. Semuanya pakai bahan alami yang dibuat sendiri. Kami sudah bisa bikin pupuk kompos dan MOL atau mikroorganisme lokal sendiri," kata Sitti Rahmah, ketua kelompok Pita Aksi.
Bahan-bahan untuk membuat kompos berasal dari campuran jerami, batang pisang dan kotoran sapi. Sedangkan untuk MOL, menggunakan campuran air rendaman beras dan air kelapa yang dicampur dengan ragi dan sisa buah-buahan seperti pisang dan mangga. Lalu campuran ini didiamkan sekitar 15 hingga 45 hari di dalam gentong sebelum diaduk dengan kompos. Campuran MOL dapat juga langsung disiramkan di lahan tanam.

"Pupuk organik ini bisa kita jual dengan harga Rp 1.500/kg, tapi kalau untuk anggota harganya lebih murah yaitu Rp 1.000. Kalau hanya sedikit boleh langsung ambil saja," kata Sairah anggota kelompok Pita Aksi.

elompok Pita Aksi menunjukkan cara mengolah pupuk kompos, Desa Pitusunggu (18/8/14).

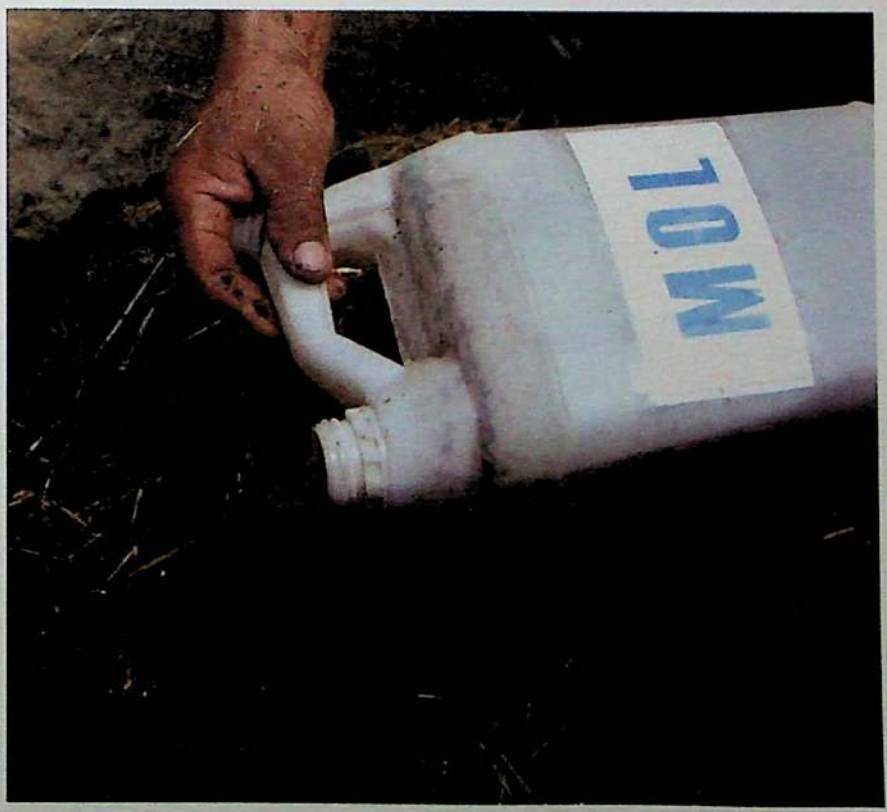


Alat pengolahan atau alat pencacah bahan pembuat kompos bantuan dari Program RCL ditempatkan di rumah Sitti Rahmah sebagai ketua kelompok. Hampir setiap hari ada saja anggota kelompok lainnya datang ke rumah Sitti Rahmah untuk mengambil pupuk, mengolah bahan baku pupuk kompos atau sekedar mengambil benih dan berbincang-bincang.

Rata-rata anggota kelompok memiliki sawah dan tambak, sehingga anggota kelompok juga menggunakan pupuk kompos organik ini untuk sawah. Seperti Muhamad Arif, suami Sitti Rahmah yang memiliki setengah hektar sawah dan tambak bandeng.

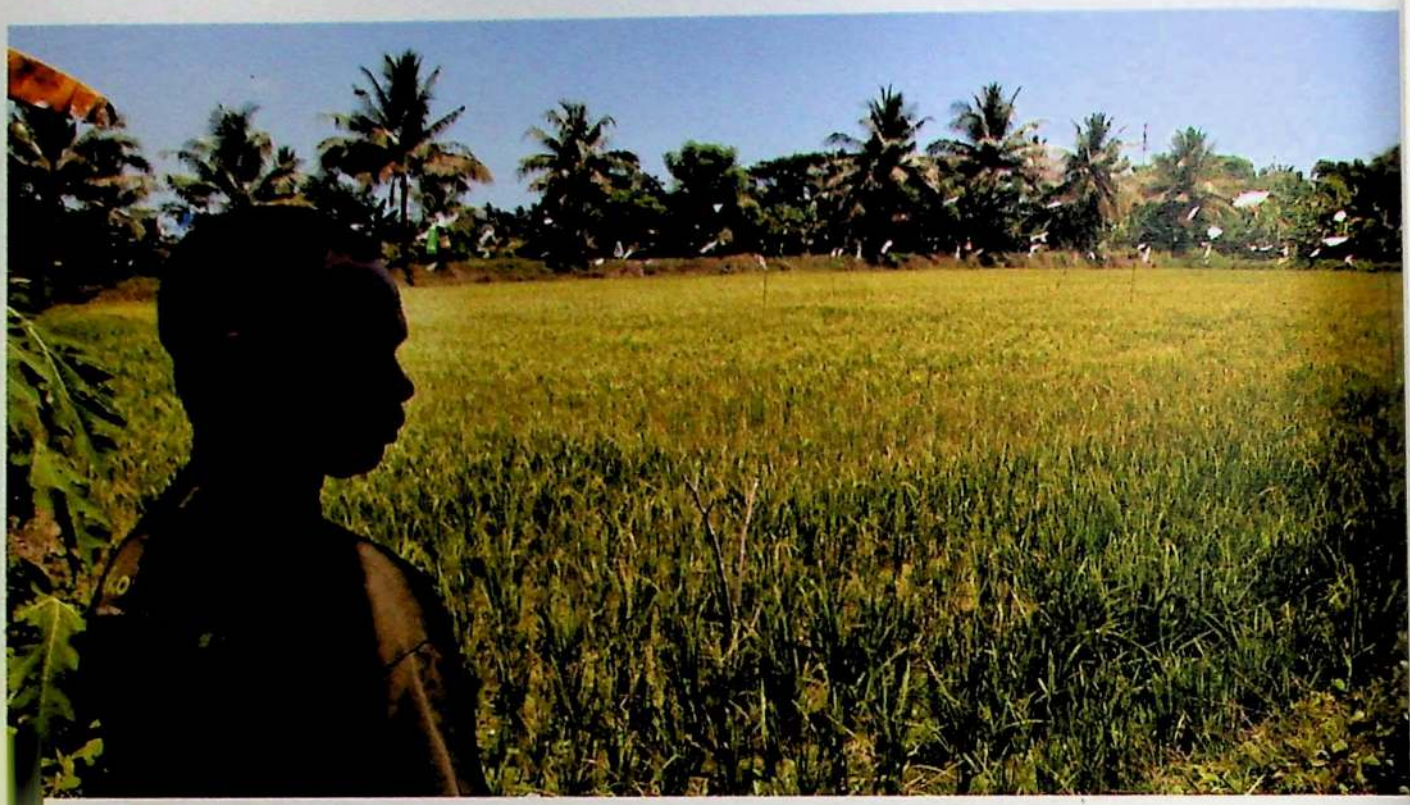
"Saya pakai pupuk kompos ini untuk sawah, kebutuhannya sekitar 5 karung ukuran 50 kg. Selain itu saya juga pakai pupuk ini untuk tambak ikan bandeng," kata Muh. Arif yang menyebutkan bahwa harga 1 kilogram bandeng yang biasanya terdiri dari 4 ekor bandeng ukuran sedang ini bisa dijual dengan harga Rp 15.000. Sekali panen bandeng, biasanya dalam waktu 8 bulan, pasangan ini bisa mendapatkan Pemasukan hingga Rp 3 juta.





Sitti Rahmah, ketua kelompok Pita Aksi yang mendapat penghargaan Oxfam sebagai Female Food Hero tahun 2013 (atas).

Campuran MOL, Desa Pitusunggu (18/8/14).



angkitkan Lahan Tidur

Kelompok Pita Aksi boleh berbangga. Setelah mengikuti Sekolah Lapang RCL pada tahun 2010 dan membentuk Kelompok Pita Aksi pada tahun 2011, kelompok perempuan ini berinisiatif untuk mulai menggarap kembali lahan tidur di desa mereka. Mengolah lahan tidur bekas tambak udang dan tidak produktif selama 20 tahun ini membuat kelompok penggagas ide ini ditertawakan oleh warga desa lainnya.

"Lahannya kan sudah asin, mana bisa ditanam lagi," cerita Muh. Arif menirukan ungkapan tetangganya saat itu. Lahan tidur yang awalnya sawah berubah menjadi tambak udang pada periode tahun 1997 hingga 1998, karena harga udang yang melonjak hingga Rp 100.000/ kg saat itu. Namun lalu karena produksinya menurun, sebagian besar tambak dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya selama 20 tahun.

Sejak awal Muh. Arif aktif terlibat dalam kegiatan kelompok Pita Aksi. Secara resmi, anggota kelompok Pita Aksi ini adalah perempuan, namun keberadaannya terus tumbuh melibatkan kaum laki-laki yang sebagian besar merupakan suami dari 25 anggota kelompok perempuan ini.

"Kaum laki-laki membantu untuk pekerjaan berat-berat, seperti membajak lahan dan mengangkut pupuk, kaum perempuan membantu penanaman, pemupukan,

Muh. Arif menunjukkan lahan tidur yang kini telah ia garap menjadi sawah organik setelah mengikuti sekolah lapang pada tahun 2011, Desa Pitusunggu (18/8/14).

pemeliharaan dan ketika panen," kata Sitti Rahmah. Menurut Sitti Rahmah, di kampungnya, laki-laki dan perempuan meskipun memiliki peran masing-masing tapi tetap saling membantu. "Saya kadang bantu masak juga kok, kalau Ibu Rahmah sedang pergi, tapi tidak terlalu sering," kata Muh. Arif.

Di Sekolah Lapang, Sitti Rahmah dan anggota kelompok Pita Aksi lainnya belajar menanam padi di lahan yang kadar garamnya tinggi, melakukan persemaian benih, membuat pupuk organik dari bahan baku yang ada hingga membuat pestisida hayati sebagai obat anti hama cara organik.

Lahan tidur seluas 8 hektar itu mulai digarap. Untuk awal, kelompok mengolah satu hektar pertama. Mereka berbagi tugas dengan laki-laki. Karena memperoleh hasil yang baik pada panen pertama, kelompok kembali bersemangat untuk menggarap lahan tidur itu. Mereka mendapatkan bantuan traktor tangan dari pemerintah daerah sehingga kegiatan mengolah lahan menjadi lebih mudah.

Di daerah ini jika mulai musim tanam padi, ada upacara adat Mapalili. Upacara ini diadakan untuk mendoakan kelancaran tanam sebelum mulai turun ke sawah. Upacaranya dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten, biasanya pada bulan Desember.







Rumah Sitti Rahmah yang menjadi 'basecamp' kelompok Pita Aksi dan (atas dan tengah)

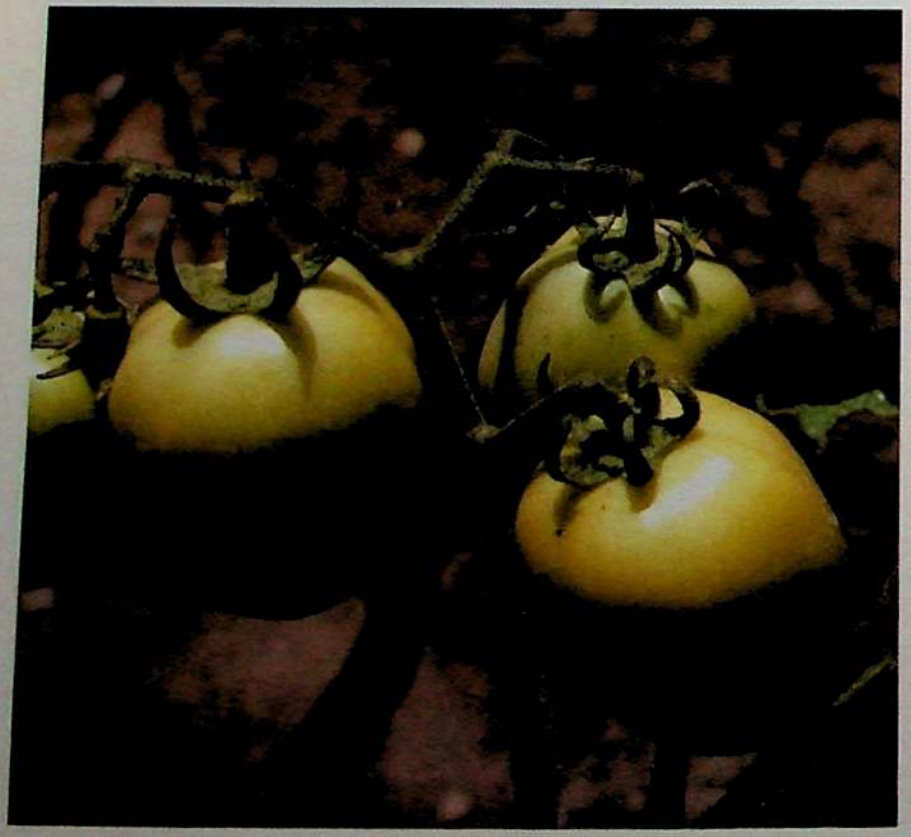
Muh. Arif bersama anggota kelompok Pita Aksi, Desa Pitusunggu (18/8/14).



Kebun Pangan Pekaran

Aksi Kelompok Pita Aksi tidak terhenti pada upaya mengolah kembali lahan tidur semata. Rata-rata anggota kelompok memili lahan yang cukup luas di rumahnya masing-masing, yaitu sekitar 700 meter persegi. Lahan pekarangan ini ditanami aneka sayuran oleh anggota kelompok. Ada sawi, kol, terong ungu, cabai, tomat, bayam, selada, kacang panjang dan kacang hijau.

Aneka benih dan bibit tanaman pangan pekarangan (atas).



Tomat dan daun bawang organik kelompok Pita Aksi, Desa Pitusunggu (18/8/14)



"Kalau sudah tanam, rata-rata saya bekerja di pekarangan ini satu dua jam saja sehari, tinggal menyiram dan memberi pupuk," kata Sahriyah anggota kelompok Pita Aksi.

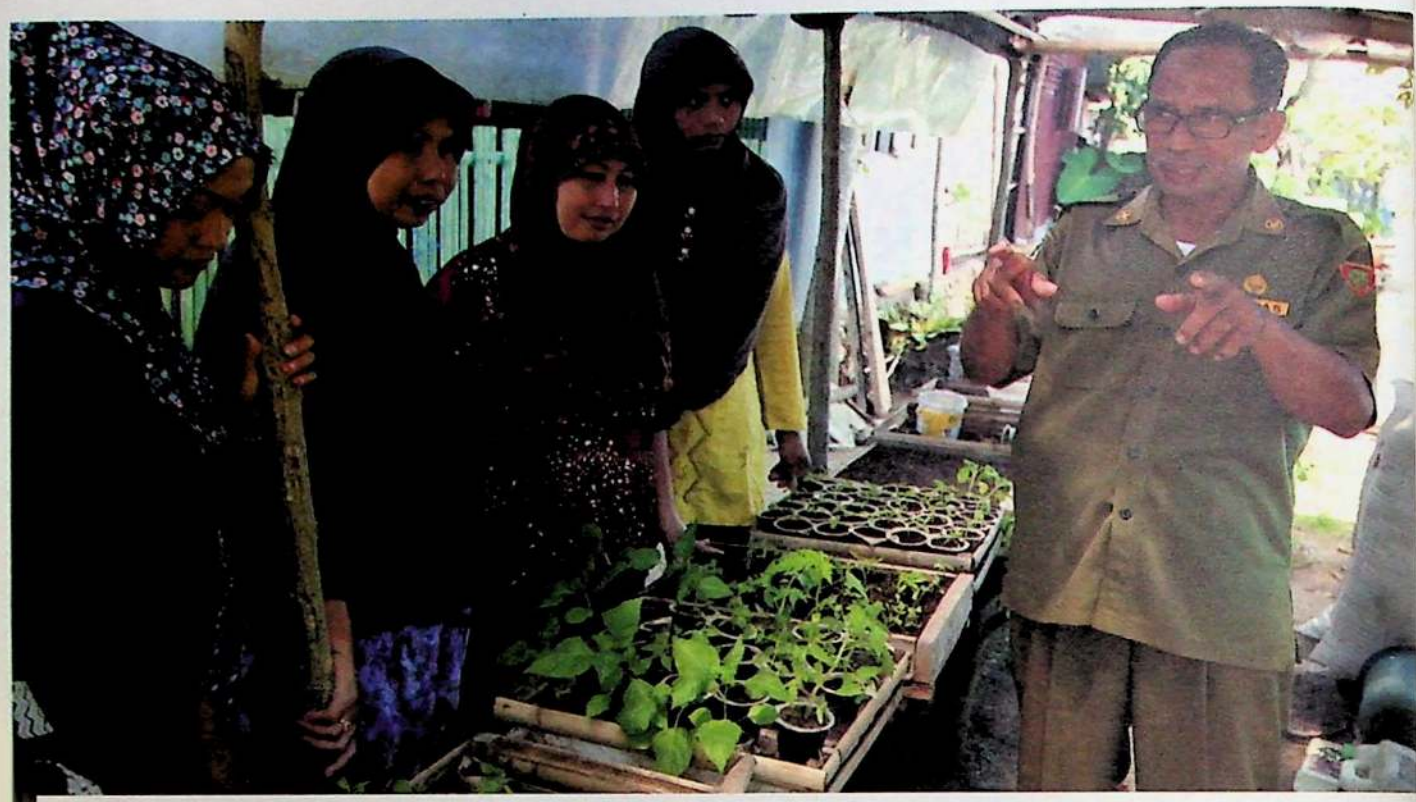
Hasil panennya digunakan untuk kebutuhan sendiri atau dijual ke Pa'gandeng (tukang sayur keliling). Harganya bervariasi. Misalnya sawi dijual per ikat dengan harga Rp 2.000, kangkung Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per ikat. Kacang panjang dijual Rp 1.000 per ikat. Sedangkan terong ungu dihargai per buah, yaitu Rp 1.000 per buah. Anggota kelompok bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000 per bulannya.

"Kalau kami jual di swalayan di Makassar, hitungannya bukan lagi per ikat, tapi per gram dan swalayan sudah kasih kemasannya, misalnya kemasan 250 gram," kata Sitti Rahmah. Biasanya suaminya Muh. Arif yang mengantar hasil sayur milik kelompok Pita Aksi ke Makassar. Dulu sekali mengantar sayur ke Makassar, kelompok bisa mendapatkan Rp 250.000. Dalam seminggu bisa dua kali antar, namun di bulan Agustus ini belum ada lagi pengantaran sayur.

Menurut Sitti Rahmah, harga sayuran organik di kota lebih mahal. Ia sempat mendengar tentang sertifikasi label "organik" untuk aneka produk yang diproduksi secara organik seperti sayur dan beras. Namun untuk mendapatkan sertifikat ini, harganya sangat mahal, bisa mencapai Rp 30 juta. Karenanya kelompok memutuskan untuk lebih fokus menjual ke pasar, Pa'gandeng dan berupaya membuka jalur pemasaran lainnya, seperti mempromosikan hasil panen ke pihak restoran.

Sayuran siap panen di Desa Pitusunggu (18/8/14)





Lebih Mandiri

Kelompok Pita Aksi juga didampingi oleh PPL dari Badan Ketahanan Pangan seperti Ahmad Sabara yang rutin datang ke kelompok. "Kelompok Pita Aksi ini sudah lebih maju, jadi sekarang saya membagi waktu ke desa lainnya. Maklum tenaga PPL masih kurang," kata Ahmad Sabara. Karena kekurangan tenaga PPL ini, Ahmad juga merangkap sebagai PPL untuk perikanan. "Padahal latar belakang saya pertanian, tapi saya jadi belajar terus agar bisa mendampingi nelayan," kata Ahmad. Selain PPL, fasilitator RCL seperti Karel, Munir dan Soni juga rutin berkeliling ke desa-desa dampingan.

"Kami ingin ada PPL yang bisa lebih rutin datang ke desa kami agar produksi di kelompok bisa lebih meningkat," kata Sitti Rahmah. Dari penjualan sayuran dari pekarangan, Sitti Rahmah dan Muh. Arif bisa mendapatkan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Pasangan ini memiliki dua anak beranjak dewasa yang sudah kuliah di Makassar.

Menurut Sairah, kebun milik Sitti Rahmah adalah yang paling banyak ditanami sayuran. Memasuki pekarangan Sitti Rahmah yang luasnya sekitar 800 meter persegi atau 8 are ini ibarat masuk ke swalayan sayuran yang setiap saat ada sayuran yang siap dipanen. "Ibu Rahmah itu rajin dan giat bertani. Lahannya juga luas dan sayurannya banyak," puji Sairah, anggota kelompok Pita Aksi. "Saya harus lebih rajin agar bisa seperti beliau," tambahnya.

Ahmad Sabara, PPL dan anggota kelompok Pita Aksi, Desa Pitusunggu (18/8/14).

Menurut anggota Pita Aksi, selain merasa lebih sehat karena mengkonsumsi sayur organik yang ditanam sendiri, hasil penjualan sayur ini juga bisa menambah penghasilan keluarga. "Sekarang kalau beli baju tidak harus minta sama suami, saya bisa beli sendiri," kata Rosmawati dengan bangga.

Sitti Rahmah sendiri mendapatkan penghargaan *Female Food Heroes* pada bulan Maret 2013 lalu. Penghargaan terhadap perempuan yang aktif dalam kegiatan bercocok tanam ini ini diberikan oleh Oxfam di Indonesia, sebagai bagian dari kampanye GROW yang juga merupakan kampanye global Oxfam di Asia Tenggara.

Senang campur bangga, itu yang dirasakan Sitti Rahmah ketika mendapatkan penghargaan itu. Selain penghargaan dari Oxfam, Sitti Rahmah juga mengatakan sekarang ini ia sering diundang oleh dinas dari pemerintah kabupaten seperti Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Biasanya untuk menjadi fasilitator atau pembicara di acara-acara pertanian. "Kelompok binaan Oxfam dan MAP lainnya, seperti di Desa Pitue itu, juga rajin datang ke sini untuk belajar," kata Sitti Rahmah. Bahkan menurutnya petani dari desa lain juga datang ke rumahnya untuk belajar bercocok tanam secara organik atau melihat kebun sayur di rumahnya.
"Saya senang bisa berbagi ilmu yang saya dapat," kata Sitti Rahmah dengan mata berbinar.





Muh. Arif di depan rumah. Hampir empat tahun ini pekarangannya menjadi kebun pangan organik, Desa Pitusunggu (18/8/14).

Inspirasi ke Desa Tetangga

Haji Bahtiar adalah tetangga desa sebelah yang dimaksud Sitti Rahmah. Sejak tahun 2010, ketika kelompok Pita Aksi mulai terbentuk, Bahtiar, warga Dusun Pitue, Desa Pitue, sering datang ke pertemuan kelompok dan kadang mengikuti sesi Sekolah Lapang.

"Padahal saya bukan anggota kelompok dan juga tidak diundang. Saya tertarik datang karena ilmunya bagus dan bisa saya bisa terapkan ilmu organiknya di lahan saya, misalnya untuk tanam tomat," ata Bahtiar yang juga pemilik mbak (18/8/14). Sejak itu ahtiar memendam keinginan gar istrinya, Odah, dan perempuan di dusunnya bisa seperti Sitti Rahmah dan kelompok Pita Aksi. Keinginannya baru terwujud pada tahun 2014 ketika akhirnya Kelompok Mutiara Desa terbentuk di dusunnya. Anggotanya 23 orang dan Odah menjadi ketua kelompoknya. Selain memiliki pekarangan yang ditanami sayuran secara organik, kelompok ini juga fokus di produksi pupuk organik.

"Kami mengatur jadwal kerja mingguan untuk membuat pupuk organik bagi anggota kelompok. Jam kerjanya berbeda-beda, ada yang pagi atau siang hingga sore, tergantung kapan anggota kelompok selesai urusan rumah," terang Odah. Diakuinya setelah ada kegiatan kelompok, sekarang ia merasa lebih percaya diri untuk berbicara.

Hal yang sama dirasakan oleh Fatimah. "Kesibukan kami perempuan di sini paling mengurus keluarga, suami dan anak. Kalau berkumpul dengan ibu-ibu, senangnya cari kutu. Kalau sekarang beda, kita sudah bisa urus tanaman dan pupuk. Tapi kadang-kadang kita masih suka cari kutu kalau senggang," kata Fatimah disambung derai tertawa anggota kelompok lainnya.

Bahtiar dan laki-laki di dusunnya membantu kelompok ini. Terutama untuk melakukan pekerjaan seperti mengangkut bahan baku pembuatan pupuk organik, menyalakan mesin dan membuat bedengan di tanah sebelum ditanami.



Untuk produksi pupuk organik, kini kelompok sudah memiliki mesin pencacah bantuan program RCL. Yang membuat Bahtiar sangat senang adalah Dinas Pertanian memesan 1,5 ton pupuk produksi kelompok dengan harga jual Rp 750/kg.

"Kebutuhan pupuk di sini cukup besar karena warga banyak yang menjadi petani dan punya sawah. Saya ingin ke depannya lebih fokus untuk membuat pupuk organik," kata Bahtiar.

H.Bahtiar yang terinspirasi Kelompok Pita Aksi, Desa Pitue (18/8/14). Anggota kelompok Mutiara Desa (bawah).



Sentra Sayuran

Kepala Desa Pitue, Amrullah, yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2010 berharap usaha pekarangan organik seperti model Program RCL dapat diterapkan di dusun lainnya. Di Desa Pitue ada empat dusun yaitu Dusunge, Jenae, Sabange dan Pitue.



"Selama ada pendampingan Oxfam di sini, kami jadi punya sayuran. Ibu-ibu tinggal petik sayur di halaman, caranya organik lagi. Saya harap warga bisa jadi sehat selain bisa mendapat penghasilan tambahan," kata Amrullah (18/8/14) di kediamannya. "Saya lihat kegiatan ini sangatpositif. Dulu ibu-ibu hanya urus rumah tangga atau ikut PKK, sekarang punya kegiatan baru dan menghasilkan."

Menurut Amrullah, pupuk kompos buatan warga selain bisa digunakan sendiri di lahan pertanian, juga bisa digunakan di tambak atau dijual ke dinas. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep dengan membeli pupuk buatan kelompok Mutiara Desa. "Saya ingin membuat semacam sentra sayuran di desa ini. Saya perlu bantuan fasilitator untuk membantu masyarakat di sini agar bisa seperti masyarakat di desa dampingan Oxfam" kata Amrullah. Ia berniat menyediakan benih gratis bagi warganya sehingga seluruh warga bisa punya kesempatan menanam di rumahnya.



Amrullah, kepala Desa Pitue yang ingin menjadikan desanya sebagai sentra sayuran, Desa Pitue (18/8/14).

Sukri: "Organik Membuat Kreatif"

Ketika M. Sukri, warga Desa Boddie, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, diajak oleh kepala desa untuk membentuk kelompok tani dan mengikuti Sekolah Lapang pada tahun 2011, serta merta ia menolak. "Saya pikir pembentukan kelompok ini ada hubungannya dengan politik untuk jadi tim sukses. Saya ini petani, tidak tertarik untuk ikut politik," kata Sukri (18/8/14), ketika ditemui sedang bekerja di sawahnya.

Setelah dijelaskan bahwa Sekolah Lapang adalah murni untuk kegiatan pertanian dan bukan untuk tujuan lainnya, apalagi politis, baru Sukri setuju untuk ikut. Ia mengikuti Sekolah Lapang Program RCL pada bulan September 2011. Setelahnya, ia malah menjadi ketua Kelompok Sipakatuo yang kemudian terbentuk dan beranggotakan 24 petani.

Sukri yang sudah menjadi petani sejak tahun 2001 itu belajar mengolah tanah secara organik. Ia juga belajar membuat kompos dari bahan baku yang ada di sekitarnya, seperti jerami, pupuk kandang dan membuat MOL sendiri.

Hasil Panen Berkurang Separuh

Namun, ketika Sukri mengaplikasikan pola organik ke sawah seluas tiga hektar miliknya, hasil panennya bukannya bertambah malah berkurang hingga separuhnya. "Biasa dapat hasil panen sekitar 4 ton, waktu tanam organik hasil panennya cuma jadi 2 ton," cerita Sukri.

Teman-teman petaninya khawatir hasil panen Sukri akan terus menurun dan mengajaknya untuk kembali menggunakan cara-cara yang sudah dikenal para petani selama bertahun-tahun yaitu menggunakan bahan-bahan kimia dalam mengolah lahan.

"Saya tidak tergerak untuk kembali ke cara tanam pakai bahan kimia. Saya pikir sabar saja, coba terus, nanti pasti ada hasilnya," kata Sukri. Dalam pikirannya, cara-cara organik lebih mudah diterima. Alasannya bahan baku yang dibutuhkan lebih murah. Membuat pupuk organik dan MOL, misalnya, menurut Sukri, bahan bakunya melimpah sehingga ia tidak perlu membeli pupuk.

M.Sukri menyemprotkan larutan MOL ke sawahnya, Desa Boddie (18/8/14).



Ketekunan Sukri berbuah manis. Dua tahun kemudian atau tahun 2013, panen yang berkurang separuh tiba-tiba naik drastis dengan menggunakan pupuk organik dan pola tanam hemat air, hasil panennya menjadi 6 ton. "Dari 4 ton menjadi 2 ton, lalu naik jadi 6 ton dengan cara organik. Tentu saja saya senang," kata Sukri. Dari hasil panen, Sukri memperoleh keuntungan Rp 10 juta dari satu hektar sawah. Sehingga dalam setahun dengan dua kali panen, Sukri bisa mendapatkan Rp 60 juta. Dalam mengolah sawah, Sukri dibantu oleh 4 hingga 6 buruh tani yang ia bayar Rp 50.000/hari. Tenaga bantuan ini hanya untuk membantu pada saat masa tanam dan panen, dengan total waktu sekitar 22 hari kerja untuk dua musim tersebut.

Menurut Sukri, perbedaan yang paling tajam dalam pertanaman organik ini adalah jumlah pemakaian pupuk. "Biasanya saya perlu 10 zak pupuk dengan modal Rp 700.000, ketika saya beralih ke pupuk organik, paling mahal modal saya hanya Rp 300,000," kata Sukri.

Kreativitas Sukri belum berhenti sampai di sini. Ia juga menggunakan pupuk kompos dan di tambak setengah hektar yang ia bagi untuk budidaya bandeng, udang dan nila miliknya. Hasilnya pun cukup menggembirakan. Dua kali panen dalam setahun, Sukri mendapatkan sekitar Rp 6 juta.

Fokus Jadi Petani

Nuraeni, Istri Sukri juga merupakan anggota dan pengurus kelompok Rejeki yang juga ada di desanya. Namun kelompok istrinya lebih fokus pada pertanian sayur organik di pekarangan. Pasangan ini memiliki empat orang anak. Dua anak sulungnya saat ini sedang kuliah di jurusan pertanian dan komputer di Makassar.

Kini Sukri pun menjadi pemandu di Sekolah Lapang. Sawahnya menjadi tempat belajar bagi kelompok yang dipandunya. Masih dalam program RCL Oxfam, Sukri mengaku senang ketika bisa mengikuti program pertukaran dan belajar dari petani di Yogyakarta pada September 2012.

"Pengalaman baru bagi saya untuk mengenal petani di tempat lain dan berbagi pengetahuan di seputar dunia tani," kata Sukri.

Sukri belajar bahwa di tempat lain beras organik dibeli dengan harga lebih tinggi.

Di Jakarta, harga beras non-organik rata-rata sekitar Rp 9.000/kg**. Sedangkan beras organik bisa mencapai Rp 13.000/kg. Sedangkan di Pangkep, belum ada perbedaan harga antara beras organik dan non-organik. Setidaknya itu yang dialami oleh Sukri. Harga beras di Pangkep rata-rata berkisar Rp 7.000/kg.

Sukri paham untuk memperoleh sertifikat "organik" bagi padinya, biayanya cukup mahal. "Saya ingin tetap fokus menjadi petani. Saya akan terus belajar dan akan terus mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan produksi panen saya," kata Sukri dengan mantap.

*** Catatan: Ini data beras dari Tempo, 2/3/15. Sedangkan harga beras organik dari penjualan beras organik online dan harga beras Pangkep mengacu pada data Sindonews, 4/12/14.*

Padi organik di Desa Boddie (18/8/14)

"Anti walang sangit" organik ala M. Sukri, Desa Boddie (18/8/14).


PADI ORGANIK
Pertakuan Pupuk Organik
Kompos Padat
MOL



Membentang Harapan dari Rumput Laut dan Jaring

Matahari bersinar terik di Dusun Kekean, Desa Tamarupa, Kecamatan Mandalle, salah satu daerah pesisir di Kabupaten Pangkep (18/8/14). Rumah panggung milik Syarifah dan Arman tampak ramai. Di bawah keteduhan kolong rumah panggung, sekitar 10 perempuan duduk mengelilingi tumpukan rumput laut basah dengan gulungan besar tali. Sedangkan di lantai atas 8 orang sibuk mengurai dan menganyam jaring yang nyaris memenuhi separuh ruangan.

Dua kelompok ini adalah binaan Program RCL Oxfam sejak tahun 2013 lalu. Syarifah adalah ketua kelompok rumput laut Kalaroang, namun ia juga merupakan anggota di kelompok pembuat jaring Siangkalidae.

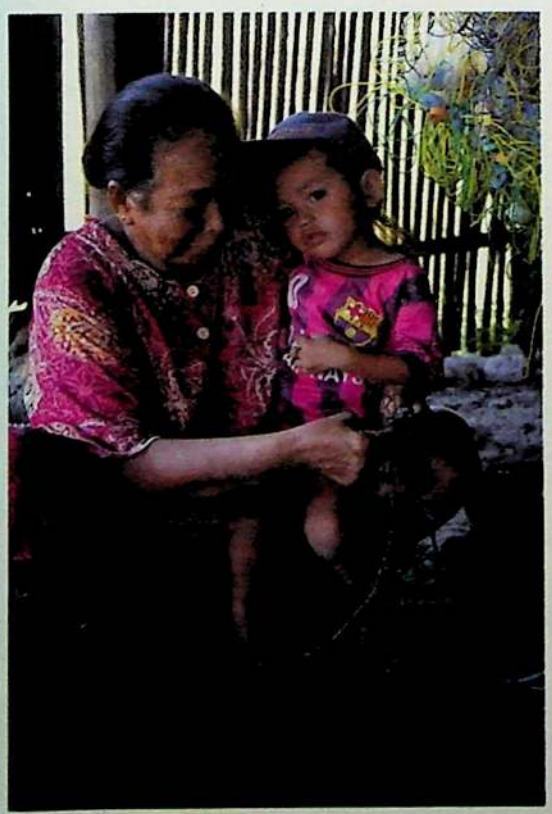
"Di kelompok kami rata-rata pendidikannya sampai tingkat SD dan SMP. Di kelompok Jaring Siangkalingadae, hampir seluruhnya adalah janda miskin yang menanggung keluarga," kata Syarifah yang memiliki dua orang anak dan sehari-hari bekerja sebagai guru sekolah dasar. Syarifah tergerak untuk membantu kedua kelompok ini, terutama dalam urusan pembukuan.



ggota kelompok Kalaroang membuat bentangan rumput laut, esa Tamarupa (18/8/14).







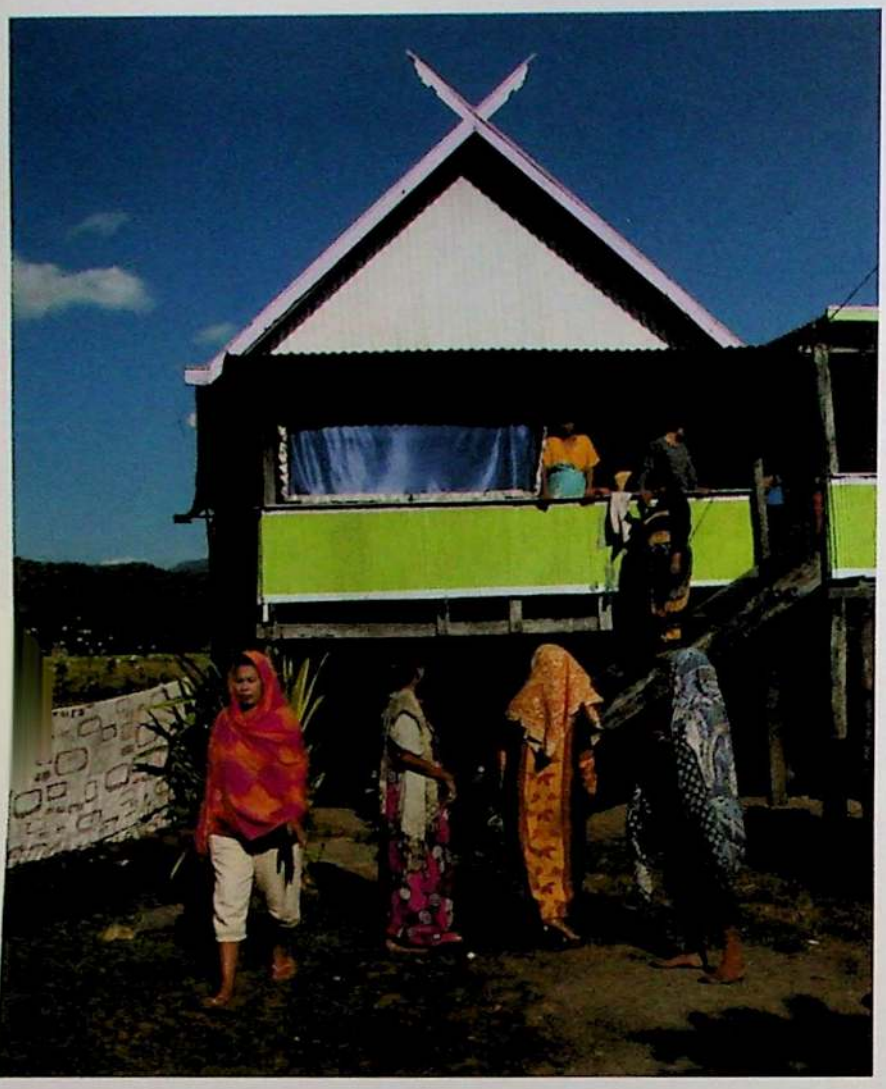
Menanam 'Bentangan' di Laut

Sambil memangku cucunya, Safiah anggota Kelompok Kalaroang, sibuk mengikatkan rumput laut seukuran 5 hingga 15 cm ke tali bersama anggota kelompok lainnya. Membuat "bentang", itu istilah mereka untuk menggambarkan sekitar 25 meter bentangan tali berisi bibit rumput laut untuk "ditanam" kembali ke laut.

"Satu bentangan seberat 5 hingga 7 kilogram nanti ketika ditanam di kedalaman air laut sedalam 0,5 meter hingga 4 meter bobotnya bisa menjadi 40 kilogram ketika panen dalam waktu 45 hari," kata Arman. Setelah panen, rumput laut ini nantinya dijemur sebelum dijual, beratnya menyusut menjadi 5 kilogram. Arman adalah suami Syarifah. Hari itu Arman dan Syarifah membantu menjadi penerjemah untuk berbincang-bincang dengan kelompok yang sebagian besar memahami bahasa Indonesia tapi lebih nyaman mengungkapkan pikirannya dalam bahasa daerah.

Laki-laki di Dusun Kekean, Desa Tamarupa, membantu menanam bentangan di laut (atas).

Safiah bekerja membuat bentangan sambil membawa cucunya (18/8/14).





Dalam satu hari rata-rata anggota kelompok Kalaroang yang terdiri dari 11 perempuan ini bisa menghasilkan 8 hingga 10 bentangan.
Satu bentangan bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam. Namun pekerjaan ini diselingi oleh pekerjaan membuat jaring, menangkap kepiting dan urusan rumah tangga. Satu bentangan yang selesai dihargai Rp 2.500, sehingga rata-rata anggota kelompok bisa mendapatkan Rp 25.000/hari.

Pembeli rata-rata berasal dari luar desa yang membeli rumput laut dalam bentuk kering. Kalau membeli basah, harganya sangat rendah yaitu Rp 3.000/kg. Biasanya rumput laut basah dibeli hanya sebagai bibit saja.

Dalam sebulan, hasil anggota kelompok berbeda-beda. Safiah, misalnya, bisa mendapatkan antara 50 hingga 145 kilogram rumput laut kering. Penghasilannya berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 2 juta dari penjualan rumput laut yang dihargai Rp 14.000 - Rp 15.000 per kilogramnya.

Menurut Syarifah, pembagian tugas laki-laki dan perempuan di kampungnya cukup adil. Suaminya dan laki-laki suami para anggota aktif membantu kegiatan Kelompok Kalaroang. Meskipun tidak secara resmi tercatat dalam kelompok perempuan ini, namun Arman dan laki-laki di dusun ini membantu "menanam" bentangan rumput laut ke laut setiap sore.

Anggota kelompok Kalaroang bersiap-siap ke laut untuk melihat bentangan rumput laut ditanam (atas).

Rumput laut yang sedang dijemur. Desa Tamarupa (18/8/14)

"Kasihan kalau ibu-ibu yang harus menanam bentang. Kadang mereka ikut kalau menanamnya di pinggir, jadi tidak perlu pakai perahu," kata Arman.

Cuaca yang buruk atau gelombang yang tinggi membuat pekerjaan ini tidaklah mudah. Apalagi karena lahan tanam bentangan rumput laut di desa ini cukup padat, sehingga Arman harus semakin jauh ke tengah. Risikonya adalah perahu bisa terbalik dan bentangan rumput laut menjadi rusak.

Menanam bentangan ini dilakukan dengan cara mengikatkannya ke dua patok di tengah laut. Pelampung yang terbuat dari *styrofoam* dan botol minuman menghiasi perairan pesisir Kekean, menandakan cukup padatnya lahan tanam milik sekitar warga.

Menurut Syarifah belum ada pengolahan di desa ini. Ia sendiri ingin agar ada pengolahan untuk hasil rumput laut.

"Dulu kami sempat belajar membuat dodol dari rumput laut dari pelatihan, tapi karena belum tahu akan dipasarkan ke mana, jadi kami membuatnya musiman saja," kata Syarifah. Melalui pelatihan, Syarifah dan anggota kelompoknya juga belajar untuk mencatat dan mengelola pembukuan.

"Kelompok sekarang sudah bisa mencatat hasil kerja anggotanya, pembukuannya jadi lebih rapi," kata Syarifah. Dari rumput laut, Syarifah dan Arman bisa mendapatkan panen bervariasi antara 80 hingga 160 kilogram yang dijual dengan harga Rp 14.000 hingga Rp 15.000, tergantung harga pasar atau sekitar Rp 1,2 juta hingga Rp 2,5 juta dalam sekali panen (Data RCL, 2014).







Lilah (24) anggota kelompok Kalaroang (atas).

Pasangan Arman dan Syarifah yang aktif dalam kegiatan dua kelompok: Kalaroang dan Siangkalidae. Desa Tamarupa (18/8/14)



Menganyam Jaring

Jika kelompok Kalaroang sibuk membuat bentang rumput laut di kolong rumah, maka di lantai atas rumah panggung, 8 perempuan anggota kelompok Siangkalingadae sibuk menganyam jaring untuk menangkap udang dan kepiting.

"Jaring ini bukan untuk kami pakai, tapi dibawa ke Papua oleh pengumpul," kata Rohani (45), anggota kelompok yang bisa menyelesaikan 5 jaring dalam sehari. Satu jaring dihargai Rp 45.000.

Anggota kelompok Siangkalingadae yang berjumlah 23 orang ini sebagian besar hidup tanpa suami. Salah satunya adalah Salmiah (42) yang memiliki 3 orang anak, yang bungsu masih duduk di kelas 3 SD. Setelah bercerai dengan suaminya pada tahun 2009, Salmiah menjadi penopang ekonomi keluarganya dibantu anak sulungnya yang duduk di kelas 1 SMA.

Anggota lainnya, Siti Raiya, membuat jaring dibantu dengan anaknya yang berkebutuhan khusus. Siti Raiya bisa membuat hingga 8 jaring dalam sehari.

"Karena sibuk mengurus rumah, saya hanya bisa menyelesaikan 2 jaring dalam sehari," kata Salmiah sambil tertawa. Selain membuat jaring, Salmiah juga beternak ayam dan bebek.
Dari pembuatan jaring, Salmiah bisa mendapatkan sekitar Rp 2,7 juta untuk 60 jaring yang diproduksinya dalam sebulan. Di awal bulan Agustus 2014 ini, dari catatan kelompok, Salmiah sudah menghasilkan 30 ikat jaring dan mendapatkan uang Rp 1.350.000.

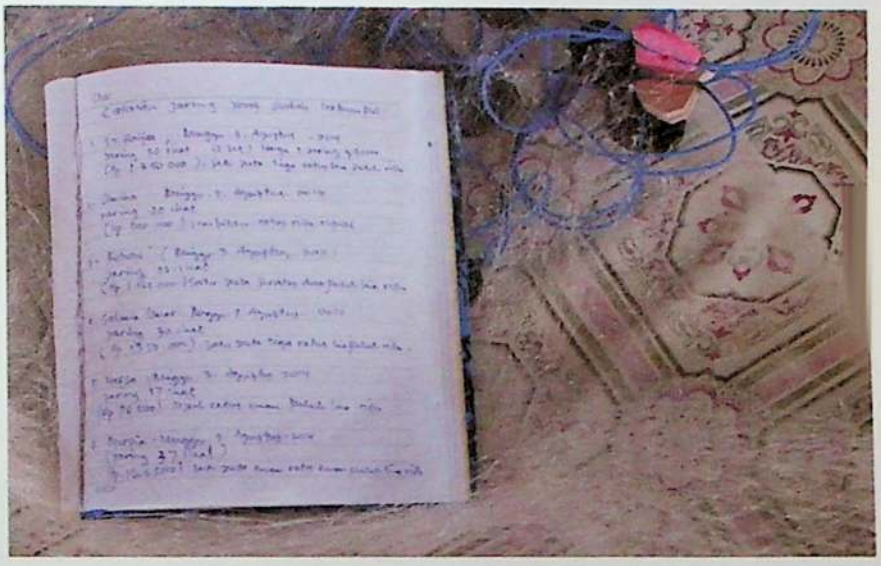
Beberapa barang bantuan Program RCL Oxfam, Desa Tamarupa (18/8/14).

Jika ada acara di desa seperti perkawinan, Salmiah dan seluruh anggota di kedua kelompok ini menghentikan kegiatannya untuk gotong royong membantu acara tetangga mereka. Waktunya bervariasi, dari satu hari hingga seminggu, tergantung dari acaranya.

Dari Program RCL, kelompok ini mendapatkan pelatihan termasuk manajemen kelompok dan pembukuan, selain itu kelompok mendapatkan modal barang berupa alat-alat kerja seperti tali, pelampung dan timah. Kelompok ini kompak tertawa ketika ditanya apa kegiatan mereka dulu sebelum menjadi kelompok dan melakukan usaha jaring atau rumput laut. "Mencari kutu, ngobrol atau urus rumah tangga saja," demikian jawab mereka.

"Usaha ini bisa membantu saya untuk menopang ekonomi keluarga, saya ingin anak-anak tetap bisa sekolah," kata Salmiah optimis.







Salmiah dan Nando (kanan), anggota kelompok Siangkalidae, menunjukkan jaring yang sedang dikerjakan, Desa Tamarupa (18/8/14).

Catatan anggota kelompok, Desa Tamarupa (18/8/14).

Anggota kelompok Siangkalidae sebagai penopang perekonomian keluarga (bawah).

Jika Oxfam Selesai di Kampung Kami...

Kehadiran Oxfam melalui program RCL sudah memasuki tahun ke-empat. Di Kecamatan Ma'rang, warga yang menjadi bagian dari kelompok dampingan Oxfam dan MAP sadar betul bahwa keberadaan program di kampung mereka tidak akan berlangsung selamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Adhy Mahdi Syuaib suami Nurjaya, ketua kelompok Talaswati di Dusun Kasuarang, Desa Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep (19/8/14). "Masa kerja Oxfam akan berakhir di tahun 2015, jadi kami ingin apa yang telah dirintis oleh Oxfam bisa kami lanjutkan," kata Adhy. Karenanya Adhy menyambut baik pembentukan Forum Pelaku Tani Organik (FPTO) dirintis sejak sekolah lapang selesai pada tahun 2011. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar petani dan petambak di empat desa yaitu desa Boddie, Desa Pitu Sunggu, Desa Bongomanai dan Desa Tamangapa. Adhy menjadi salah satu pengurus di forum ini.

"Alumni Sekolah Lapang dari beberapa desa ini akan memerlukan forum untuk saling berkomunikasi. Itu dasar forum ini terbentuk. Anggotanya sekarang lebih luas dari kelompok dampingan Oxfam. Ada petani jeruk di luar desa ini juga ikut dalam forum," kata Nursaba, bendahara di FPTO yang juga merupakan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) ini.

Pengurus FPTO terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Ada beberapa divisi dalam forum, antara lain divisi pemasaran, sumber daya manusia, pengembangan, prasarana dan produksi. Setiap kelompok memiliki perwakilan di forum ini. Menurut Nursaba, karena kesibukan, anggota forum jarang bertemu, tetapi masih sering berkomunikasi melalui sms dan telepon. Pengurus dan anggota forum kerapkali juga berkeliling ke kelompok. Forum mendorong anggotanya untuk menghindari bahan-bahan kimia dan menggunakan bahan organik yang ada seperti sampah dapur, kotoran dan lain sebagainya di dalam budidaya tani dan tambak.

Abdul Haris, PPL dan pengurus FPTO di kebun kelompok Talaswati (kanan).



"Fokus kami sekarang di kelompok-kelompok yang masih memerlukan pendampingan. Kalau kelompok yang sudah cukup kuat seperti Talaswati dan Pita Aksi, datangnya sekali-sekali saja," kata Nursaba. Selain itu menurutnya, anggota FPTO ini juga memantau pasar, sehingga bisa menginformasikan ada kekurangan produk tertentu, atau malah kebanjiran komoditas ketika panen Hasil panen dibawa ke pasar lokal, atau ke Pa'gandeng atau penjual keliling.

Informasi pasar ini sangat membantu. Menurut Suruga, anggota kelompok Talaswati, seperti halnya dirinya dan anggota kelompok Talaswati lainnya, mereka lebih banyak berada di kampung dan kurang mengetahui produk apa yang diperlukan pasar.

"Ibu Nursaba suka mengabari kalau ada yang perlu sayur dari kebun kami," kata Suruga. Selain Suruga, informasi pasar juga mereka dapatkan dari fasilitator yang bertugas mendampingi di desa ini seperti Soni, Karel dan Munir. Seperti pada pertengahan Agustus ini, sebuah rumah makan di Kabupaten Pangkep meminta kelompok untuk memenuhi sekitar 10 kilogram kangkung.





Nurjaya dan Adhy Mahdi. Desa Tamangapa (19/8/14)

Sebagian kelompok Talaswati, Desa Tamangapa (19/8/14).





Meskipun berusia relatif muda, keberadaan FPTO berusaha terus digaungkan, dengan cara berkordinasi dan berkomunikasi dengan dinas terkait, termasuk membuat acara Pada akhir tahun 2012, FPTO dan RCL Oxfam menggelar acara kampanye "Berhenti Meracuni Diri Sendiri" di Desa Boddie, Kecamatan Mandalle. Acara ini mengundang berbagai dinas dan kelompok masyarakat, sekaligus memperkenalkan aneka produk milik kelompok seperti hasil sayuran organik, bandeng organik dan aneka olahan makanan.

Karel, fasilitator RCL Oxfam bersama anggota Talaswati (atas).

Kekurangan PPL

Menurut Adhy, sejak adanya program RCL di kampungnya, ia merasa jadi lebih mengenal keberadaan PPL. "Dulu saya jarang melihat petugas PPL atau dari dinas datang ke desa kami. Setelah Oxfam masuk, jadi banyak staf dinas yang datang," kata Adhy.

Pengamatan Adhy ini diakui oleh Ir. Hasanuddin Muin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep di kantor Bappeda (19/8/14). "Jumlah tenaga PPL masih sangat kurang. Di kabupaten hanya ada sekitar 80 tenaga penyuluh pertanian dan hanya 16 tenaga PPL perikanan. Tentu saja tidak sebanding dengan luasan daerah dan jumlah tambak yang ada," kata Hasanudin.

Padahal menurut Hasanudin satu orang PPL maksimum hanya bisa menangani 200 hektar tambak, sedangkan luasan tambak di Kabupaten Pangkep lebih dari 10,000 hektar. Setidaknya, untuk jumlah PPL minimalnya perlu 50 orang, itu pun untuk mendampingi di bidang perikanan saja, belum termasuk pertanian dan budidaya lainnya. Dari sisi pengetahuan, menurut Hasanudin, PPL harus terus menerus meningkatkan kapasitasnya, karena teknologi pertanian dan perikanan terus berkembang.

Sementara itu di kesempatan lain, Sitti Rahmah menginginkan pendampingan PPL lebih intensif di desanya. "Saya ingin PPL tetap di desa, sehingga kami bisa terus konsultasi dan didampingi seperti ketika dengan program Oxfam ini. Ini penting buat kami, karena kami ingin produksi bisa terus meningkat," kata Sitti Rahmah.



Soni Kusnito, fasilitator RCL Oxfam bersama anggota kelompok Pita Aksi, Desa Pitusunggu (18/8/14).

Refleksi Sekolah Lapang

Dalam pelaksanaan Program RCL, Oxfam bermitra dengan Mangrove Action Project (MAP) sejak tahun 2010. MAP di Indonesia adalah lembaga nirlaba yang didirikan pada tahun 2000.

Awalnya MAP fokus pada penanaman Mangrove sebagai upaya rehabilitasi kawasan pesisir di daerah dampingan. Program ini juga meningkatkan pendapatan ekonomi dengan melibatkan masyarakat.

Selain MAP, Program RCL Oxfam juga bermitra dengan Yayasan Konservasi Laut (YKL). Pada tahun 2012 MAP dan Oxfam melaksanakan Sekolah Lapang di 4 kabupaten dampingan program RCL di Sulawesi Selatan. Sekolah Lapang itu juga melibatkan PPL dari Badan Ketahanan Pangan yang bertugas di daerah tersebut. Setelah Sekolah Lapang selesai pada tahun 2013, program dan mitra melihat ada masih ada kebutuhan untuk pendampingan kelompok dan penguatan kapasitas. Maka program membuat Sekolah Lapang Lanjutan.

Sebagai refleksi, Fatma Hutagalung (18/8/14), melihat bahwa Sekolah Lapang yang dilakukan ini dapat lebih ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. "Misalnya dalam program lanjutan itu harusnya bisa lebih fokus ke modul yang diperlukan petani dan kondisi setempat pada saat itu. Tidak lagi secara umum seperti kursus," kata Fatma berbagi hasil refleksinya

Sejak pertengahan 2014 menjelang akhir program, Oxfam merekrut tiga konsultan fasilitator untuk mendampingi di desa. Salah satu konsultannya yaitu Soni Kusnito yang sudah mendampingi masyarakat di Kabupaten Pangkep ketika bersama MAP sejak tahun 2010. "Kegiatan di tahapan ini lebih banyak untuk memonitor dan pendampingan, sehingga bisa dilakukan dengan lebih efisien melalui peran fasilitator," kata Fatma.



Fatma Hutagalung, staf RCL Oxfam di pertemuan kelompok Talaswati. Desa Tamangapa (19/8/14)

Potensi Pengembangan Usaha Pesisir Pangkep



Budidaya tambak seperti bandeng dan udang merupakan salah satu primadona hasil dari kabupaten Pangkep dengan luasan tambak yang diidentifikasi mencapai 10.000 hektar. Hal itu dikemukakan Ir. Hasanuddin Muin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep di kantor Bappeda (19/8/14).

Potensi Rumput Laut

Selain budidaya perikanan tambak, potensi lain yang belum dikembangkan secara maksimal di Kabupaten Pangkep adalah budidaya rumput laut. Rumput laut yang termasuk marine culture di kabupaten ini masih dikembangkan dengan cara tradisional dengan skala rumah tangga.

Produksi rumput laut dari catatan 2013 lalu mencapai 1.240 ton. Jumlah ini masih dengan hitungan usaha skala kecil. Memang belum sebesar produksi rumput laut di daerah lain di Indonesia," kata Hasanudin. Namun Hasanuddin optimis bahwa kualitas rumput laut Pengkep sangat baik, karena didukung dengan kualitas perairan yang baik, meskipun dalam skala produksi daerah belum ada pengolahan rumput laut di daerah ini.

Hal senada diungkapkan oleh Syarifah, di Dusun Kekean, Desa Tamangapa, Kecamatan Mandalle, salah satu daerah pesisir di Kabupaten Pangkep "Kita jual rumput laut dalam keadaan kering kepada pengumpul dari luar desa. Katanya mereka jual ke Makassar. Di desa kami belum ada pengolahan rumput laut, jadi kami hanya jemur kering untuk dijual" kata Syarifah (18/8/14) yang merupakan anggota kelompok Kalaroang dan Siangkalidae, dampingan Program RCL.

Di tingkat nasional, identifikasi Kementerian Perindustrian menunjukkan dari 1,1 juta hektar perairan di sekitar kepulauan yang merupakan daerah potensial untuk pemanfaatan rumput laut, baru sekitar 220.000 hektar yang sudah dimanfaatkan. Bahkan di tingkat nasional, dari besarnya potensi rumput laut sebagai komoditas ekspor perdagangan dunia, di Indonesia baru ada 18 usaha industri pengolahan rumput laut dengan produksi 15.638 ton per tahun. (Kompas, 4 September 2014)

Sebagai daerah yang wilayahnya berupa kepulauan dengan perairan laut, pengembangan budidaya rumput laut adalah potensi ekonomi besar bagi daerah Kabupaten Pangkep. Hal ini bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya yang sebagian besar berada di wilayah pesisir.

Alfian Muthmainah, Kasubdit Koperindag Bidang Ekonomi Bappeda, Kabupaten Pangkep menunjukkan peta Kabupaten Pangkep (19/8/14)

Rumput laut yang sedang dikeringkan di Desa Tamarupa (kanan).

Armand dan rekannya menanam bentangan rumput laut di sore hari (18/8/14).







Data, Akses Pasar dan Replikasi



Sementara itu Samsu, Kepala Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangkep mengatakan bahwa sejak keberadaan program RCL, ia menilai ada perubahan positif di daerahnya.

"Selama hampir lima tahun Oxfam MAP di Kabupaten Pangkep, saya tidak melihat hanya dari angka produksi sayur yang dihasilkan dari desa, tapi yang paling penting ada pondasi untuk ketahanan pangan di tingkat rumah tangga," kata Samsu.



Hal ini menurut Samsu, sangat mendukung dan sejalan dengan visi Desa Mandiri yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep. Dalam konsepnya, di setiap kecamatan harus ada satu desa yang bisa menjadi desa mandiri menjadi desa inti yang unggul di bidang perikanan dan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pangkep berupaya untuk menjadikan bidang pertanian dan perikanan sebagai bidang unggulan daerah.



Menurut Samsu, akses pemasaran untuk sayuran organik, baik di Kabupaten atau di Makassar memang belum terlalu baik. Harga pasar untuk sayur organik cenderung sama rata dengan produk yang non-organik. Padahal produk organik lebih berkualitas dan sangat baik untuk kesehatan bagi yang mengkonsumsinya. Samsu berpendapat bahwa di masa mendatang, selain meningkatkan produksi pertanian organik, edukasi dan advokasi pasar juga diperlukan untuk memperkenalkan keunggulan produk pangan organik.



Di sisi lain, Sabrun Jamil, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Pangkep, mengatakan bahwa penggunaan kompos organik untuk tambak di desa dampingan program RCL berdampak positif pada perbaikan tambak dan produksi ikan.

"Selama bertahun-tahun petani tambak menggunakan bahan kimia untuk tambaknya. Di sekolah lapang RCL mengajarkan untuk penggunaan kompos organik. Kami tertarik dengan metode ini. Saya ingin menjajaki apakah memungkinkan untuk *share cost*, jika Oxfam bisa membiayai sekolah lapang dan kami dari sisi pembiayaan operasional," kata Sabrun. Selanjutnya menurut Sabrun, yang tak kalah penting adalah peran fasilitator di dalam program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Dari atas ke bawah: (1) Ir. Hasanuddin Muin, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Pangkep. (2) Samsu, Kepala Ketersediaan dan Distribusi Pangan Badan Ketahanan Pangan. (3) Sabrun Jamil, Kepala Bidang Perikanan Budidaya DKP Pangkep di kantor Bappeda Kab. Pangkep (19/8/14) dan (4) Boedi Sardjana Julianto, Manajer Program RCL Oxfam.

"Kami ingin coba mereplikasi model sekolah lapang RCL, meskipun dari sisi pemerintah, kami belum bisa melakukan budidaya organik sepenuhnya, karena tuntutannya berbeda. Tapi jika bisa, kami ingin mengadaptasi model, modul dan metodenya. Untuk itu kami akan perlu bantuan dari Oxfam dan fasilitator," kata Sabrun.

Pemerintah daerah juga bercita-cita membuat basis pendataan potensi lahan pertanian dan identifikasi kelompok tani di daerah tersebut. Hal ini diharapkan akan bisa mempercepat dan mempermudah untuk mengarahkan program pembangunan. Bantuan untuk bidang pertanian dan perikanan akan diberikan pada kelompok dan bukan perorangan seperti sering terjadi pada saat ini.

"Untuk itu kami merasa perlu untuk memperkuat kelembagaan, termasuk penguatan dan pendampingan kelompok tani. Kami berharap agar program bisa lebih banyak melibatkan masyarakat luas, agar lebih banyak kelompok dan petani unggul yang muncul," kata Samsu.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Boedi Sardjana Julianto, Manajer Program RCL Oxfam.

Menurut Boedi, Program RCL bisa membantu penguatan kondisi eksisting pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai terbentuk.

"Strategi berikutnya adalah bagaimana program bisa memperkuat nilai tawar dari kelompok-kelompok ekonomi ini. Misalnya dengan membantu dari sisi budidaya, pengemasan produk atau membantu membuka akses pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan antara masyarakat dampingan dengan pengusaha dan pemerintah," kata Boedi di Makassar (17/8/14).

Di bulan Agustus 2014 lalu Program RCL juga mengadakan pelatihan yang bertema tentang peran sektor swasta dalam pembangunan masyarakat pesisir dan hak asasi masyarakat pesisir. Pelatihan tiga hari ini juga melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dampingan dan sektor swasta.

Menurut Boedi untuk membantu pemahaman masyarakat tentang peran produknya di dalam sektor industri, Program RCL juga memfasilitasi kunjungan masyarakat ke sektor industri terkait, seperti pengolahan rumput laut.

"Hal ini kami harapkan agar masyarakat dampingan bisa melihat langsung sektor industrinya seperti apa dan menumbuhkan keinginan untuk terus meningkatkan kualitas produksi," kata Boedi.



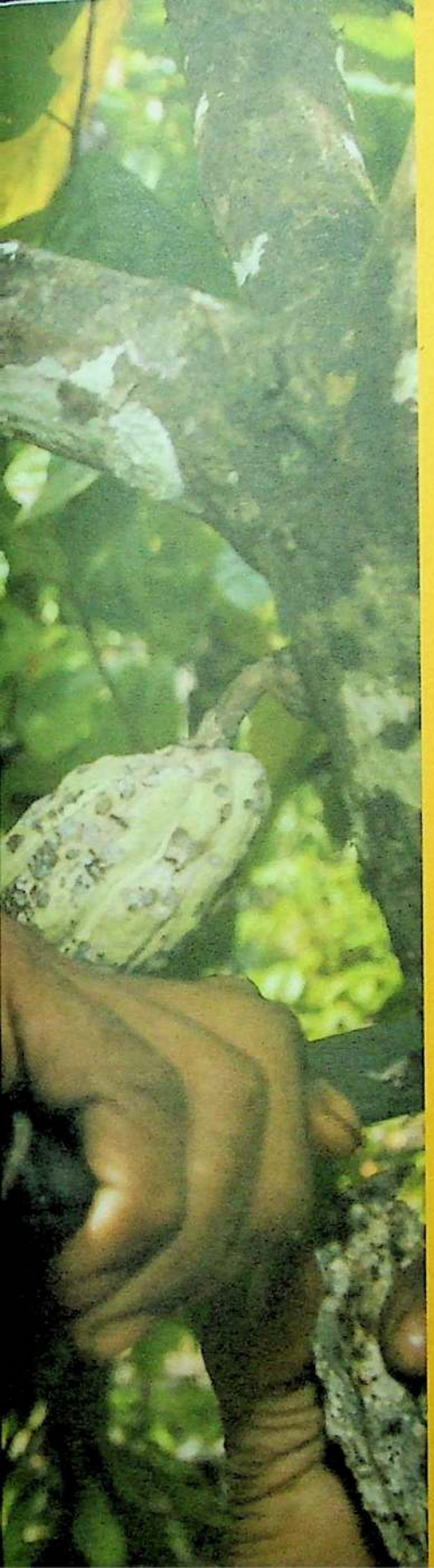


Anggota Kelompok Tani Tambak Sipadecengi di Dusun Pungkalawaki Desa Pitusunggu (19/8/14)



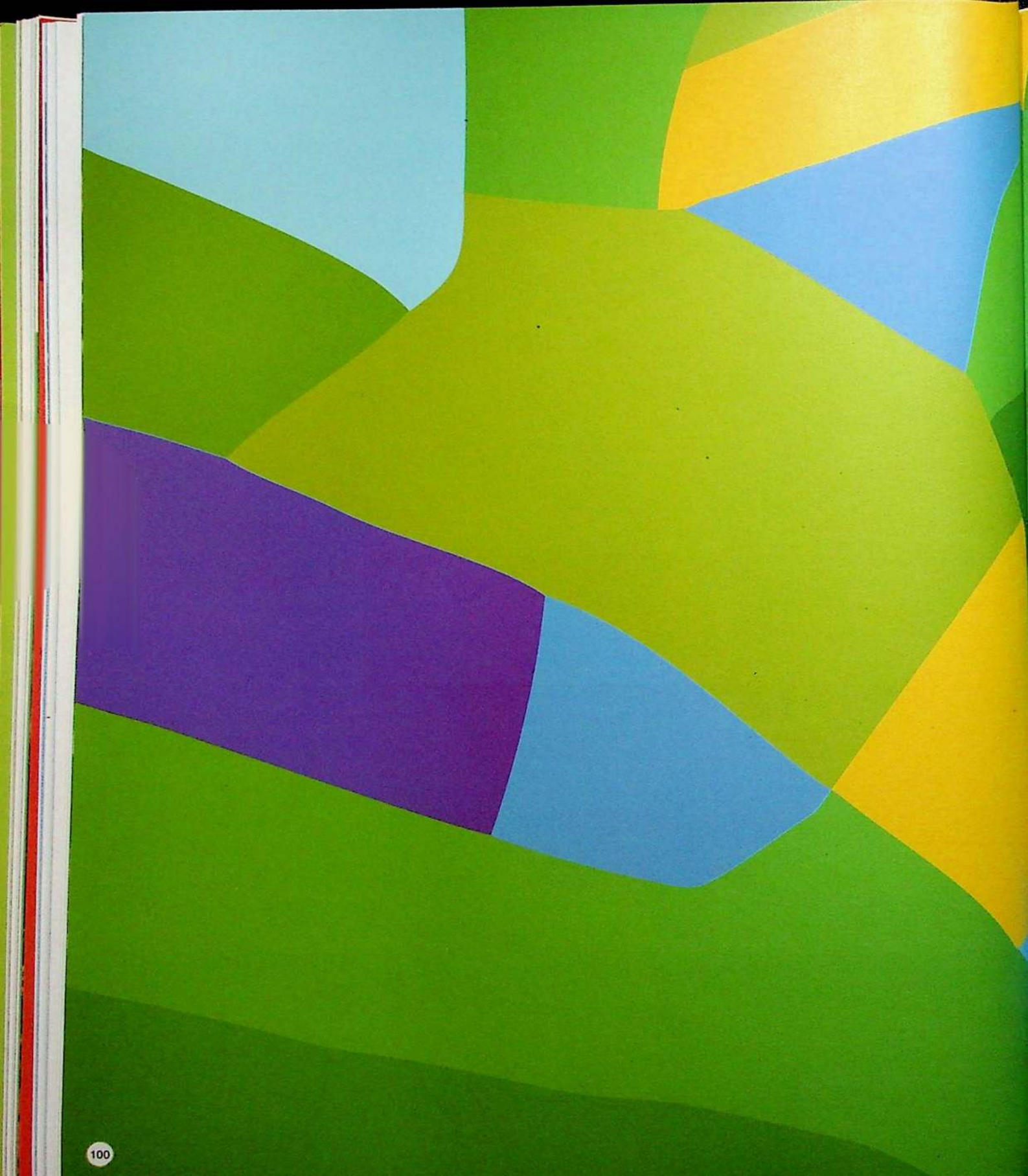








LIKA-LIKU MENGEMBANGKAN "SANTAPAN PARA DEWA" DI JAYAPURA



LIKA-LIKU MENGEMBANGKAN "SANTAPAN PARA DEWA" DI JAYAPURA

DAFTAR ISI

Lika-Liku Mengembangkan "Santapan Para Dewa" di Jayapura	102
Pasang Surut Sebuah Kemitraan	114
Para Mama Petani Kakao dari Hamonggrang	120
Tentang Kakao, Budaya dan Pembangunan	128
Cerita Cokelat dari Tanah Jayapura	138

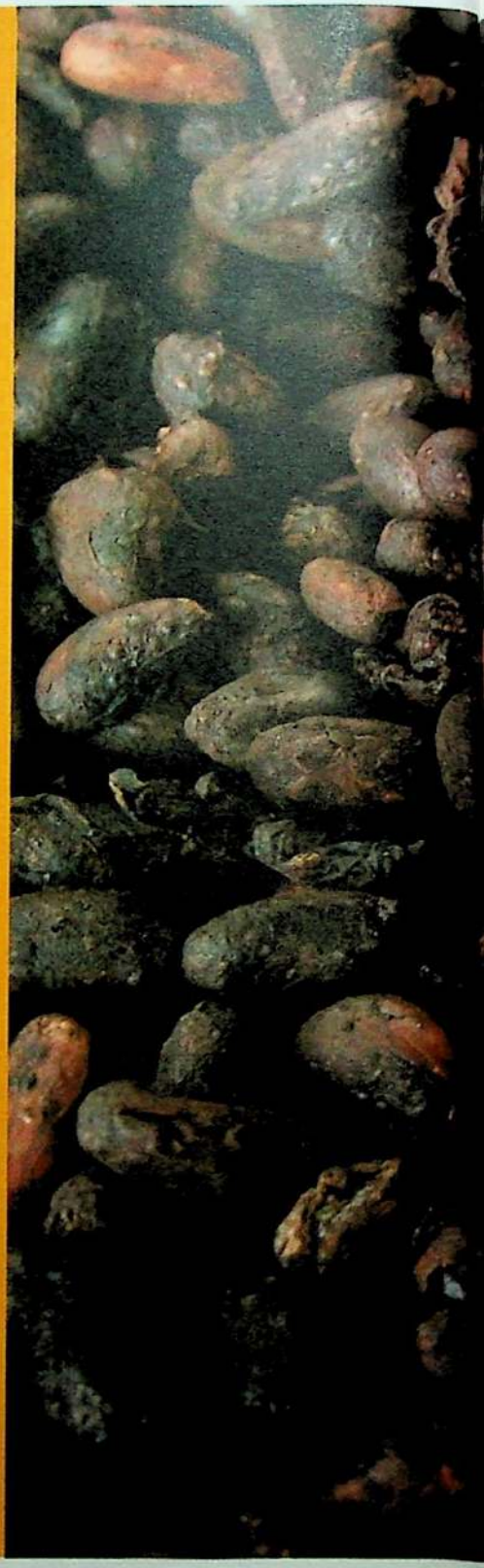
Lika-Liku Mengembangkan "Santapan Para Dewa" di Jayapura

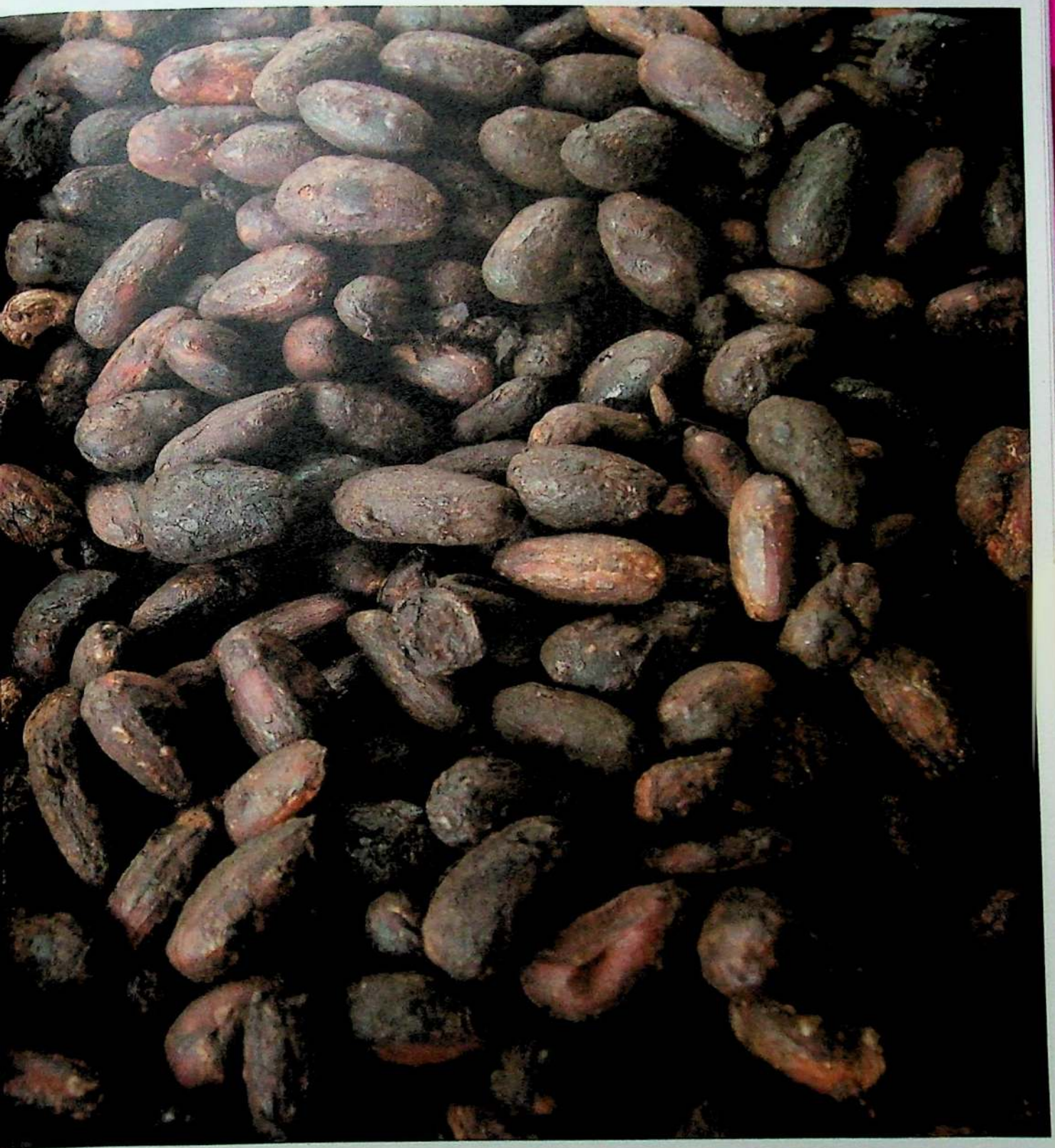
Isak Usmani, warga Kampung Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura, adalah salah satu anggota Kelompok Mabuma I, yang merupakan petani dampingan Yayasan KIPRa. Dulu Isak biasa menjual biji Kakao basah. Setelah mengikuti Sekolah Lapang, ia menjual biji Kakao dalam bentuk kering dan sekarang kelompoknya mulai belajar fermentasi.

"Harga Kakao fermentasi bisa lebih tinggi dibanding bentuk basah, yaitu Rp 20.000/kg. Sedangkan biji Kakao basah harga jualnya Rp 12.000/kg tapi kadang bisa turun jadi Rp 7.000/kg," kata Isak (14/8/14) ketika ditemui di kediamannya di Kampung Kwansu.

Menurut Isak, kelompoknya baru belajar fermentasi biji Kakao. "Masih tahap coba-coba, jadi hasilnya belum banyak," kata Isak sambil menunjukkan kotak kayu tempat menyimpan biji Kakao yang akan difermentasi. Kotak fermentasi itu diletakkan di lahan milik Derek Bano, petani dan fasilitator pendamping di Kampung Kwansu. Ketika dibuka, isi biji Kakao di dalamnya tidak sampai seperempat kotak kayu yang berukuran sekitar 40x40 cm dengan tinggi 50 cm.

"Produksi Kakao selama tiga bulan ini menurun karena banyak tanaman kami diserang hama," tambah Isak lagi yang menyebutkan di kebunnya banyak terserang hama Penggerek Buah Kakao (PBK).









Sempat Jadi Primadona

Kakao (*Theobroma cacao L.*) adalah tanaman komoditas yang menggiurkan. Pengolahannya menghasilkan bahan baku pembuatan Cokelat. Dalam bahasa Yunani, *Theos* artinya dewa dan *Broma* berarti santapan, maka *Theobroma* diartikan sebagai "santapan para dewa", makanan yang sejak dahulu kala dianggap sebagai makanan kelas menengah ke atas.

Tanaman Kakao bukanlah tanaman asli dari Indonesia melainkan dari hulu Sungai Amazon di Amerika Selatan. Spanyol membawa tanaman ini ke Indonesia pada tahun 1560 ke Minahasa, Sulawesi Selatan. Saat ini ada tiga daerah penghasil Kakao di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan (988.309 ha, 448.344 ton), Sumatera (377.032 ha, 166.609 ton) dan Papua Maluku (107.641 ha, 33.568 ton)
(Ditjenbun, 2012 dikutip dari Laporan Kalimajari, 2013)

Di Papua, tanaman ini dibawa oleh Belanda pada tahun 1955 dan ditanam di beberapa daerah di Papua, termasuk di Kabupaten Jayapura. Lahan produksi untuk Provinsi Papua yaitu 34.400 ha dengan hasil 9.530 ton (UP4B, 2014).

Kakao dapat dipanen dalam waktu 3 tahun, sejak awal penanamannya. Ketika pohon Kakao berbuah, proses pematangan buahnya bisa mencapai enam bulan. Namun panen Kakao tidak mengenal musim, sehingga petani dapat panen Kakao setiap bulan. Pohon Kakao dapat bertahan hingga umur 20 tahun, setelahnya perlu diganti.

Kuncoro Samiyana, salah satu pendiri dan penasihat Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa), mitra Oxfam

Isak Usmani (kiri), Mince Waisimon dan Melki Esau Waru, Kelompok Mabuma I Kwansu, menunjukkan kotak fermentasi Kakao (14/8/14).

Buah Kakao siap panen (bawah).

dalam PEDP, sudah berdomisili di Papua sejak tahun 1970. Ia masih mengingat kakao pernah menjadi primadona untuk komoditas unggulan dari Papua.

Harga Kakao di tahun 1980-an pernah sampai Rp 500/kg basah. Tapi ketika krisis ekonomi pada tahun 1997, harganya pernah mencapai Rp 27.000/kg basah karena pengaruh gejolak nilai tukar Rupiah. Menurut pengamatan Kuncoro, selama 15 tahun terakhir ini perkembangannya kembali stagnan. Harga Kakao saat ini berkisar antara Rp 17.000 hingga Rp 20.000.

"Ada banyak masalah di pengembangan kakao, antara lain kelembagaan yang tidak berfungsi, koperasi Kakao tidak lagi berjalan. Pola tanamnya buruk dan banyak tanaman yang terkena hama penyakit," kata Kuncoro membagi pengamatannya (13/8/14), ketika ditemui di kantor KIPRa.
"Padahal kita tahu kalau Kakao bernilai ekonomis tinggi karena merupakan komoditas ekspor dan bisa meningkatkan pendapatan petani serta daerah. Keinginan kami dalam PEDP bersama Oxfam ini adalah bisa mengembalikan kejayaan kakao ini bersama petani melalui Program Restorasi Kakao," kata Kuncoro.







Isak Usmani memangkas cabang Kakao (atas)

Kuncoro Samiyana, pendiri dan penasehat Yayasan KIPRa (tengah).

Suasana kerja kantor Yayasan KIPRa (13/8/14).

Tantangan dan Potensi Budidaya Kakao Tradisional

Adolof Yoku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, ketika ditemui di kantornya (13/8/14) menyebutkan bahwa mengembangkan budidaya kakao adalah sebuah tantangan tersendiri.

"Sebagian besar petani kakao adalah petani tradisional. Budidayanya masih dilakukan seadanya dan hasilnya ebatas untuk mencukupi ebutuhan sehari-hari, belum erorientasi pada pasar. etani lambat menyerap dan menerapkan pola baru dalam budidaya tanaman Kakao, meskipun sudah ada pendampingan," kata Adolof. Pendampingan teknis di tingkat desa dilakukan oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP4K).

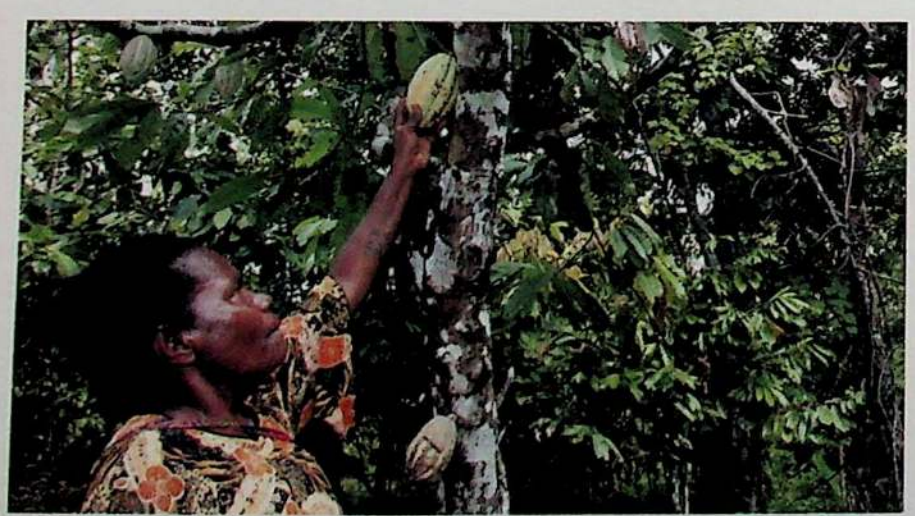
Pada tahun 2006 lalu, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2006, pemerintah daerah sempat membuat Gerakan Wajib Tanam Kakao (GWTK) untuk periode tahun 2006 hingga 2009 di 10 distrik di Kabupaten Jayapura. Pemerintah memberikan sebanyak 10,9 juta bibit Kakao kepada 12.469 petani secara bertahap (BNPM, 2012).

Target yang dicanangkan dalam GWTK adalah setiap petani diwajibkan memiliki luas lahan kakao minimal antara 1 hingga 2 hektar. Harapannya adalah hasil dari kakao ini dapat meningkatkan pendapatan petani hingga Rp 5 juta/bulan.



Di kebun-kebun milik petani, tanaman Kakao dibiarkan saja hingga tingginya bisa mencapai 6-7 meter sehingga lebih mirip seperti hutan kakao daripada kebun kakao. Padahal dalam konteks budidaya, idealnya tinggi tanaman kakao mencapai 2-3 meter saja agar mudah dipanen dan dipangkas. Selain itu masih dalam konteks budidaya, petani masih mengabaikan tehnik seperti memperhatikan jarak tanam, menjaga kebersihan kebun, terutama pada area yang berada di bawah pohon kakao. Kebersihan kebun merupakan salah satu kondisi yang harus dijaga untuk mengurangi serangan hama penyakit kakao.

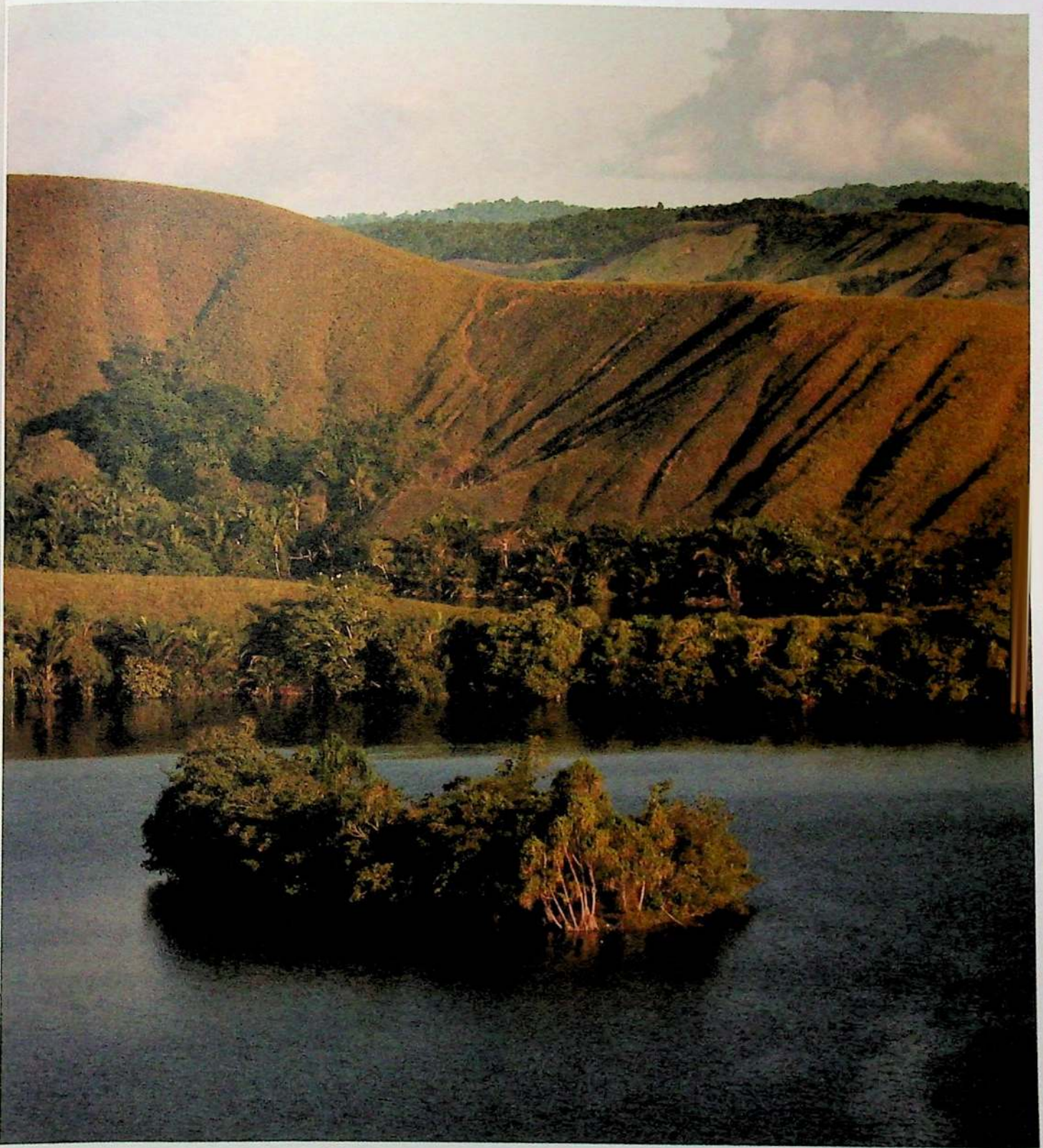
Bibit dan benih kakao pun masih terbatas, sehingga mengakibatkan terbatasnya bahan tanam kakao di lokasi-lokasi pengembangannya.

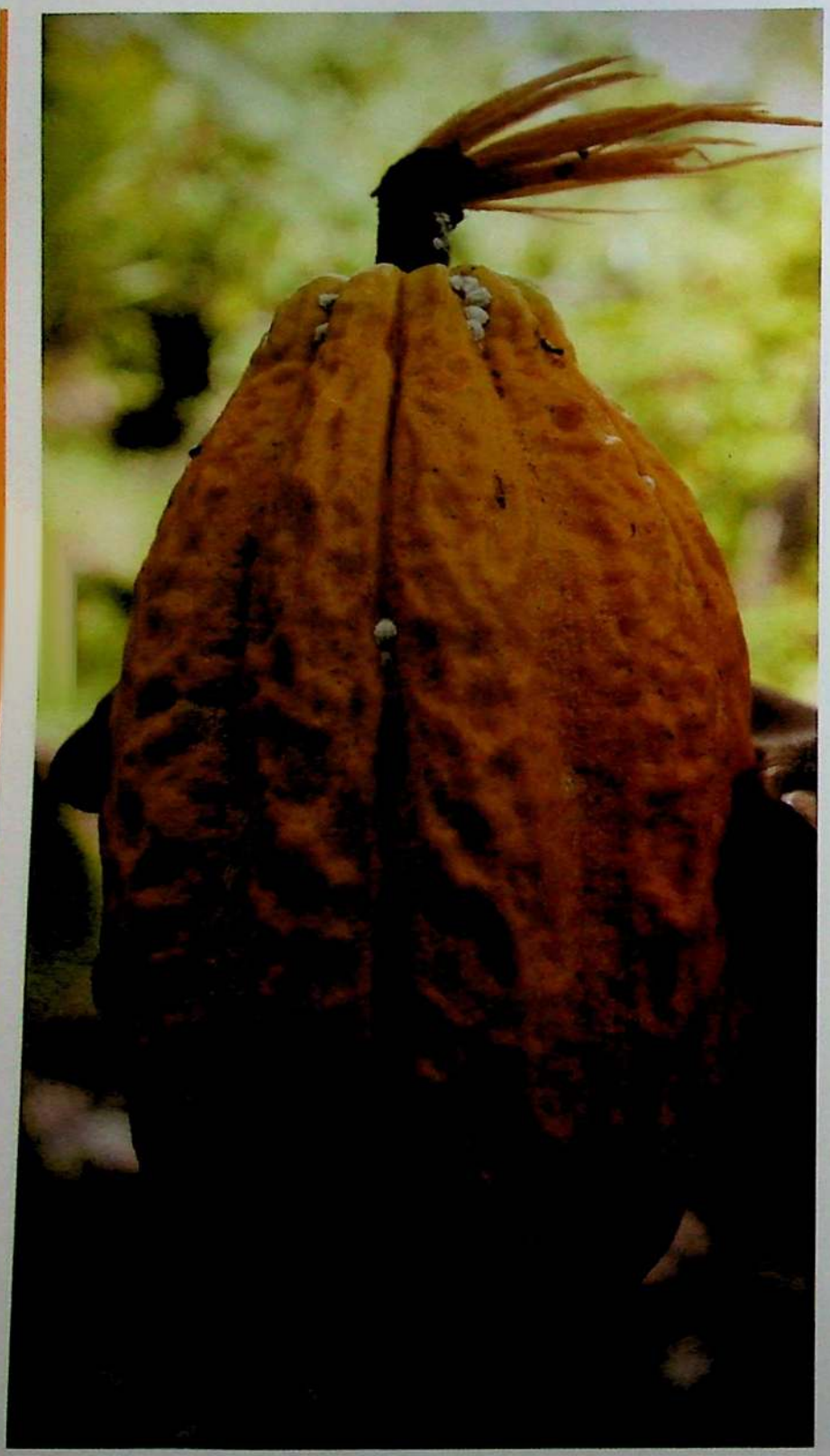


Adolof Yoku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura.

Mince Waisimon memeriksa buah Kakao di kebun Kakao di Kampung Kwansu (kiri).

Potensi Kabupaten Jayapura masih sangat besar untuk mengembangkan kakao (14/8/14).





Faktor yang paling banyak menurunkan produksi adalah faktor hama penyakit. Penyakit yang banyak ditemui antara lain adalah *Vuscular Streak Dieback* (VSD) dan Penggerek Buah Kakao (PBK) yang mengakibatkan buah busuk. Hal ini menyebabkan kakao gagal berbuah, walaupun tanaman tidak sampai mati.

Akibat penurunan produksi kakao, maka pemasaran terbatas dan jaringan pasar hanya dikuasai oleh beberapa pelaku saja. Karena kurang kompetisi, hal ini ikut mempengaruhi turunnya harga kakao yang juga ikut menurunkan pendapatan petani.

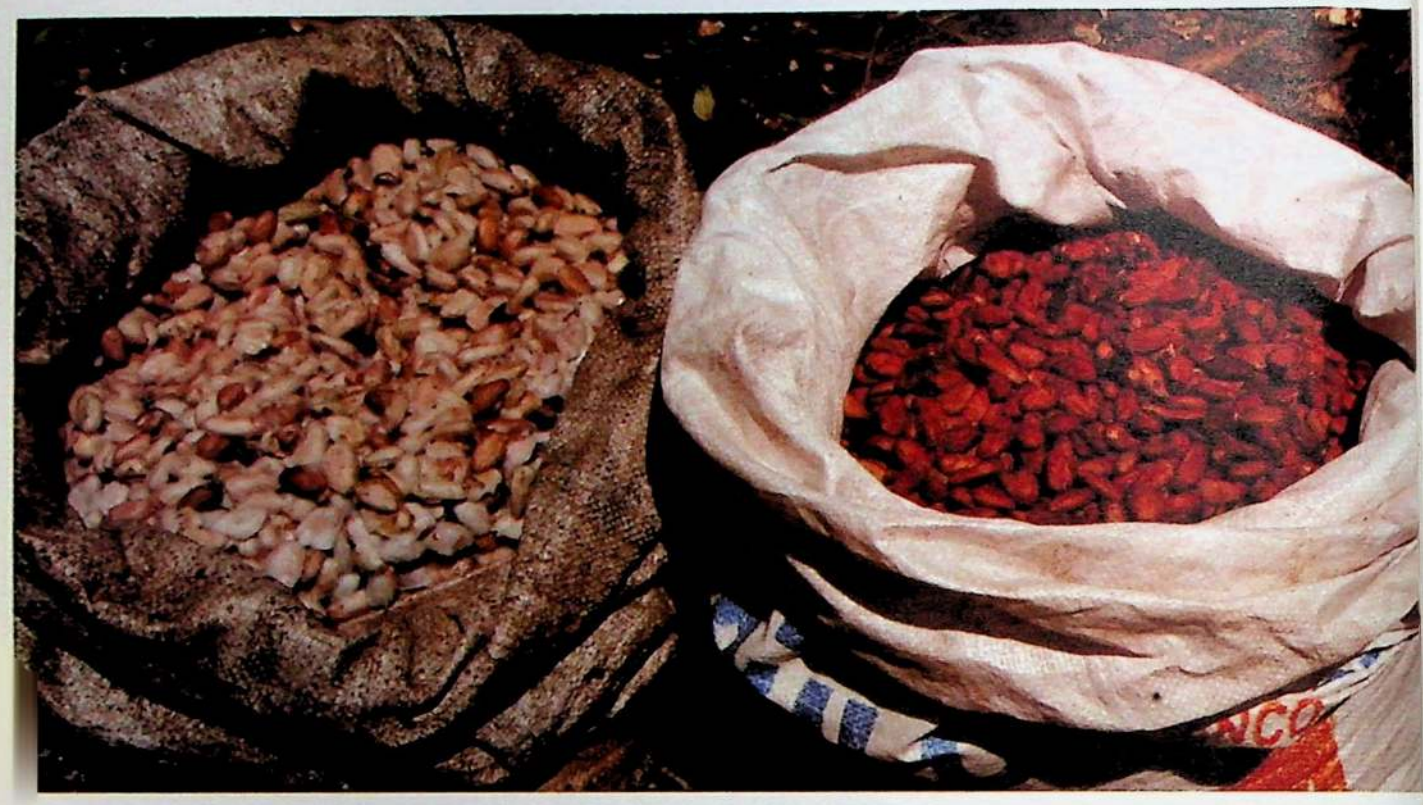
Permasalahan lain yang dihadapi yaitu produksi biji kakao yang dihasilkan mutunya beragam, misalnya kurang terfermentasi, tidak cukup kering, ukuran biji tidak seragam dan cita rasa tidak konsisten. Hal ini menurunkan harga dan daya saing biji kakao asal Indonesia di perdagangan kakao dunia.

Buah kakao siap panen (14/8/14).

Buah kakao busuk di ladang milik Melki Esau di Kwansu (bawah).







Tantangan Industri Kakao

PT. Purni Jaya Perkasa Papua, salah satu pengusaha kakao di Jayapura mengatakan bahwa saat ini belum imbang antara permintaan pasar yang tinggi dengan pemenuhannya. PT. Purni Jaya membuka komunikasi dengan para petani, mengambil biji Kakao langsung dari petani atau melalui pengumpul, tetapi upaya ini dinilai juga belum maksimal.

"Biasanya petani langsung menjual biji kakao dalam bentuk basah karena mereka membutuhkan uang tunai cepat, sehingga harga jadi lebih murah. Padahal kalau mereka jual dalam kondisi kering, harganya bisa lebih mahal," kata Enggar Winaryo, bagian Perijinan PT. Purni Jaya (13/8/14).

PT. Purni Jaya membeli biji kakao dari petani dengan harga Rp 17.000 hingga Rp 19.000 per kilogram untuk kondisi kadar air sekitar 12% dan tanpa melalui sortir biji. Sedangkan untuk biji kakao sortasi dengan kadar air 7%, harga per kilogramnya Rp 20.000.

Untuk menjemur biji kakao perlu 7 hingga 10 hari. Bagi pengumpul skala besar seperti PT. Purni Jaya, menerima biji kakao dalam bentuk basah dan tidak tersortir, berarti menambah biaya dan waktu untuk produksi.

Idealnya, perusahaan ingin menerima biji kakao dalam kondisi kering atau lebih baik jika sudah fermentasi. Fermentasi biji Kakao dimaksudkan antara lain untuk mematikan dan menghancurkan pulp, menambah aroma dan memperbaiki warna biji kakao.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, PT. Purni Jaya berusaha mendapatkan ijin untuk mengelola sekitar 928 hektar di Arso, Kabupaten Kerom. Ijin awalnya 5.500 hektar, tetapi

Biji kakao basah dan yang kering dari Hamonggrang (15/8/14).

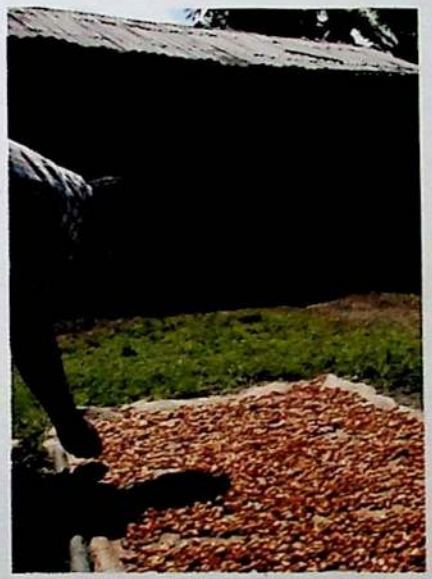
karena tidak sesuai dengan tata ruang kabupaten dan adanya pemekaran daerah, lahan yang dikelola menjadi hanya 928 hektar dengan kebun benih seluas 4 hektar.

Paulus pengumpul biji kakao di Hamonggrang, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura mengatakan, ia biasa berkeliling dengan sepeda motor untuk membeli biji kakao dari petani. Sering juga petani yang datang langsung ke rumahnya untuk mengantar Kakao. "Petani bisa antar 10-20 kilogram sehari, tapi ada juga petani yang antar hanya 5 kilogram dalam kantong plastik. Rata-rata masih dalam keadaan basah, tapi semuanya saya terima, karena saya yang akan menjemur," kata Paulus (15/8/14).

Menurut Paulus ia terbantu dengan keberadaan kelompok tani seperti Waibano di Hamonggrang, yang merupakan binaan Oxfam-KIPRa sejak tahun 2013. Ia bisa langsung mendapatkan hasil kakao dari kelompok dalam jumlah lebih besar, daripada harus mengumpulkan sendiri ke setiap petani. Namun, di Hamonggrang, pengumpul saingannya adalah kakak kandungnya sendiri yang merupakan anggota kelompok Waibano.

"Saya tidak tertarik menjadi anggota kelompok, saya ini pengumpul dan dagang saja," tegas Paulus ketika ditanya apakah dirinya tertarik untuk menjadi anggota kelompok.











Gudang milik PT Purni Jaya Perkasa di Kota Jayapura (13/8/14) dan Enggar Winaryo, bagian perijinan perusahaan (atas).

Biji kakao yang dijemur di halaman rumah Paulus (kanan), pengumpul kakao dari Hamonggrang (15/8/14).

Biji kakao yang dibawa oleh petani ke Paulus, masih basah dan belum disortir (15/8/14).

Roadmap Pengembangan Kakao

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, Adolof Yaku bercita-cita untuk terus menggerakkan dan mengembangkan kakao. Di tahun 2014 ini programnya berencana membangun 3 Unit Pengelolaan Hasil (UPH) di tahun 2014 di beberapa lokasi potensial (belum ditentukan) dengan harga Rp 240 juta/unit.

"Kami ingin ada bantuan langsung ke petani seperti penyediaan benih, pembukaan lahan baru, membeli peralatan hingga bisa menyentuh teknologi asca panen," kata Adolof. Untuk nggaran, Adolof mengatakan kan menganggarkan lewat APBD. Selain itu ia mengharapkan adanya Dana Alokasi Kampung (DAK) yang berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 1 milyar dapat membantu pemberdayaan ekonomi rakyat, termasuk bisa menunjang pengembangan kakao di tingkat desa.

Saat ini kakao dan kelapa sawit menjadi komoditas yang menyumbang pendapatan daerah terbesar di bidang pertanian dan perkebunan Kabupaten Jayapura. Menurut Adolof, di Papua potensi pengembangan kakao masih sangat besar. Lahan masih sangat luas dan perluasan kakao masih sangat memungkinkan.

Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 distrik dengan luas 4.537,9 Km², dengan jumlah penduduk 119.117 jiwa (BPS Papua, 2012). Luas area tanaman Kakao yaitu 14.588 ha, dengan produksi yang tercatat hingga Agustus 2014 yaitu 8.389 ton yang dihasilkan dari 14,762 petani. Distrik Kemtuk Gresi, Nimboran dan Kemtuk adalah tiga distrik penghasil Kakao terbesar di Kabupaten Jayapura (Data Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura, 2014)

Untuk mendorong industri kakao, Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura akan mengembangkan industri pengolahan hasil kebun di sentra produksi perkebunan dan mengembangkan budidaya bibit unggul dengan sistem plasma dengan petani.

Adolof mengatakan bahwa untuk mendapatkan gambaran komprehensif rencana pengembangan kakao di masa depan adalah dengan membuat *Roadmap* pengembangan kakao bersama para pemangku kepentingan.

"Kami berharap bisa bersama Oxfam mengembangkan *Roadmap* strategi pengembangan Kakao, bersama para pemangku kepentingan dan berbagi peran dalam menjalankan program," kata Adolof.

Benih kakao siap tanam (14/8/14). Pohon Kakao bisa dipanen setelah berumur tiga tahun, dalam masa produktif, petani kakao bisa panen tanpa mengenal musim.



Program Oxfam dapat menjadikan rencana pembangunan yang ada di Kabupaten Jayapura sebagai acuan dalam membuat perencanaan program, sehingga akan lebih memperkuat sinergi dalam mencapai tujuan peningkatan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, Adolof berharap agar pendampingan petani seperti yang telah dilakukan oleh Yayasan KIPRa dan Oxfam terus dapat dilakukan. Dari sisi pemerintah, menurut Adolof jumlah PPL yang ada belum memadai dan belum menyentuh pendampingan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Yayasan KIPRa dan Oxfam.

Dari sisi pengusaha, Enggar Winaryo dari PT. Purnijaya, pendampingan petani masih sangat dibutuhkan.



Pertemuan Oxfam PEDP dengan Adolof Yaku di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jayapura (13/8/14)

Matius Daka, fasilitator Hamonggrang dan Qarinilwan Ishaq, Project Manager PEDP Oxfam (15/8/14) (bawah).



"Kami tidak memiliki kemampuan untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat petani kakao seperti yang dilakukan oleh Yayasan KIPRa dan Oxfam," kata Enggar yang berharap agar pendampingan petani kakao secara lebih foku dan intensif masih terus dapat dilakukan di daerah-daerah produksi kakao.

Menurut Isak Usmani, program pendampingan Oxfam dan KIPRa ini berbeda dari program yang pernah ia ikuti di kampungnya di Kwansu.

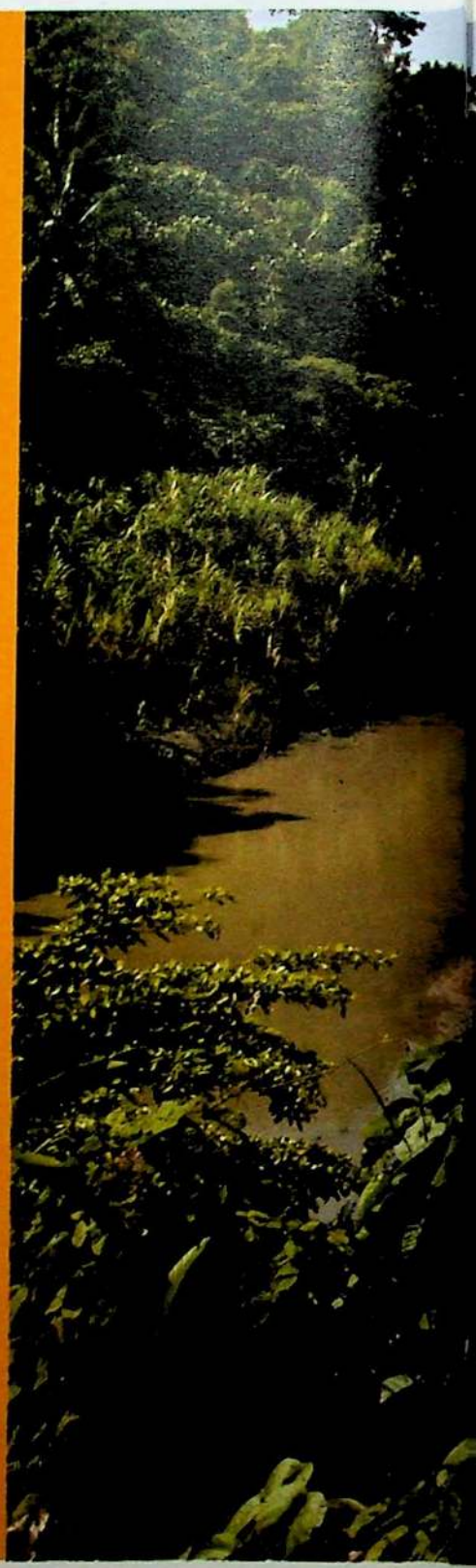
"Biasanya sebelum ini, program yang masuk ke kampung kami lebih singkat, baru datang sudah ditinggal. Program Oxfam-KIPRa ini lebih intensif, langsung mendampingi hingga ke lapangan. Ada sekolah lapang dan kami didampingi hingga bisa praktik," kata Isak.

Pasang Surut Sebuah Kemitraan

Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRa) telah menjadi mitra Oxfam pada periode 2012 hingga Maret 2014 untuk program *Building and Deepening Resilience* (BDR) *in Eastern Indonesia* di Papua. Sedangkan dalam konteks *Economic Justice* untuk peningkatan pendapatan dan pengembangan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan di Papua, Yayasan KIPRa bermitra dengan Oxfam sejak akhir tahun 2011 dalam *Papua Enterprise Development Programme* (PEDP).

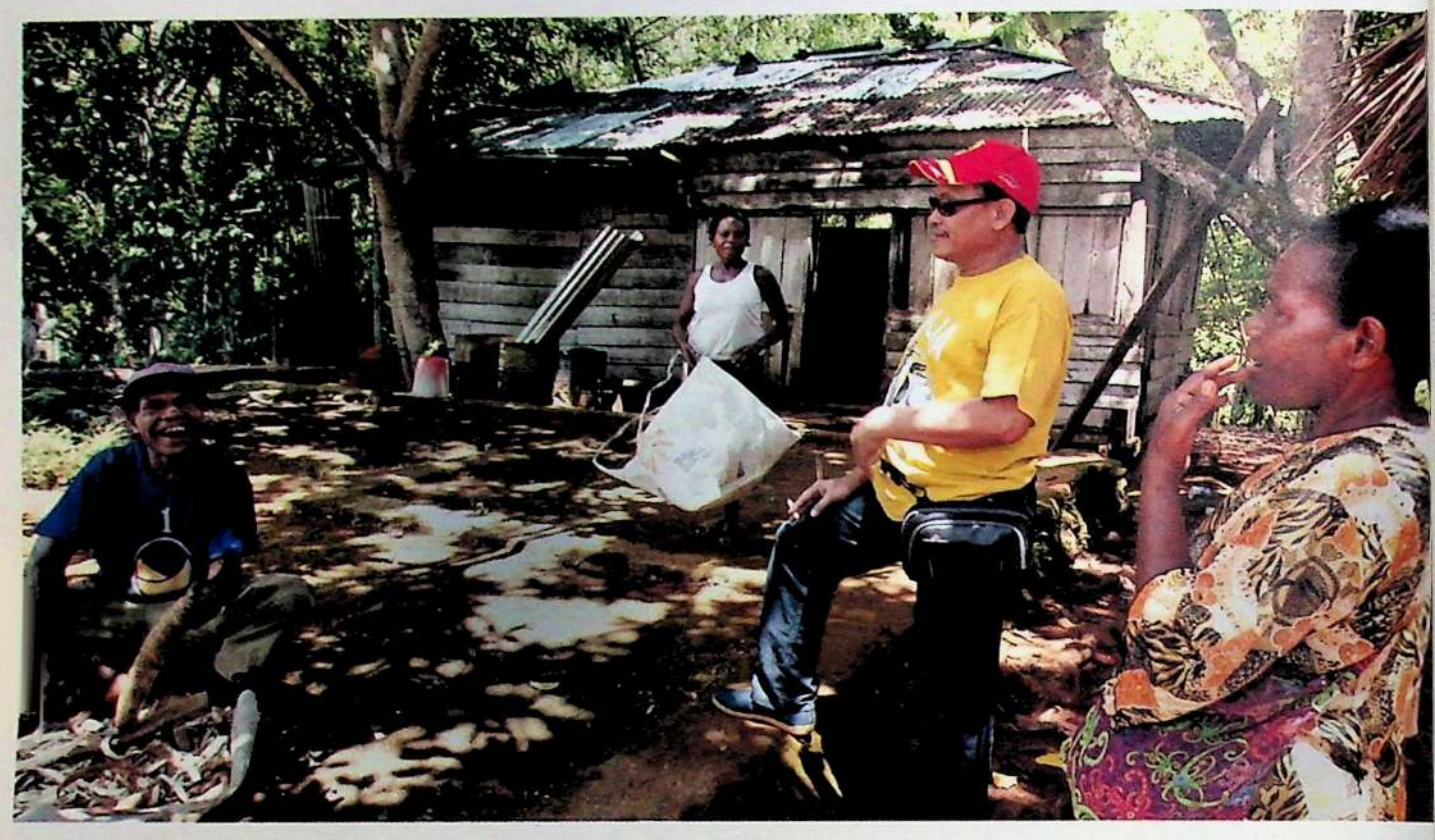
Yayasan KIPRa didirikan pada tanggal 2 Juli 1999 di Jayapura, Papua. "Staf yayasan sebagian besar adalah tenaga asli dari Papua dengan tujuan untuk mencetak tenaga kerja yang lebih siap pakai dan dapat menjadi konsultan lokal bagi program pembangunan di Papua," kata Kuncoro Samiyana, salah satu pendiri Yayasan KIPRa di kantornya (13/8/14).

Yayasan KIPRa aktif terlibat dalam kegiatan advokasi, ekonomi mikro dan usaha berdampak langsung pada peningkatan sumber daya manusia, dan fasilitasi serta memanfaatkan ikatan adat sebagai basis pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Yayasan ini juga bermitra dengan berbagai lembaga nasional dan internasional serta program pemerintah.



Sungai Grime yang melintasi Hamonggrang dan Kwansu. Kebun kakao milik warga berada di sisi kanan kiri sungai ini (15/8/14).





Restorasi Kakao

Pada awal program PEDP, Oxfam meminta KIPRa untuk membuat *assessment* untuk daerah produsen kakao. Yayasan KIPRa memilih Hamonggrang dan Kwansu sebagai dua daerah penghasil kakao di Kabupaten Jayapura.

"Hamonggrang dan Kwansu ini menurut kami unik, karena meski letaknya berbatasan dan berdekatan, tetapi kedua daerah ini berada pada dua distrik yang berbeda dengan budaya yang berbeda pula. Kampung Kwansu, misalnya adalah kampung lama, namun perkembangan kakao-nya sangat lambat dibanding Hamonggrang, jadi kami coba melihat apa yang terjadi di sana," kata Kuncoro.

Dengan otonomi khusus yang diberikan pada Provinsi Papua, maka banyak program bantuan langsung yang masuk langsung ke daerah-daerah, termasuk Hamonggrang. Menurut Eduard Agaki, Kepala Divisi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintah Lokal Yayasan KIPRa hal ini ada positif dan negatifnya.

"Sisi positifnya, masyarakat di Hamonggrang lebih artikulatif dan berani bicara mengemukakan pendapatnya. Mereka lebih terbuka terhadap program pembangunan. Tapi sisi negatifnya adalah petani di Hamonggrang lebih sibuk ikut berbagai pertemuan daripada mengurus ladang," kata Eduard. Salah satu yang dilakukan KIPRa dalam mendampingi masyarakat adalah memotivasi agar kelompok bisa lebih fokus dan membuat perencanaan waktu.

Kemitraan Yayasan KIPRa dengan Oxfam dalam PEDP dimulai pada akhir 2011 untuk "Program Restorasi Kakao". Ada 70 petani yang

Kuncoro bersama Melki Esau dan Mince Waisimon di Hamonggrang (14/8/14).

didampingi Yayasan KIPRa sejak tahun 2012 di Hamonggrang dan Kwansu. Tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui budidaya kakao.

Yayasan KIPRa melakukan identifikasi dan pengenalan budaya dan karakter masyarakat dampingan. Lalu dari sosialisasi awal, terlihat apakah program bisa dijalankan atau tidak. Ketika datang kembali ke Hamonggrang dan Kwansu pada awal tahun 2012, KIPRa melihat bahwa masyarakat di kedua kampung ini bersedia untuk kembali membudidayakan kakao secara lebih serius.

"Kebun milik masyarakat itu tersebar dan rata-rata sulit dijangkau. Di beberapa lokasi, kami harus melewati sungai yang banjir kalau musim hujan, sehingga baik kami dan petani tidak bisa pergi ke ladang. Ladang pun sering terendam karena banjir," kata Steve Lewerissa, Manajer Proyek KIPRa.

Di dalam rancangan program, staf Oxfam untuk program PEDP bertugas menjadi pendamping dan kontak utama bagi mitra di dalam pelaksanaan program di lapangan. Staf ini bukan hanya berperan dalam manajerial dan kemitraan semata, namun juga harus memahami kondisi lapangan dan masyarakat dampingan bersama mitranya.

Pasang Surut Sebuah Kemitraan

Di mata Yayasan KIPRa, kemitraan dengan Oxfam memberikan kesempatan untuk menerapkan konsep di dalam sebuah pelaksanaan program. Kemitraan ini juga memberikan akses bagi lembaga untuk berjejaring, bertukar informasi dan memperkuat kapasitas melalui berbagai pelatihan termasuk studi banding ke daerah lain.

"Saya melihat Oxfam sudah berusaha membangun mitranya dan sudah berupaya membangun pola kemitraan yang baik. Interaksi dengan Oxfam ini menjadi pengalaman berharga ketika kami bekerja dengan donor lain, terutama di dalam pengembangan kapasitas dan pelaporan," kata Eduard.

Di sisi lain, dalam kemitraan ini tidak luput dari perbedaan pandangan. Hal ini terjadi terutama dalam melaksanakan kegiatan yang perlu dilakukan di lapangan. Mitra seringkali dianggap kurang cepat bereaksi terhadap permintaan dan kebutuhan program. Sedangkan di mata mitra, kadang perbedaan dalam hal memandang ini berujung pada situasi "berjalan masing-masing".

Tentang ahli yang dilibatkan dalam program, Yayasan KIPRa berpendapat agar sebaiknya Oxfam mencari tenaga lokal terlebih dahulu, atau mendiskusikan rencana kegiatannya terlebih dulu dengan mitra. Biasanya tenaga ahli diperbantukan dalam jangka waktu singkat. Kekhawatiran Yayasan KIPRa adalah produk dari tenaga ahli tersebut tidak bisa digunakan di level pelaksanaan program di lapangan, karena kurangnya pemahaman terdapat konteks budaya dan sosial setempat.



Pertemuan di kantor Yayasan KIPRa (13/8/14), yang berlokasi di Jl. Bosnik No. 15 BTN Umum KAMPKEY, Abepura. (dari kiri ke kanan) Kuncoro Samiyana, Steve Lewerissa dan Eduard Agaki.



Sebagai mitra, Yayasan KIPRa juga berpendapat bahwa kadang membingungkan untuk membedakan mana program yang dikelola oleh mitra, Oxfam sendiri atau yang dikelola bersama. Keterlibatan staf Oxfam langsung di lapangan awalnya menjadi masalah, karena dianggap terlalu masuk ke ranah yang dikerjakan oleh mitra. Namun anggapan ini berubah ketika mitra menyadari bahwa hal itu memang diperlukan dan membantu pelaksanaan program. Selain itu di tingkat desa, baik mitra dan Oxfam dikenal masyarakat sebagai gabungan kegiatan bersama dan bukan kegiatan yang terpisah.

Menghadapi situasi pasang surut ini, di mata mitra meningkatkan komunikasi dan koordinasi adalah sebuah alternatif solusi. Karenanya Yayasan KIPRa berharap agar Oxfam juga bersedia berkantor lebih sering di kantor yayasan agar lebih mudah berkomunikasi.

Yayasan KIPRa dan staf Program PEDP Papua bersama kelompok kakao di Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura (14/8/14)

Papua Enterprise Development Programme (PEDP)

Oxfam dan mitra melaksanakan *Papua Enterprise Development Programme* (PEDP) sejak tahun 2011 hingga 2014. Program ini dilaksanakan di lima kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kepulauan Yape yang melibatkan 5.525 penerima bantuan.

Secara umum tujuan utama dari PEDP adalah untuk meningkatkan hak-hak dasar penduduk asli Papua, baik laki-laki maupun perempuan, melalui peningkatan pendapatan dan pengembangan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Program Oxfam ini merupakan kombinasi dari pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui kerjasama bisnis yang mumpuni antara mitra dengan masyarakat asli Papua. Salah satu dari empat hasil programnya adalah untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Papua.

Dalam pelaksanaan PEDP, Oxfam bekerja sama dengan mitra lokal yang fokus pada 5 komoditas berbeda yakni:

1. **Proyek kopi Arabika Moanemani**
   Mitra : Perkumpulan PAME Mandiri
   Penerima bantuan : 244 petani
   Lokasi : Deiyai, Paniai and Dogiyai, Kabupaten Nabire

2. **Ubi jalar**
   Mitra : YAPUM
   Penerima bantuan : 5.124 petani
   Lokasi : Kabupaten Jayawijaya

3. **Kios, vanili dan sayuran**
   Mitra : WMV
   Penerima bantuan : 87 petani
   Lokasi : Serui, Kabupaten

4. **Restorasi Kakao**
   Mitra : Yayasan KIPRa
   Penerima bantuan : 70 petani
   Lokasi : Kampung Hamonggrang, Distrik Kabupaten Jayapura, Kampung Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura

Para Mama Petani Kakao dari Hamonggrang

Siang hari di Kampung Hamonggrang, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura (15/8/14). Carolina Sanggrangbano atau Mama Carolina memeragakan tehnik "sambung samping". Ia menggunakan teknik yang ia sebut "teknik segi tiga". Tujuannya untuk peremajaan tanaman kakao yang sudah tua tanpa harus membongkar tanaman, dengan menumbuhkan tunas baru lewat teknik penyambungan batang pohon dengan entres baru.

Dengan hati-hati Mama Carolina membuat sayatan pada batang pohon kakao sekitar 50 cm dari tanah. Entres (cabang untuk stek tanaman Kakao) yang juga telah disayat lalu disambungkan ke bagian sayatan pohon induk, ditekan lalu diikat.

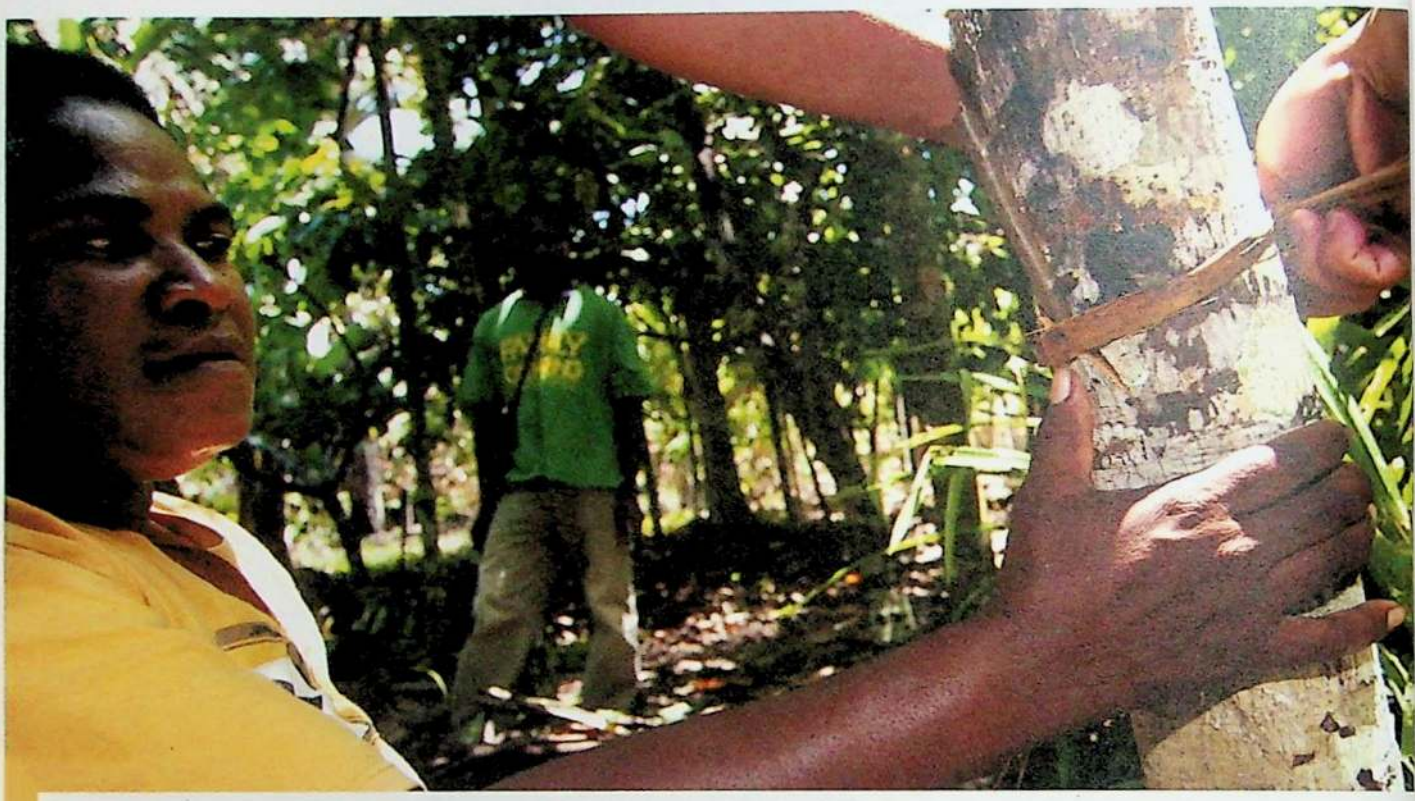
"Nanti kita tutup dengan plastik selama dua tiga minggu, lalu kita buka untuk lihat apakah sambungan berhasil atau tidak," kata Mama Carolina, yang belajar tehnik ini dari Sekolah Lapang Oxfam-KIPRa pada tahun 2013 lalu.

Tak kalah semangat Orpa Andoi atau Mama Orpa menunjukkan tehnik lain yang ia pelajari, yaitu "sambung pucuk", salah satu tehnik perbanyakan tanaman kakao dengan cara vegetatif.



Sebagian anggota kelompok Waibano. Dari kiri ke kanan. Carolina Sanggrangbano, Orpa Andei ,Yuliana Yekusamon, Oktovina Sanggrangway dan Alfonsina Sanggrangbano di Hamonggrang (15/8/14).


PARIS
2004

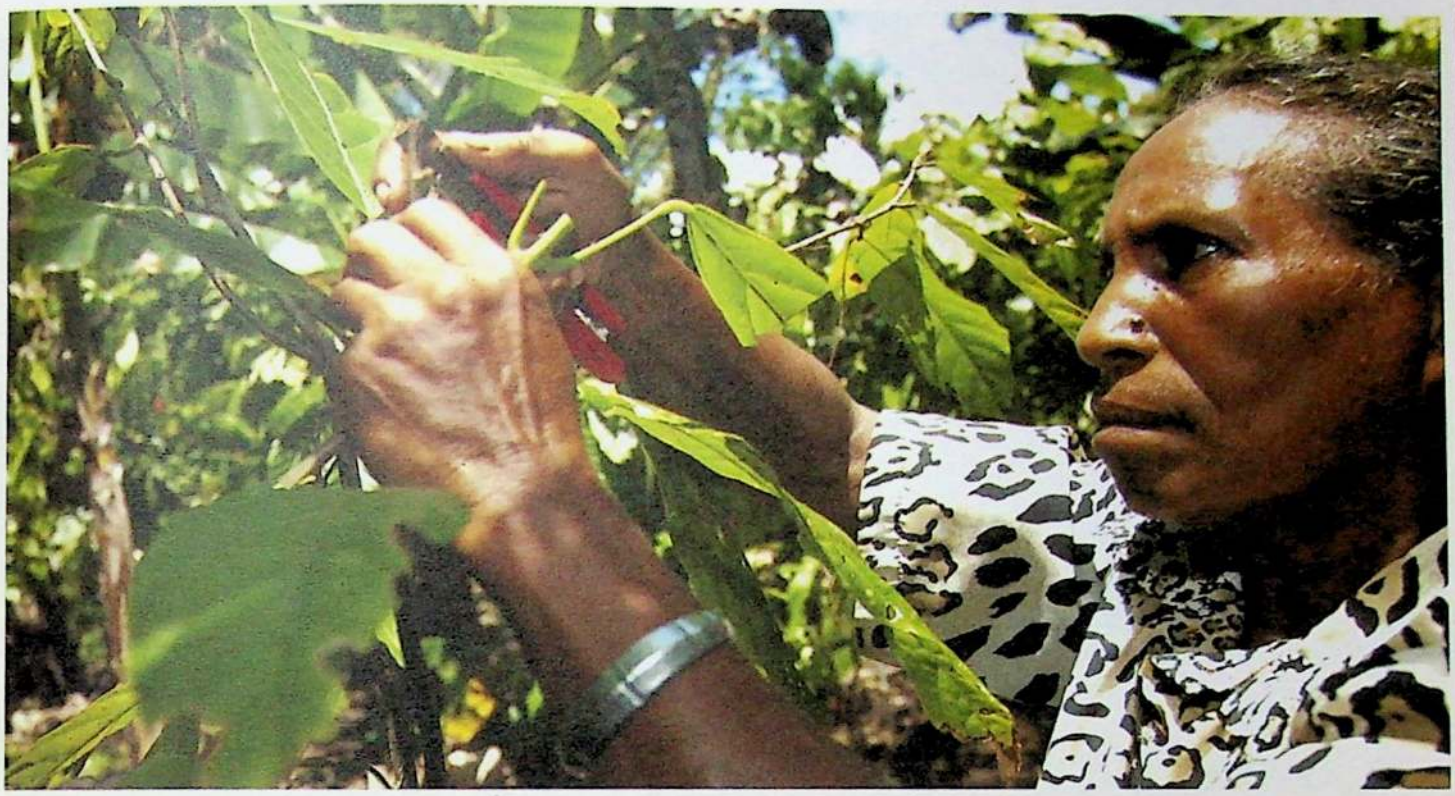


Awalnya saya coba di kebun sendiri belum berhasil, tapi saya coba terus. Dulu saya tidak bisa sambung samping atau sambung pucuk, sekarang bisa semua," kata Mama Orpa yang memiliki enam orang anak ini. Anaknya yang paling besar sudah berumur 22 tahun dan sudah bekerja, sedangkan yang paling bungsu masih berumur 6 tahun.

Teknik sambung samping "segi tiga" ini juga dibagikan Mama Orpa kepada petani di Jembrana, Bali ketika Orpa mengikuti pelatihan tani di Jembrana pada April 2014 lalu. Pelatihan ini merupakan bagian dari PEDP Oxfam.

"Di kebun milik Pak Agus (Jembrana), petani di sana pakai teknik sambung kotak, saya tunjukkan teknik yang segi tiga ke mereka. Mereka bilang tehnik yang segitiga ini lebih praktis, hasilnya lebih bagus," kata Mama Orpa dengan bangga.

Carolina Sanggrangbano menunjukkan tehnik sambung samping di Hamonggrang (15/8/14).



Kelompok Matahari dan Bulan

Baik Mama Carolina dan Mama Orpa adalah anggota kelompok Waibano di Kampung Hamonggrang. Kelompok Waibano terbentuk pada bulan Maret 2013, anggotanya terdiri dari 22 petani, 11 laki-laki dan 11 perempuan. Nama Waibano dipilih karena artinya adalah Matahari dan Bulan. Kelompok ini terdiri dari dua suku besar yang ada di Hamonggrang, yaitu suku Sanggrangwai dan Sanggrangbano. Di Kampung Hamonggrang yang berpenduduk sekitar 75 KK atau 300 jiwa ini rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, dengan luasan tanaman kakao sekitar 1.175 hektar (KIPRa, 2013).

Yayasan KIPRa mendampingi dua desa yang jaraknya sekitar 1 kilometer satu sama lain. Dua kampung ini berbatasan namun beda distrik, yaitu Kampung Hamonggrang (Distrik Nimbokrang) dan Kampung Kwansu (Distrik Kemtuk). Kedua kampung ini terletak sekitar 85 kilometer dari Kota Abepura mengitari Danau Sentani.

Di kedua kampung ini, masyarakat dampingan bias menyebut "Oxfam-KIPRa" bagi para pendamping yang datang ke lapangan. Selain pendamping, di dua kampung tersebut ada tiga fasilitator kampung, yaitu Manus Daka, Derek Bano dan Agus Trapen yang juga merupakan warga dari dua kampung tersebut. Fasilitator ini adalah petani, sehingga bisa sama-sama mempraktikkan apa yang mereka pelajari bersama petani dampingan.

Orpa Andoi menunjukkan teknik sambung pucuk (15/8/14).



Selama masa pendampingan, kelompok membuat jadwal kerja kelompok, penyiapan lahan dan bibit kakao, belajar teknik budidaya dan mencatat panen hingga belajar merencanakan pemasaran. Selain itu kelompok dampingan juga mengikuti Sekolah Lapang selama enam kali pertemuan. Satu kali pertemuan dilakukan dalam dua hari bertempat di Kampung. Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BP4K) juga ikut dalam pendampingan terutama dalam hal teknis budidaya.

Di Hamonggrang, kelompok secara bergiliran bekerja di kebun milik anggotanya selama dua kali seminggu, yaitu setiap hari Kamis dan Sabtu selama dua jam, yaitu dari jam 8 hingga jam 10. Pekerjaan gotong royong kelompok antara lain membersihkan kebun, membuat lubang kecil di sepanjang jalur penanaman kakao untuk memasukkan daun-daun yang jatuh ke dalam lubang tersebut. Sumber airnya berasal dari sumur gali sedalam 3-4 meter atau mengambil air dari sungai.

"Di sini laki-laki dan perempuan pekerjaannya hampir sama. Kita sama-sama menanam dan merawat ladang, tapi kalau urusan buka ladang biasanya urusan laki-laki," Kata Mama Carolina. Kelompok juga memberlakukan iuran. Setiap pembersihan ladang yang dilakukan kelompok ada iuran Rp 2.000/orang. "Tetapi kalau anggota tidak datang, maka terkena kena biaya sangsi Rp 5.000," tambah Mama Carolina.

Panen kakao ditandai dengan berubahnya warna biji kakao menjadi kuning atau merah, tergantung jenisnya. Dalam sebulan bisa panen tiga hingga empat kali, dengan rata-rata panen bisa mencapai 50 kilogram atau bahkan 100 kilogram jika hasil baik.

Carolina Sanggrangbano membersihkan daun gugur di bawah pohon kakao, Hamonggrang (15/8/14)

Ladang Pangan

Selain kakao, anggota kelompok memiliki aneka tanaman di ladangnya, seperti kayu, pinang, sirih, ubi-ubi-an, kacang tanah, kacang panjang, bawang dan cabai atau yang disebut para Mama ini sebagai Rica.

Hasil kebun ini dijual ke pasar selama dua minggu sekali. Untuk menghemat ongkos, anggota kelompok pergi ramai-ramai ke pasar menyewa angkutan umum dengan harga Rp 40,000/orang dengan barang.

"Saya mendapat Rp 500.000 sampai Rp 1 juta dari penjualan hasil kebun. Saya belikan kebutuhan seperti beras, sabun dan ikan, lalu buat bayar anak sekolah dan sisanya ditabung di Bank BRI keliling," kata Oktovina Warisu.

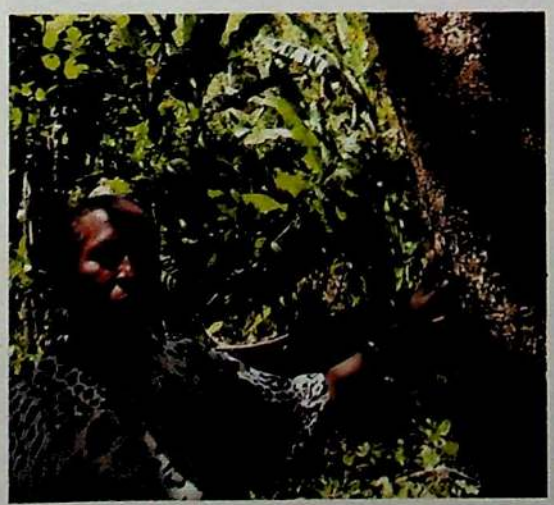
Di ladang juga ada pohon sagu. Namun memanen pohon sagu tidak bisa setiap saat. Umur sagu siap panen bisa di atas enam tahun. Menurut para Mama ini, tanda sagu siap panen jika daunnya sudah pendek dan berbunga. Satu pohon sagu bisa menghasilkan tepung berkisar antara 10-12 karung berukuran 15 kilogram atau bervariasi antara 50 kilogram hingga 450 kilogram tepung sagu basah.

Sekali panen, warga biasanya hanya menebang dua hingga tiga pohon. Sagu diambil dengan cara dipotong dengan mesin atau cara tradisional yang disebut tokok atau mengetukkan batang sagu dengan tongkat kayu.

Satu karung sagu bisa untuk konsumsi keluarga selama tiga bulan. Sisanya dijual dengan harga Rp 150.000 hingga Rp 200.000. Bagi masyarakat Papua, sagu ini dulu adalah pangan utama sebelum beras. Sebagai sumber karbohidrat, sagu mengandung protein, lemak, kalsium dan zat besi yang tinggi. Sagu dimasak menjadi Papeda (sagu kental) dan dimakan dengan lauk ikan dan sayur.

Anggota kelompok juga menanam pohon Melinjo. Bagi Mama Orpa dan perempuan kelompok Waibano, Melinjo adalah bahan baku untuk membuat Noken, tas terbuat dari serat kayu yang dianyam. Serat dari pohon Melinjo termasuk favorit Para Mama untuk membuat Noken ketika senggang. Noken ini terkadang dijual dengan harga bervariasi antara Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

Orpa Andoi menunjukkan pohon sagu yang ada di kebun Kakao di Hamonggrang.



Kelompok Waibano belajar teknik perbanyakan vegetatif tanaman Kakao dari Sekolah Lapang Oxfam-KIPRa tahun 2013 lalu (15/8/14).




FAMILY
GATHERING



Masih Perlu Pendampingan

Sebelum Oxfam-KIPRa datang ke Kampung Hamonggrang, menurut Mama Orpa, kelompok sudah pernah mendapatkan dampingan dari LSM lain selama lima tahun.

"Tapi kami baru belajar dan praktik budidaya seperti sambung pucuk dan sambung samping ketika didampingi Oxfam-KIPRa. Hasil panennya sekarang lebih banyak," kata Mama Orpa. Menurutnya yang paling ia senangi dari pendampingan ini adalah banyaknya kesempatan belajar melalui sekolah lapang dan pelatihan di luar Papua.

"Panen kakao ini sekarang sedang turun karena tanaman kena penyakit," kata Alfonsina Sanggrangbano. "Biasanya bisa dapat antara 10 hingga 30 kg biji kakao kalau panen, tetapi sekarang berkurang hanya dapat 5-10 kg," tambahnya lagi. Dari penjualan kakao basah, Mama Alfonsina mendapatkan uang bervariasi antara Rp 85.000 hingga Rp 561.000 tergantung hasil panen.

Biji kakao ini dikumpulkan secara kelompok untuk dijemur atau langsung dijual ke pengumpul. Salah satu anggota kelompok Waibano, Toni Sanggrangway adalah pengumpul. Ia membeli satu kilogram kakao basah milik kelompok dengan harga Rp 5.000/kg. Namun untuk biji kakao kering, harganya menjadi Rp 20.000/kg. Anggota kelompok menjual hasil panen kakao bisa dalam keadaan basah atau kering, biasanya tergantung kondisi keuangan saat itu. Kalau keuangan mendesak, maka anggota kelompok menjual biji kakao basah agar cepat mendapatkan uang tunai.

Kelompok Waibano juga telah membuat tempat penjemuran kakao dengan ukuran 6 x 4 meter yang dapat menampung sekitar 100 kilogram kakao. Bahan baku seperti kayu besi, bambu diambil dari hutan. Kelompok hanya mengeluarkan uang untuk membeli paku dan membayar tenaga kerja.

"Kami masih perlu pendampingan sampai benar-benar mandiri. Kami ingin bisa menambah lahan, dan kalau bisa sampai membuat Cokelat sendiri seperti Pak Made (dosen yang menggagas pembuatan Cokelat organik asal Papua dan membuat mesin-Red)," kata Mama Orpa. Selain itu harapannya agar ia dan kelompok bisa mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan produksi kakao juga bisa dikirim pelatihan ke luar Papua.

Berbeda dengan Mama Orpa, Alfonsina ingin ada ahli kakao yang bisa datang dan tinggal di kampungnya. "Jadi kita semua bisa belajar dari ahli itu dan bisa lebih hemat uang belanja," kata Alfonsina.

Matius Daka, fasilitator Hamonggrang, menunjukkan lokasi untuk praktik Sambung Samping Kakao kepada Mama Carolina (atas).

Orpa Andoi menunjukkan lokasi penjemuran kakao milik kelompok Waibano di Hamonggrang (15/8/14).

Tentang Kakao, Budaya dan Pembangunan

Melki Esau Waru adalah petani kakao anggota Kelompok Mabuma II, salah satu dari dua kelompok dampingan Oxfam-KIPRa di Kampung Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura sejak tahun 2012.

Jadwal sehari-sehari Melki adalah mengurus kebun kakao yang terletak sekitar 1,5 kilometer dari kampungnya, yang ia tempuh dengan berjalan kaki. Sejak ada kelompok, anggotanya bergotong royong bekerja di kebun milik anggota lain secara bergantian dan bergotong royong. Jadwalnya seminggu dua kali dari jam 9 hingga jam 12. Pemilik kebun akan menyediakan makanan bagi anggota kelompoknya. "Dengan gotong royong jadi lebih mudah urus kebun, karena lebih banyak tenaga," kata Melki yang juga merupakan ketua kelompok Mabuma I. Dari hasil kakao, Melki bisa menyekolahkan dua anaknya hingga ke perguruan tinggi di Jayapura.

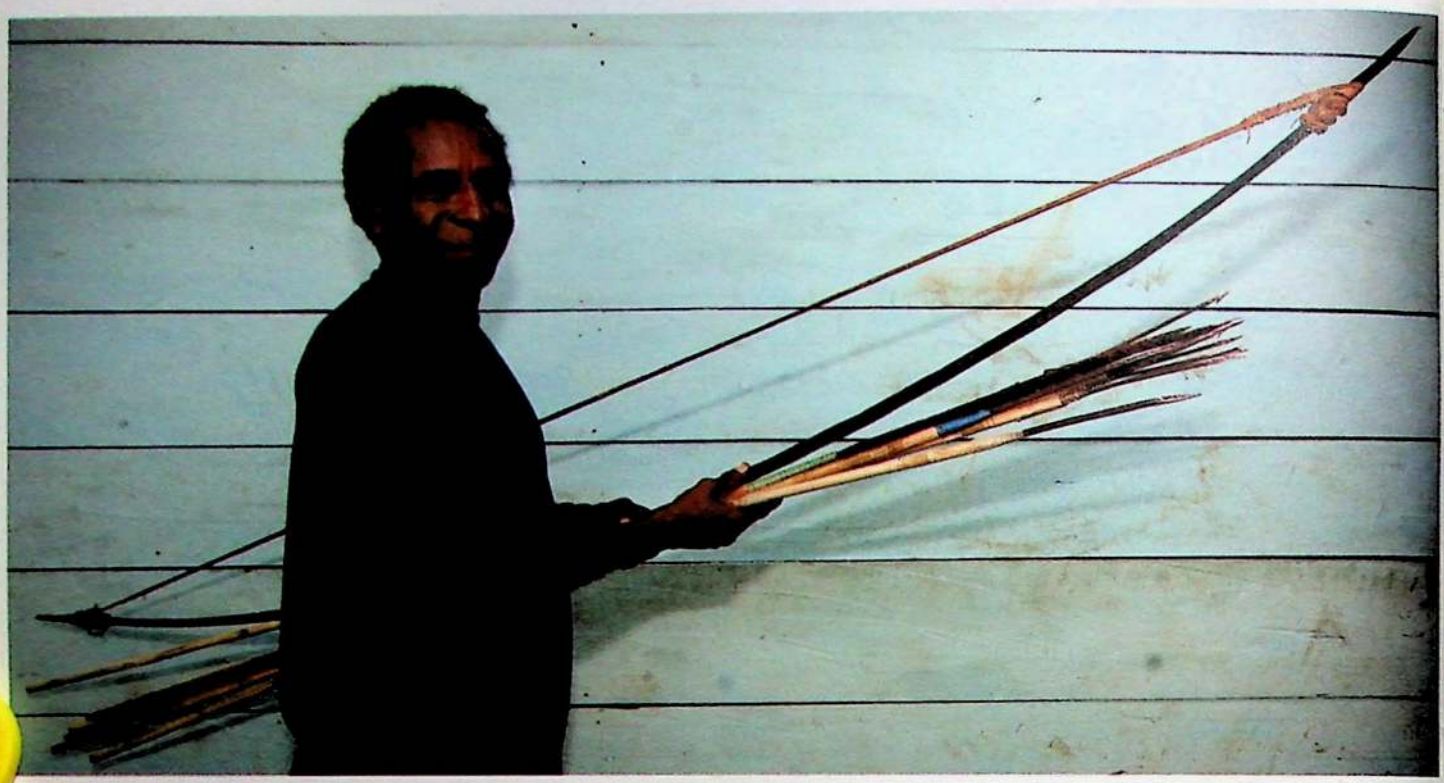
Jika di siang hari Melki mengurus kebun, maka malam hari adalah waktunya berburu di hutan di dekat kebunnya. Melki memiliki tiga buah panah dan satu tombak yang ia buat sendiri. Hasil buruannya beranekaragam, dari Kalelawar, tikus besar hingga rusa, babi hutan, Wallabi (sejenis kangguru asal Papua) dan Kasuari. "Kasuari yang paling lucu, kalau bertemu manusia bukannya lari malah memasukkan kepalanya ke dalam tanah jadi mudah ditangkap," cerita Melki sambil tertawa.

Hasil buruannya itu sebagai tambahan lauk bagi keluarganya, sekaligus bagi Melki juga mengurangi gangguan hama di kebunnya, terutama babi hutan dan tikus. Setiap berburu, Melki selalu mengajak anjingnya. Menurutnya, memiliki anjing sangat penting, karena bisa membantunya berburu.



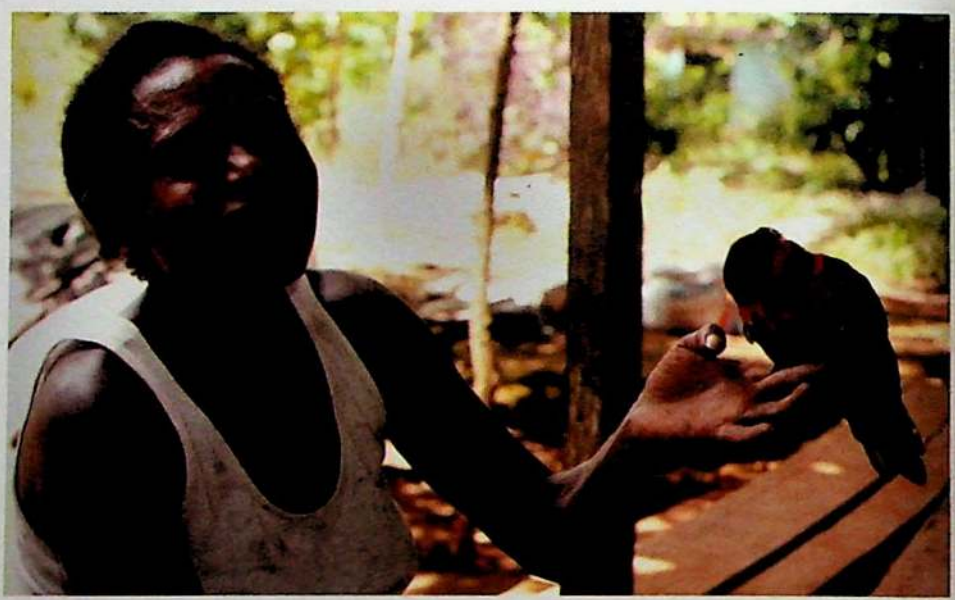
Melki Esau Waru menunjukkan pohon kakao miliknya di Kwansu (14/8/14)





Ketika dibentuk pada tahun 2012, kelompok Mabuma I beranggotakan 26 orang dimana 9 orang anggotanya adalah perempuan. Sedangkan Kelompok Mabuma II anggotanya ada 20 orang dengan 7 anggota perempuan. "Tapi yang benar-benar aktif tinggal 10 orang saja, entah mengapa berkurang satu-satu," kata Melki. Penduduk Kwansu ada 47 KK atau 400 jiwa. Luas lahan kakao di kampung ini sekitar 1.537 hektar. (KIPRa, 2013)

Mince Waisimon sejak tahun 1960 sudah tinggal di Kwansu, setelah ayahnya yang berasal dari Genyem meninggal, Mama Mince dan ibunya kembali ke Kwansu. Sejak dulu Mince sudah biasa bertani, menanam



Melki Esau Waru menunjukkan panah dan tombak buatan sendiri di Kwansu (atas)

Elisabeth Yaram menunjukkan burung Nuri hasil tangkapan dari hutan dekat rumahnya di Kwansu. (14/8/14)





Untuk berladang dan merawat kebun kakao, Mama Mince dibantu oleh anak dan menantunya Siana Yaroserai dan Oktovina Yowi (14/8/14).

Rifka Kwano memanen kacang tanah di ladangnya di Kwansu (bawah).

kacang tanah dan umbi-umbian. Keluarganya juga memiliki kebun kakao, namun budidayanya menurut Mama Mince seadanya saja. Tanaman kakao milik rata-rata warga di Kampung Kwansu ini sudah sejak 1980. Hama penyakit kakao adalah hal yang paling dikhawatirkan Mama Mince, karena membuat hasil panennya menurun. Karenanya, Mama Mince tidak menggantungkan seluruh penghasilannya pada kakao semata.

"Selain kakao, kami juga menanam tanaman pangan lain seperti keladi (talas), rica (cabai), tomat, kacang hijau aneka sayuran. Tujuannya menambah pendapatan, selain juga untuk dimakan sendiri," kata Mama Mince.

Ladang adalah tempat aneka tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sisanya baru dijual ke pasar Sentani yang terletak 1 jam dari Kampung Kwansu dengan ongkos Rp 60,000 untuk orang dan barang. Sekali ke pasar, Mama Mince bisa mendapat Rp 500.000 hingga Rp 1 juta. Uangnya dibelikan kebutuhan keluarga, termasuk untuk membiayai cucunya sekolah. Mama Mince memiliki 7 anak dan 6 cucu. Dua anak bungsunya adalah perempuan yang sedang kuliah di Jayapura.

Kalau sedang tidak bekerja di ladang, maka Mama Mince dan kaum perempuan di kampungnya suka mengunyah sirih dan pinang sambil mengobrol atau membuat noken. "Kalau tidak mengunya sirih pinang, bisa sakit kepala," kata Mama Mince sambil tertawa.

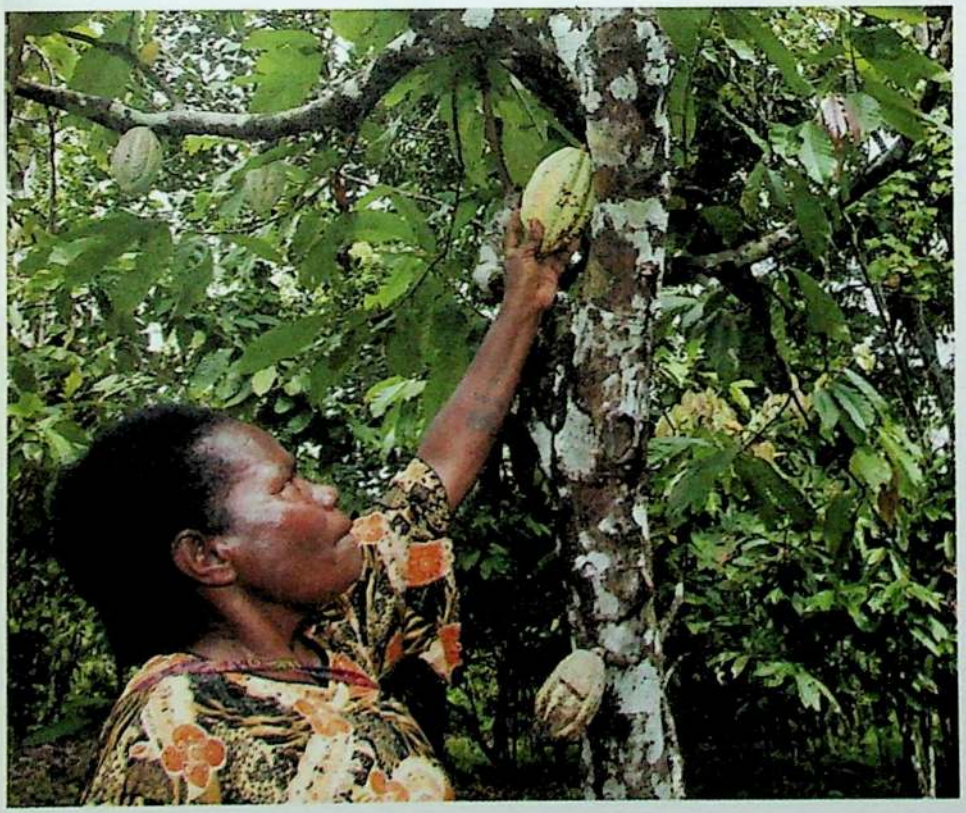
Bahan baku membuat Noken bisa dari serat kayu atau benang yang bisa dibeli jadi di pasar. Sirih dan pinang biasanya ditanam di kebun, kalau ada lebih panen, kadang dijual ke pasar dengan harga bervariasi antara Rp 25.000 hingga Rp 60.000/ kilogram, tergantung ukuran besar pinang. Selain sebagai petani, hampir seluruh warga Kwansu memiliki hewan ternak, biasanya adalah babi dan unggas seperti ayam dan bebek.





Seorang anak di Kwansu sudah terbiasa mengunyah sirih dan pinang yang dibubuhi kapur (bawah) (14/8/14).





Mengolah lahannya juga masih sederhana dan ada hal-hal yang perlu dipatuhi, misalnya, "Tidak boleh pakai wangi-wangian kalau mau bertani, nanti hasilnya jelek," kata Mama Mince tegas. Selain itu untuk tanaman tertentu seperti kacang panjang, setelah dua kali panen, maka penanamannya harus berpindah.

Singkong yang dijemur di depan rumah Mama Mince di Kwansu (atas).

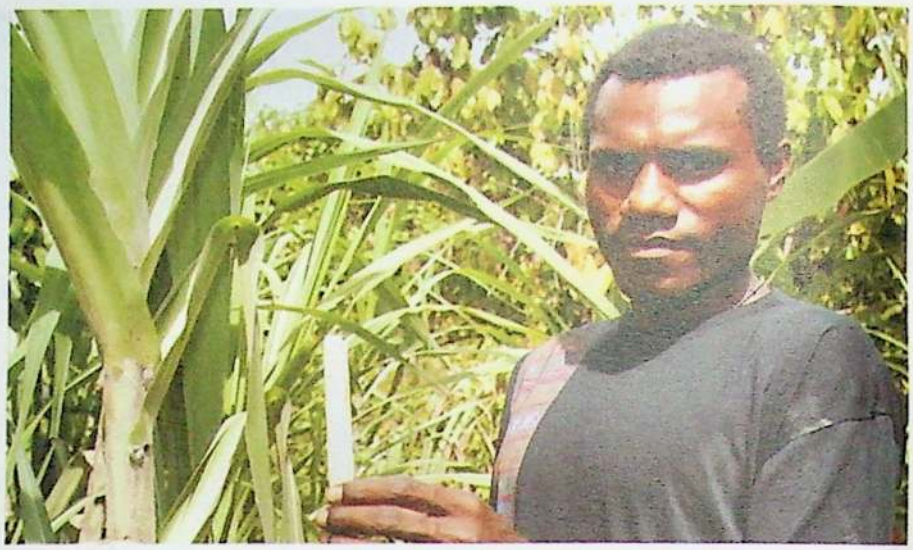
Mama Mince memeriksa buah kakao (14/8/14).

Peran Ondoafi

Ada lima suku di Kampung Kwansu, yaitu Suku Bano, Yaram, Waru, Bemey dan Kwano. Warga Kwansu rata-rata menggunakan Bahasa Sano untuk berkomunikasi. Kepemimpinan Komunitas adat di Pegang oleh masing-masing kepala Suku yang disebut Ondoafi. Meskipun di sistem administrasi desa ada kepala desa atau lurah, namun menurut Mama Mince dan Melki, Ondoafi mengatur banyak hal yang berhubungan dengan adat karena Ondoafi adalah pemimpin adat, termasuk mengatur hak atas tanah, perkawinan dan denda secara adat.

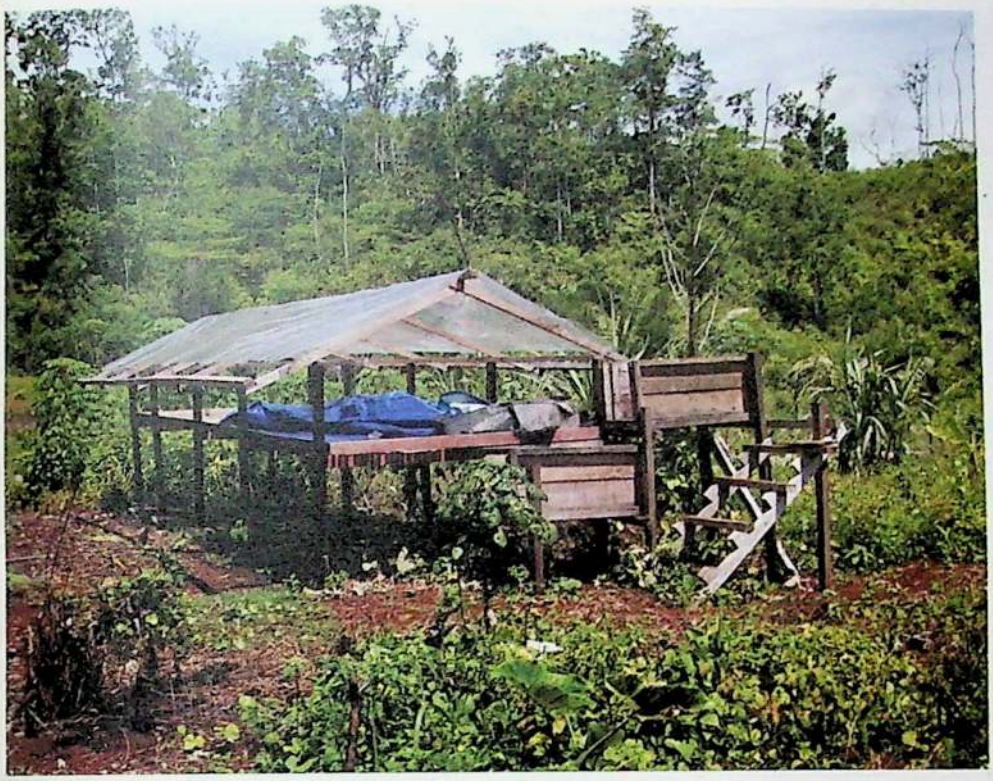
Kewajiban utama Ondoafi adalah memelihara kesejahteraan dan kepentingan warganya, termasuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan. Ondoafi berhak memiliki banyak istri dan berhak mengatur penguasaan dan pemakaian tanah.

Status Ondoafi ini diberikan turun temurun kepada anak laki-laki pertama dalam keluarga. Dalam tatanan budaya, anak laki-laki memiliki hak atas tanah dan tanah dimiliki sesuai jumlah anak laki-laki dalam keluarga. Luasnya sesuai dengan kemampuan mereka mengolahnya. Jika anak laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampung, maka pihak perempuan harus pindah ke kampung asal laki-laki.





Derek Bano, fasilitator di Kwansu menunjukkan tanaman hutan yang disebut "Sayur Tali" oleh masyarakat di kampungnya (14/8/14).



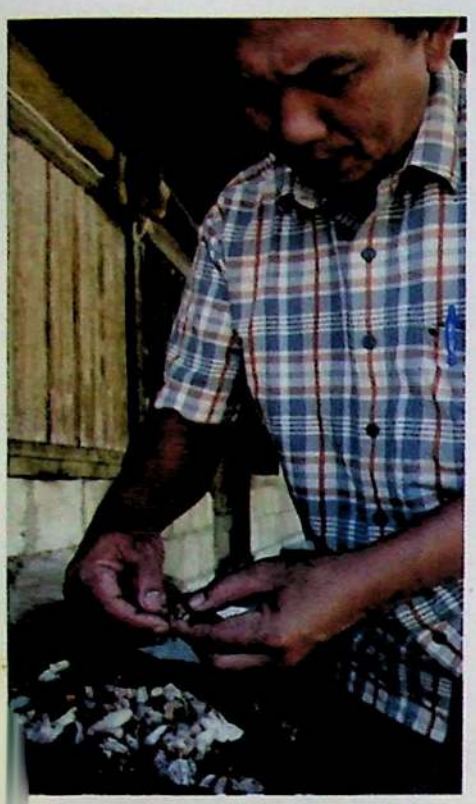
"Di kampung kami, sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya urusan berburu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tidak boleh ikut berburu. Tetapi kalau membuka ladang dan memelihara tanaman, itu menjadi tugas bersama. Umumnya hampir semua pekerjaan dibagi rata," kata Mama Mince.

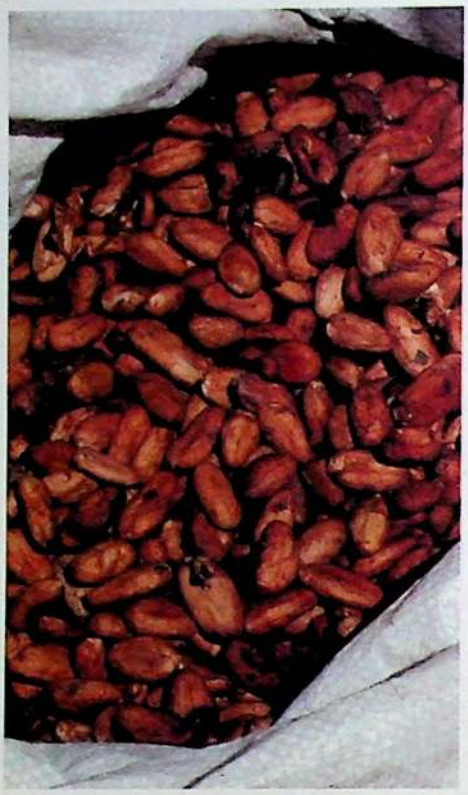
Dalam tatanan budaya modern, peran Ondoafi ini tetap penting. Ia menjadi penghubung antara masyarakat yang dipimpinnya dengan struktur formal di pemerintahan seperti di desa dan berhubungan dengan pihak luar seperti investor, terkait penggunaan tanah untuk kepentingan bernilai ekonomis yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. (Bao, 2013).



Kelompok membuat tempat penjemuran dan kotak fermentasi kakao di ladang milik Derek Bano di Kwansu (14/8/14).

Oktovina Yowi dan Isak Usmani, warga Kwansu (14/8/14)









Budaya dan Pembangunan

Perubahan yang diharapkan seringkali tidak secepat yang diharapkan. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan target pembangunan atau program yang biasanya dibatasi dengan waktu, dengan kondisi yang ada di masyarakat.

Budaya tradisional dan tantangan pembangunan modern ini menjadi hal yang sangat unik dalam konteks pembangunan dan pengembangan di Papua. Hal ini dirasakan betul oleh para pendamping dari KIPRa dan juga Oxfam. Tak terkecuali Kuncoro Samiyana, salah satu pendiri dan dewan penasehat Yayasan KIPRa (14/8/14).

Meskipun berasal dari Malang, namun Kuncoro sudah berdomisili di Papua sejak tahun 1970.

"Perbedaan paling mendasar untuk pertanian, pada jaman itu dan sekarang sangat terlihat dari pola pertanian. Masyarakat Papua menggunakan pola tradisional dengan cara ladang berpindah. Hal ini meskipun masih menjadi praktek sebagian besar masyarakat, namun kini masyarakat mengenal budaya pertanian menetap dan intensifikasi pertanian," kata Kuncoro.

Meskipun masyarakat Papua pada umumnya sudah terbiasa dengan pola bertanam menetap dan melakukan budidaya pertanian, namun budaya wirausaha belumlah tampak terlalu jelas terlihat. Hal ini diamati oleh staf Oxfam PEDP ketika bersama mitra mendampingi petani di empat Kabupaten di Provinsi Papua yang menjadi lokasi program.

"Di masyarakat tradisional Papua yang saya temui, pemahaman wirausaha itu baru sampai tahapan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di tingkat keluarga atau kelompok dan kampung. Hal ini berbeda konteks dengan pemahaman usaha atau konsep *enterprise*

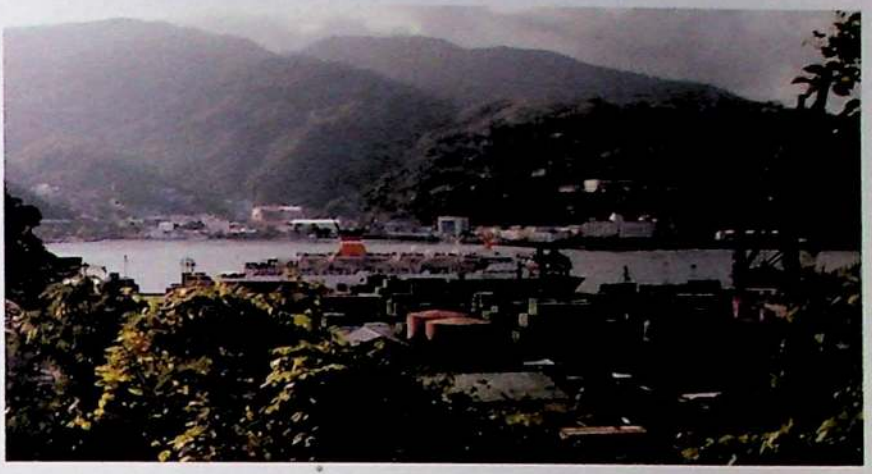
di masyarakat yang lebih maju," kata Juniar Mahdalena, Koordinator PEDP Oxfam.

Dalam konteks usaha bisnis, penerapannya dalam konteks program di Papua di tingkat masyarakat menghadapi perbedaan (*gap*) yang cukup besar.

"Ketika kita bicara konteks bisnis kakao, orientasinya ada di hilir industri. Kita biasanya sudah bicara akses dan jaringan pemasaran, logistik, pengemasan, dukungan kebijakan dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi saat ini, saya melihat bahwa masih butuh banyak tahapan pekerjaan untuk memperkuat hulu industri ini. Misalnya penguatan kelompok tani, budidaya yang efisien dan efektif untuk meningkatkan hasil," kata Qarinilwan Ishaq, Manajer PEDP Oxfam.

Meskipun demikian, baik Yayasan KIPRa dan staf PEDP Oxfam menyadari bahwa setiap program memiliki jangka waktu dan target yang harus dipenuhi. Perubahan memang tidak bisa diharapkan terjadi dalam waktu singkat. "Untuk konteks Papua, setahun hingga tiga tahun pertama biasanya baru sampai tahap identifikasi, pembentukan dan penguatan kelompok serta penguatan kapasitas untuk budidaya pertanian," kata Kuncoro.

Menurut Siprianus Guntur, staf PEDP Oxfam yang sudah menetap di Papua sejak tahun 2002, membuat desain program dalam konteks budaya Papua harus melibatkan tiga unsur yaitu unsur keagamaan melalui gereja, tokoh masyarakat adat seperti Ondoafi serta pemerintah daerah.



"Ketiga unsur ini saling berkaitan dan sangat penting bagi program untuk melibatkan mereka di dalam membuat desain program, termasuk berkonsultasi dan berkoordinasi. Hal ini akan mempercepat perubahan," kata Sipri.

Sejak awal Program PEDP menurut Sipri, sudah berkoordinasi dengan ketiga unsur ini juga melakukan perencanaan dengan mitra, Yayasan KIPRa. Mendekati masa akhir program pada bulan Oktober 2014 ini, tekanan untuk berpacu dengan waktu dan tujuan yang ingin dicapai oleh program dirasakan baik oleh Yayasan KIPRa dan Oxfam. "Kita perlu terobosan dan inovasi di dalam sisa waktu yang ada pada pelaksanaan program, fokus pada solusi dan lebih efisien untuk menjalankan program, termasuk bisa lebih aktif melakukan advokasi ke level kebijakan untuk pengembangan kakao," kata Qori optimis.

"Kami ini dari dulu tidak pandai menghitung, tahunya hanya cara mengerjakan ladang. Dari Oxfam-KIPRa saya belajar menghitung, termasuk untuk biaya makan ketika gotong royong kelompok. Saya belajar tanam yang lebih baik dan sekarang lebih bisa hitung daripada dulu," kata Mama Mince yang sempat bersekolah hingga tingkat SMP.

"Harusnya kami tetap didampingi hingga bisa lebih mandiri, setidaknya dalam satu dua tahun ke depan," kata Mama Mince berharap.

Qorinilwan, Manajer PEDP memeriksa biji Kakao basah di Hamonggrang (15/8/14). Biji Kakao kering. Siprianus Guntur dan Juniar Mahdalena, tim PEDP Oxfam. (Halaman kiri, searah jarum jam)

Pelabuhan peti kemas di Kota Jayapura

Cerita Cokelat dari Tanah Jayapura

Seumur hidup, Mince Waisimon, Kampung Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura tidak pernah membayangkan akan makan cokelat hasil tanah Papua asli. Ia hanya tahu bahwa biji kakao dari kebunnya dijual dan dibuat cokelat. Pengalaman itu sangat berkesan. "Ternyata cokelat Papua itu enak sekali ya," kata Mama Mince yang beranggapan yang makan cokelat itu hanya kalangan "orang kaya".

Kemunculan cokelat asli Papua memang belum lama, baru sekitar 6 tahun. Adalah I Made Budi yang pertama menggagas pembuatannya. Made adalah dosen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) di Universitas Cendrawasih selama 30 tahun. Latar belakang pengetahuannya di Jurusan Pangan dan Gizi IPB dan Mikrobiologi membantunya dalam bereksperimen dengan bahan baku pangan dan mengembangkannya menjadi produk pangan.

Awalnya pada tahun 2008 Made bereksperimen dengan membuat ekstrak buah merah Papua yang bermanfaat bagi kesehatan. Awal uji cobanya itu pun tidak sengaja dengan memberikan buah merah sebagai pakan bagi ayam yang sakit. Ketika ayam yang sakit sembuh semua, Made memberanikan diri mencoba membuat ekstrak buah merah untuk dikonsumsi orang.

Hasilnya mendapatkan respons yang luar biasa dari pasar. Penghasilan penjualan buah merah ini mencapai Rp 20-30 juta di awal, lalu meningkat menjadi Rp 100 juta. Konsumen mengaku mendapatkan manfaat kesehatan dari buah merah produksinya.



Proses produksi cokelat di laboratorium milik I Made Budi (13/8/14).



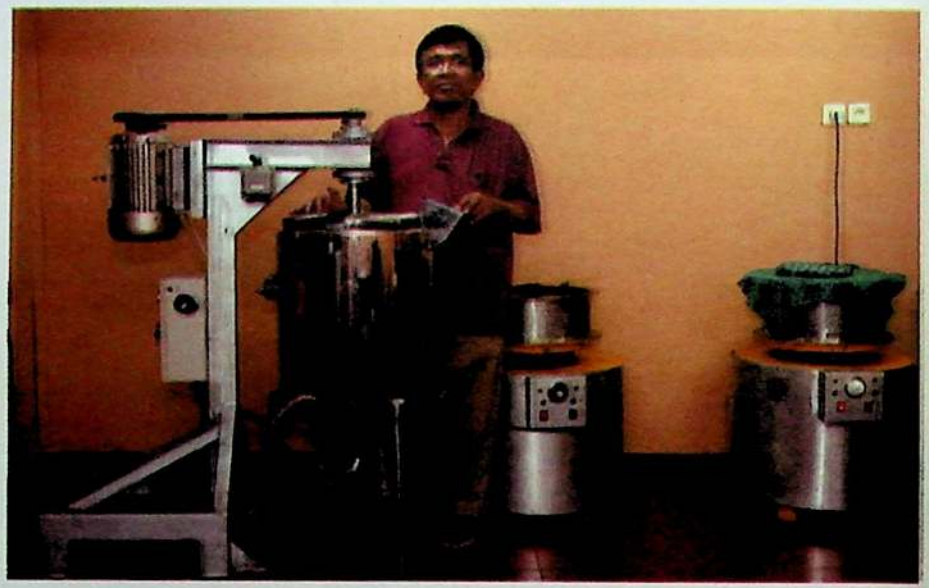
Dari modal awal itu Made terpikir untuk mengembangkan Kakao dan menjadikannya cokelat.

"Selama ini saya berpikir, kakao asal Papua selalu dibawa ke luar. Permintaan pasar luar biasa, berapapun produksi selalu habis. Lalu saya berpikir, mengapa saya tidak coba untuk membuat cokelat asal Papua?" cerita Made (13/8/14) yang awalnya sempat terpikir untuk fokus mengembangkan kopi.

Made melakukan riset independen sejak tahun 2008, ia belajar sepenuhnya melalui internet. Ia belajar membuat campuran cokelat hingga akhirnya ia memberanikan diri memesan cetakan cokelat dari Belgia. Rumah Made ibarat laboratorium. Ia bereksperimen membuat campuran cokelat. Tidak puas sampai disitu, Made belajar membuat mesin pengolahan cokelat. Tidak tanggung-tanggung, semua mesin dirakitnya sendiri dan terus diperbaiki. Mesinnya kini bisa memproduksi 100 hingga 200 kilogram dalam satu jamnya.

"Saya ini dosen dan akademisi, masa saya cuma bisa mengajar saja tapi tidak praktik. Saya ingin bereksperimen menggabungkan teknologi dengan bahan baku yang ada, ini lebih karena hobi dan ingin tahu. Mahasiswa saya juga bisa ikut praktik di sini," cerita Made.







Beberapa produk cokelat produksi Made.

Made dan mesin rakitan sendiri untuk memproduksi cokelat di "laboratorium" rumahnya.

Pekerja di "Pabrik Cokelat Made" (13/8/14).

Cokelat Selamatkan Nyawa

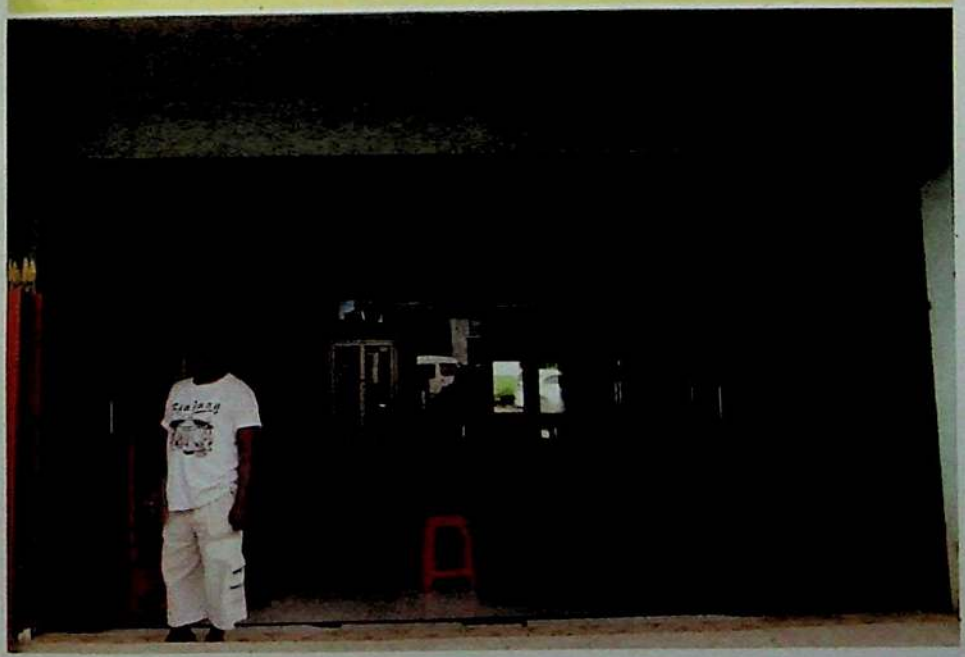
Ada lima suku di Kampung Kwansu, yaitu Suku Bano, Yaram, Waru, Bemey dan Kwano. Warga Kwansu rata-rata menggunakan Bahasa Sano untuk berkomunikasi. Kepemimpinan Komunitas adat di Pegang oleh masing-masing kepala Suku yang disebut Ondoafi. Meskipun di sistem administrasi desa ada kepala desa atau lurah, namun menurut Mama Mince dan Melki, Ondoafi mengatur banyak hal yang berhubungan dengan adat karena Ondoafi adalah pemimpin adat, termasuk mengatur hak atas tanah, perkawinan dan denda secara adat.

Kewajiban utama Ondoafi adalah memelihara kesejahteraan dan kepentingan warganya, termasuk mencegah dan menyelesaikan perselisihan. Ondoafi berhak memiliki banyak istri dan berhak mengatur penguasaan dan pemakaian tanah.

Status Ondoafi ini diberikan turun temurun kepada anak laki-laki pertama dalam keluarga. Dalam tatanan budaya, anak laki-laki memiliki hak atas tanah dan tanah dimiliki sesuai jumlah anak laki-laki dalam keluarga. Luasnya sesuai dengan kemampuan mereka mengolahnya. Jika anak laki-laki menikah dengan perempuan dari luar kampung, maka pihak perempuan harus pindah ke kampung asal laki-laki.

Made terus berkreasi. Ia membuat berbagai campuran cokelat termasuk membuat campuran buah merah Papua untuk cokelatnya dan membuat pengemasan untuk cokelat produksinya. Ia akhirnya membuat merk dagang TT yang merupakan kepanjangan dari Terima Kasih Tuhan. Made memiliki toko kecil menjual produk cokelat. Tokonya terletak di jalan lintas Sentani ke Kota Jayapura. Harga cokelatnya bervariasi antara Rp 10.000 hingga Rp 65.000. Made juga menjual cokelat dalam bentuk blok-blok untuk kebutuhan bahan baku industri.





Toko Cokelat Organik Papua milik Made (13/8/14).

I Made Budi.



"Cokelat ini manfaatnya macam-macam, dari pangan hingga kosmetik dan bahan baku kimia," kata Made yang juga membuat pupuk organik untuk dibagikan ke petani atau dijual dengan harga murah. Menurut Made keunikan cokelatnya adalah 100% asli Papua dan berbahan baku organik yang juga dari pengolahan pupuk kompos setempat.

Made mendapatkan bantuan pengembangan mesinnya dari Kementerian Riset dan Teknologi. Ia sering mendapatkan berbagai undangan untuk berbicara tentang pengembangan cokelat. Namun menurut Made, ia sangat selektif dalam memenuhi undangan.

"Saya ingin lebih banyak ahli yang datang ke sini, tinggal di sini dan membantu untuk membina petani. Jangan hanya mengisi sesi satu dua jam lalu pergi," kata Made. Ahli cokelat diperlukan untuk mendampingi di pangan dan juga berbagi ilmunya engan petani dan juga dengan tokoh masyarakat dan budaya setempat seperti kepala suku dan pemerintah daerah.

Program bantuan langsung tanpa mempelajari konteks budaya dan disertai pendampingan, menurut Made adalah sia-sia. Seringkali mesin atau alat yang harganya ratusan juta atau milyar hanya teronggok tidak digunakan dan menjadi monumen. "Seringkali bantuan yang diberikan itu bukan permintaan dari bawah atau merupakan kebutuhan masyarakat, akhirnya tidak terpakai dan sia-sia," kata Made menyayangkan.







Beberapa produk cokelat produksi Made dan Mesin pengaduk bantuan Kementerian Riset dan Teknologi untuk Made.

Staf PEDP Oxfam dan Made (13/8/14)

Penguatan di Hulu Industri

Menurut Made dalam pengembangan cokelat di Papua, perlu penguatan di hulu, yaitu penguatan kelompok tani dalam budidaya dan meningkatkan produksi serta kualitas produksi. Menurutnya di sinilah peran Oxfam dan Yayasan KIPRa amat dibutuhkan, karena pendampingan dan pengembangan kapasitas petani yang dilakukan dalam program PEDP akan sangat membantu mendorong perkembangan cokelat di Papua dan meningkatkan pendapatan petani serta ekonomi desa.

Made mengatakan menanam kakao adalah susah-susah gampang. Ia mengibaratkan perawatan kakao "manja seperti bayi". "Kebun harus dibersihkan setiap hari, harus dibuatkan drainase dan tunasnya harus selalu dipangkas, agar memungkinkan tunas baru berkembang," kata Made. Hal ini yang menurut Made belum dilakukan secara maksimal oleh petani kakao. Selain itu permasalahan hama juga harus dicarikan solusinya.

Menurut Made, petani sebaiknya diberikan penjelasan ilmiah tentang budidaya kakao dengan bahasa yang mudah dipahami, serta terus menerus diberikan motivasi dan contoh-contoh yang baik di dalam praktik budidaya kakao, agar petani dapat langsung melihat buktinya.

Selama ini petani menolak jika lahannya dibuat menjadi lahan percontohan tempat uji coba. Kekhawatirannya adalah jika hasil panen menurun. Karena itu Made menyarankan untuk mempertimbangkan program pendampingan untuk menyewa lahan petani untuk membuat demplot sebagai alternatif untuk mengurangi risiko turun produksi panen, seperti yang dikhawatirkan petani.

Di dalam berbagi pengalamannya, Made tidak pernah mau membeda-bedakan siapa yang datang, baik penduduk asli Papua atau Amber (pendatang). Siapapun yang datang ia terima dengan tangan terbuka. Made juga senang "menantang" petani dalam meningkatkan produksi dan kualitasnya. Ia memberikan spesifikasi kualitas dan jumlah produksi untuk memotivasi petani.

Hal ini diakui oleh Melki Esau Waru, anggota Kelompok Mabuma II, salah satu dari dua kelompok dampingan Oxfam-KIPRa di Kampung Kwansu, Distrik Kemtuk, Kabupaten Jayapura.

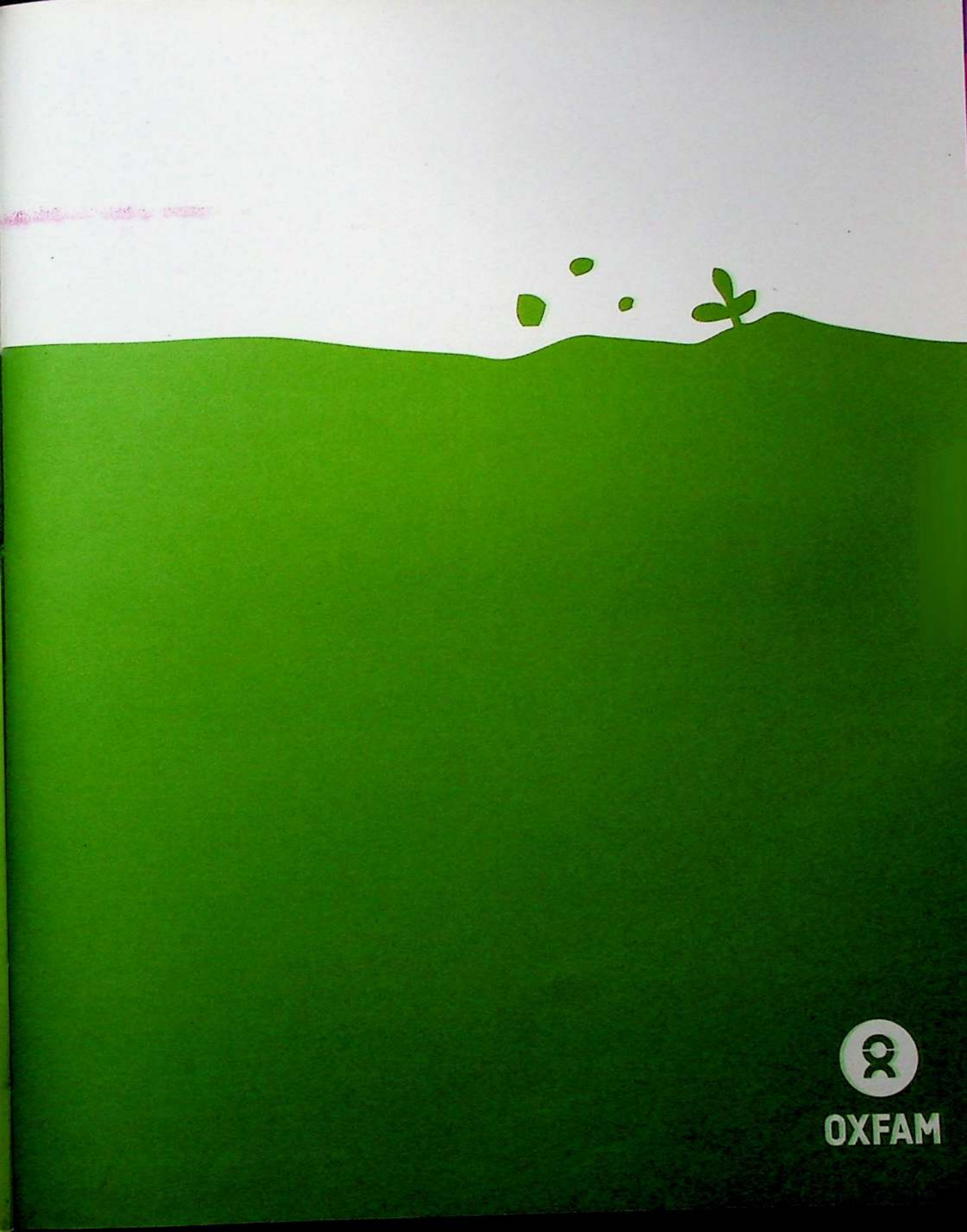
"Pak Made tantang kita untuk kumpulkan 200 kilogram biji kakao kering atau yang sudah fermentasi. Kita tidak bisa penuhi itu sendiri-sendiri atau kelompok. Kita akan coba diskusikan dengan Kelompok Waibano di Hamonggrang, semoga mereka mau diajak kumpulkan kakao kering untuk dijual ke Pak Made untuk bikin cokelat," kata Melki.

Buah kakao yang sudah masak di Kwansu (14/8/14)








OXFAM